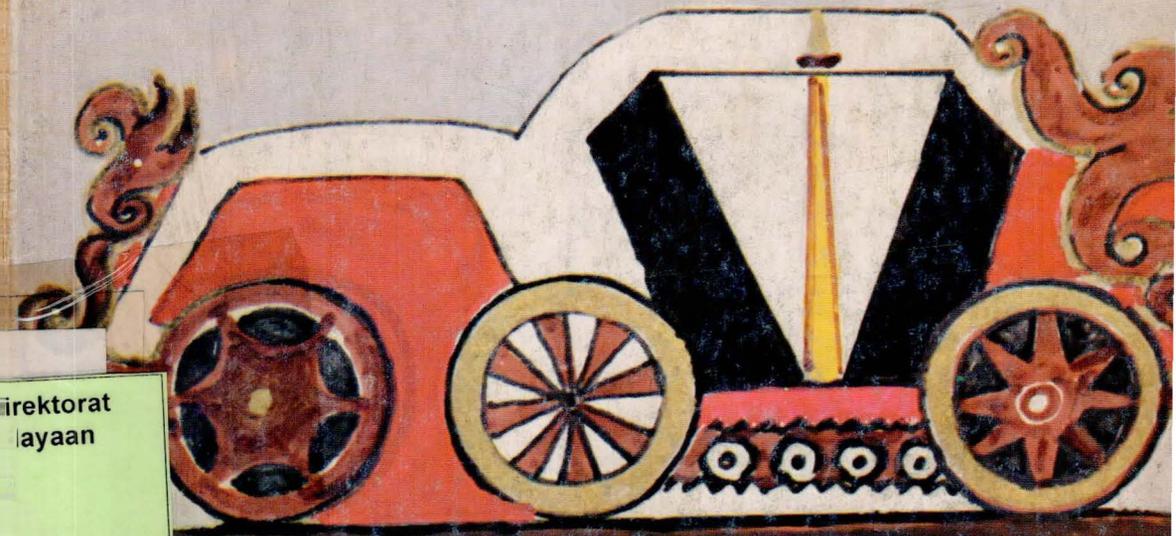




**SEJARAH PENGARUH PELITA
TERHADAP KEHIDUPAN
MASYARAKAT PEDESAAN
DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**



irektorat
ayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan.

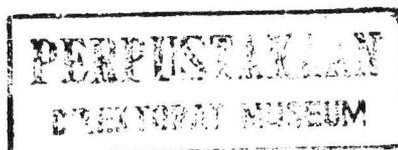
953.8000 11 J

5

**SEJARAH PENGARUH PELITA
TERHADAP KEHIDUPAN
MASYARAKAT PEDESAAN
DAERAH KHUSUS
IBU KOTA JAKARTA**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1983.**



PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PERUSAHAAN
TANGGAL 7 Maret 1984
ASRI 118/24 B21

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1981/1982.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. S.Z. Hadisutjipto, M. Nusyirwan BA, Drs. Sudiyo, Sutardjo BA, Drs. Sriyono Sumanto, A. Baidowi Affandi BA, Abdul Azis dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Sutrisno Kutoyo, Dra. Sri Sutjianingsih.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

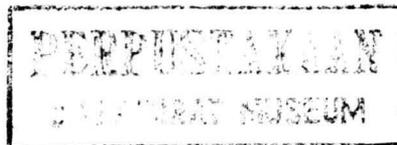
Jakarta, Oktober 1983

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589



**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1981/1982 telah berhasil menyusun naskah Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari Pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Oktober 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB. SATU PENDAHULUAN	1
A. RUMUSAN PERMASALAHAN	2
1. Maslaah Umum	2
2. Masalah Khusus	2
B. TUJUAN PENELITIAN	3
1. Tujuan Umum	3
2. Tujuan Khusus	3
C. RUANG LINGKUP	3
1. Ruang Lingkup Geografis	3
2. Ruang Lingkup Permasalahan	3
D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSE- DUR PENELITIAN	4
1. Metode dan Teknik	4
2. Langkah Kerja	4
 BAB II KEADAAN DESA SEBELUM PELITA	
A. KEADAAN LINGKUNGAN ALAM DAN PEN- DUDUK	6
B. KEADAAN PENDIDIKAN	15
C. STRUKTUR PEMERINTAHAN	20
D. CARA PEMILIHAN DAN PERANAN PEMIM- PIN PEMERINTAHAN DESA	23
E. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH	29
F. KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK	33
G. KEADAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN	38

BAB I PENDAHULUAN

Sejak tahun 1969 Pemerintah telah melaksanakan suatu sistem pembangunan bertahap secara berencana, yaitu yang dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Sampai saat ini kita telah menyaksikan pelaksanaan Pelita dalam dua tahap dan dewasa ini kita sedang memasuki pelaksanaannya yang ketiga. Dengan demikian tentu dapat pula dikatakan bahwa pelaksanaan Pelita itu telah pula menimbulkan pelbagai akibat sebagai wujud dari pengaruh yang dilahirkannya. Dan secara sepintas lalu memang kita telah menyaksikan pelbagai pengaruh yang dibawakannya, dan ini tidak hanya ada pada kehidupan masyarakat kota tetapi juga menjangkau masyarakat pedesaan.

Jika kita menyinggung lebih lanjut kehidupan desa dan peranannya, dapat kita lihat bahwa sebahagian besar kehidupan penduduk negara kita ada di bidang pertanian. Karena itu kebutuhan hidup masyarakat tergantung pada desa. Agak berbeda dari kebanyakan desa di Indonesia, untuk wilayah DKI Jakarta kehidupan masyarakatnya adalah non agraris. Pengertian desa di sini yaitu sesuai dengan definisi resmi tentang desa dan kelurahan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1979, yang menerangkan sebagai berikut: "Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat". Tetapi untuk desa di DKI Jakarta ini dapat disamakan dengan kelurahan, yakni tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, karena di DKI Jakarta tidak terdapat Daerah Tingkat II (DATI II), dan Walikota hanya merupakan daerah administratif, sedangkan di daerah lain terdapat Daerah Tingkat II dengan sebutan Bupati/ Kepala Daerah, sehingga pengertian desa untuk di luar DKI Jakarta, agak berbeda dengan desa yang ada di DKI Jakarta. Secara mudahnya bahwa desa di DKI Jakarta sama dengan kelurahan yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sedangkan desa-desa di luar DKI Jakarta berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Demikian pula dengan adanya hubungan dan transportasi yang amat mudah di desa-desa atau kelurahan-kelurahan di wilayah DKI

Jakarta, maka kelurahan-kelurahan itu tidak dapat pula menghindari diri dari pengaruh di pusat kota, kemudian pula karena makin majunya alat-alat komunikasi lainnya.

Sadar akan pentingnya kedudukan pedesaan atau kelurahan di wilayah DKI Jakarta dalam rangka pembangunan negara, maka pemerintah selalu meningkatkan perhatiannya kepada desa atau kelurahan. Misalnya, sebagai salah satu indikator bantuan pembangunan desa atau kelurahan di wilayah DKI Jakarta pada setiap Pelita terlihat cenderung meningkat.

Berdasarkan atas kenyataan-kenyataan ini semua, maka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah yang dikelola pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merasa perlu untuk memilih topik sebagaimana tertera di atas.

Diharapkan penelitian dan penulisan Aspek Sejarah Pengaruh Pelita di wilayah DKI Jakarta terhadap kehidupan masyarakat pedesaan ini akan dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan Nasional dan kepada masyarakat Indonesia.

A. RUMUSAN PERMASALAHAN

1. Masalah Umum

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional belum dapat sepenuhnya melayani data yang terjalin dalam bahan kesejarahan, nilai budaya, sistem budaya, lingkungan budaya baik untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan kepentingan masyarakat.

2. Masalah Khusus

Masalah pemerintahan di pedesaan merupakan salah satu aspek kehidupan kebudayaan dihubungkan dengan pembangunan nasional, memegang peranan penting sehingga pengungkapan akan aspek sejarah tentang pengaruh Pelita di daerah khususnya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan sangat diperlukan. Terutama tantangan perkembangan sistem pemerintahan di desa, termasuk pemikiran-pemikiran tentang pengaruh yang berkaitan dengan pengaruh kehidupan masyarakat pedesaan belum didokumentasikan secara se-nestinya.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

- a. *Untuk menyediakan data dan informasi sejarah dan kebudayaan bagi keperluan pelaksanaan kebudayaan*
- b. *Untuk menyediakan data dan informasi sejarah dan kebudayaan bagi keperluan pelaksanaan pendidikan*
- c. *Untuk menyediakan data dan informasi sejarah dan kebudayaan bagi keperluan masyarakat*

2. Tujuan Khusus

- a. *Dengan adanya data dan informasi "Sejarah Pengaruh Pelita di Wilayah DKI Jakarta Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan", pengambilan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih disempurnakan.*
- b. *Untuk memberikan sumbangan kepada mereka yang menaruh minat terhadap usaha penulisan sejarah kontemporer di Indonesia*
- c. *Penulisan ini diharapkan untuk pengumpulan bahan-bahan kesejarahan yang berguna untuk penulisan sejarah berkala Nasional di kemudian hari*

C. RUANG LINGKUP

Penelitian dan penulisan "Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta" mempunyai ruang lingkup yang mengungkapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintahan desa. Ruang lingkup ini menyangkut dua hal yaitu:

1. Ruang Lingkup Geografis

Meliputi Wilayah daerah tingkat satu (Propinsi) di sini diambil 9 desa dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berasal dari tiga wilayah yaitu: Wilayah Jakarta Timur, Wilayah Jakarta Barat, Wilayah Jakarta Utara, Wilayah Jakarta Selatan dan Wilayah Jakarta Pusat. Desa-desa yang dijadikan sampel adalah dari tiga Wilayah Walikota diambilkan tiga kelurahan dengan kretaria desa termaju satu buah,

desa sedang satu buah, dan desa yang kurang maju satu buah. Karena untuk desa-desa di DKI Jakarta sejarah tahun 1979, sudah secara keseluruhan menjadi desa swasembada, sekalipun masih ada perbedaan tingkat kemajuannya.

2. Ruang Lingkup Permasalahan

Permasalahan yang digarap adalah menyangkut pada pengaruh Pelita terhadap masyarakat pedesaan. Pengaruh yang dimaksud adalah yang menyangkut pemerintahan desa.

D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

1. Metode dan Teknik

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Untuk melaksanakan metode tersebut dipergunakan teknik wawancara dengan informan, melakukan pencatatan dan *library research* (penelitian perpustakaan).

2. Langkah Kerja

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, dengan uraian sebagai berikut:

Tahap Pertama (Persiapan)

- a. Rapat persiapan pendahuluan anggota tim
- b. Mengumpulkan bahan-bahan pustaka dan indentifikasi sumber data
- c. Menyusun instrumen penelitian
- d. Mempersiapkan perlengkapan lapangan dan pembelian alat-alat dan bahan-bahan yang dipergunakan untuk penelitian
- e. Orientasi lapangan dan pendekatan sosial

Tahap Kedua (Penelitian perpustakaan dan lapangan/perekaman data)

- a. Mengumpulkan data perpustakaan
- b. Mengumpulkan data lapangan
- c. Wawancara/interview dengan informan
- d. Klasifikasi data (sementara)

Tahap Ketiga (Pengolahan/penyusunan data)

- a. **Transkripsi hasil wawancara**
- b. **Transkripsi hasil penelitian perpustakaan**
- c. **Klasifikasi data**
- d. **Diskusi, Analisa dan Koreksi**
- e. **Penulisan dan penyusunan naskah**

Tahap Keempat (Penulisan Naskah/Editing)

- a. **Pengetikan naskah pada sheet stensil**
- b. **Koreksi naskah stensil**
- c. **Penjilidan naskah**
- d. **Penyampaian hasil naskah penelitian**
- e. **Revisi naskah hasil penelitian**

BAB II

KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

A. KEADAAN LINGKUNGAN ALAM DAN PENDUDUK

Di Wilayah DKI Jakarta keadaan desa sebelum Pelita (1950 – 1965), memberikan suatu gambaran desa yang sederhana dan sedang berkembang. Sederhana baik dalam bidang perekonomian, sosial budaya masyarakatnya, pendidikan dan keadaan alam serta lingkungan penduduknya.

Kita akan mengambil beberapa contoh dari 3 (tiga) wilayah di DKI Jakarta, yaitu:

Wilayah Jakarta Timur, dengan 3 (tiga) desa atau kelurahan yang diambil sebagai contoh, yaitu:

1. Kelurahan Jati Rawamangun di Kecamatan Pulo Gadung
2. Kelurahan Penggilingan di Kecamatan Cakung
3. Kelurahan Klender di Kecamatan Jatinegara

Wilayah Jakarta Barat, dengan 3 (tiga) desa atau kelurahan yang diambil sebagai contoh, yaitu:

1. Kelurahan Jembatan Lima di Kecamatan Tambora
2. Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Cengkareng
3. Kelurahan Jelambar di Kecamatan Grogol Petamburan

Wilayah Jakarta Selatan, dengan 3 (tiga) desa atau kelurahan yang diambil sebagai contoh, yaitu:

1. Kelurahan Gandaria Utara di Kecamatan Kebayoran Lama
2. Kelurahan Menteng Atas di Kecamatan Setia Budi
3. Kelurahan Jagakarsa di Kecamatan Pasar Minggu

Tetapi sebelum kita meninjau desa-desa atau kelurahan-kelurahan tersebut secara terperinci, yang akan memberikan gambaran tentang keadaan desa-desa di DKI Jakarta sebelum Pelita, akan kita tinjau gambaran secara umum pengertian desa dan pembangunan desa yang dapat kita lihat hasil monitoring/penelitian tahun 1979/1980 di DKI Jakarta. Karena sejak tahun 1979 tersebut merupakan titik tolak perubahan desa yang berstatus Swakarya dan

Swadaya menjadi desa Swasembada untuk seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.¹⁾

Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah dan Pembangunan Negara merupakan suatu kesatuan. Semua kegiatan usaha pembangunan Pemerintahan terpadu di desa. Desa adalah merupakan sub-sistem dari sistem yang lebih besar. Pembangunan desa dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari satu desa dan prinsipnya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Desa tidak dapat berkembang secara maksimal tanpa adanya pusat pembangunan. Oleh karenanya di dalam pengembangan desa, Pemerintah DKI Jakarta semenjak lama telah memikirkan akan adanya pusat-pusat di dalam segala sektor yang memungkinkan untuk dibina. Tetapi pada masa-masa sebelum Pelita keadaan ini belum menampakkan titik terang.

Dari hasil monitoring/penelitian potensi desa tahun 1979/1980 di DKI Jakarta dapat diuraikan analisa data yang relatif tetap dan berkembang sebagai berikut:

1) Indikator yang Relatif Tetap

a) Keadaan kepadatan penduduk/*density* propinsi DKI Jakarta tahun 1979/1980. Seluruh Kelurahan (desa) di DKI Jakarta (236 kelurahan) telah mencapai *score* D.3 (jumlah penduduk lebih dari 300 jiwa per km²). Penduduk DKI Jakarta berjumlah 6.081.063 jiwa. Luas wilayah 637,44 km².

b) Keadaan Alam

Keadaan alam yang mencakup segi kesuburan tanah, curah hujan dan bentuk permukaan tanah, dalam taraf sedang (N2). Keadaan ini tidak begitu berpengaruh dalam kehidupan penduduk Jakarta, karena cara hidup penduduk Jakarta adalah non agraris yang tidak lagi menggunakan tanah sebagai faktor untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk Jakarta yang diperlukan bukan intensifikasi pertanian tetapi peningkatan ilmu dan ketrampilan serta usaha untuk pelestarian lingkungan hidup.

1) Wawancara dengan Bapak Drs. Singgih, Kepala Urusan I/Pemerintahan Kantor Wali - Kota Jakarta Timur tanggal 25 Agustus 1981 di Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

- c) **Letak Desa Terhadap Pusat Fasilitas**
Pusat fasilitas sangat berpengaruh terhadap percepatan perkembangan desa. Kelurahan di DKI Jakarta boleh dikatakan telah menyatu dengan pusat fasilitas, baik dengan Ibu kota Propinsi, Walikota maupun kecamatan. Pusat fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang meliputi beberapa aspek antara lain kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, olah raga, kebersihan, pemasaran, hiburan, transportasi, lapangan kerja dan keamanan semuanya telah menjangkau sampai ke kelurahan.

Untuk meningkatkan dan memantapkan desa Swasembada maka fasilitas pemenuhan kebutuhan/pelayanan harus terus menerus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan hidup masyarakat.

2) **Indikator yang Relatif Berkembang**

- a) **Keadaan mata pencaharian penduduk**

Hampir seluruh kelurahan di DKI Jakarta telah mempunyai kode E3. Mata pencaharian penduduk pada bidang jasa dan perdagangan. Untuk ini perlu lapangan kerja dengan menumbuhkan semangat berwiraswasta.

- b) **Keadaan produksi desa**

Pada tahun 1979/1980 kelurahan di DKI Jakarta telah mempunyai *score* Y3 (produksi desa telah melampaui Rp 100.000.000,- pertahun). Dan sebagian besar telah mencapai lebih dari Rp 100.000.000,- pertahun.

3) **Kondisi Adat Istiadat Masyarakat Desa**

Adat istiadat sudah tidak mengikat lagi di mana masyarakat sudah tidak melaksanakan kebiasaan tradisional yang bertentangan dengan tujuan Pembangunan Nasional.

4) **Kondisi Kelembagaan Desa**

Keadaan kelembagaan desa di DKI Jakarta sudah dalam taraf 'maju' (L3). Semua kelurahan di DKI Jakarta sudah ada lembaga masyarakat yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah seperti Lembaga Pemerintahan, Perekonomian, (LKMD (K), Lembaga Kesehatan, Lembaga Kesen-

an, Lembaga Gotong-Royong, Lembaga pendidikan dan Lembaga Keamanan.

5) Tingkat Pendidikan

Kelurahan yang jumlah penduduknya antara 30% – 60% lulusan sekolah dasar (Pd2) ada 65% = 153 kelurahan, dan yang tingkat pendidikannya cukup (Pd3) ada 35% = 83 kelurahan. Keadaan ini disebabkan oleh urbanisasi di mana pendatang yang mencari kerja di Jakarta sebagian besar tidak tamat Sekolah Dasar.

6) Keadaan Swadaya Gotong-royong Masyarakat

Gotong royong sudah dalam taraf manifes, di mana pelaksanaan gotong royong pada umumnya sudah berencana yaitu berdasarkan putusan dan melalui musyawarah, sehingga semua warga desa terlibat dalam kegiatan gotong-royong sesuai dengan tingkat kemampuannya, baik dalam bentuk uang, tenaga, barang dan pikiran.

Demikianlah suatu gambaran secara umum hasil monitoring/penelitian potensi desa tahun 1979/1980 di DKI Jakarta (Pelita), di mana kita dapat melihat analisa data yang relatif tetap dan berkembang. Bagaimana keadaan lingkungan hidup (alam) dan penduduk di kelurahan-kelurahan sebelum Pelita dapat juga diambil hasil monitoring/penelitian tersebut mengenai keadaan yang relatif tetap.

Jadi kelurahan-kelurahan tersebut sebelum Pelita (1950 – 1965) ditinjau dari segi keadaan lingkungan alam dan penduduk, secara umum dapatlah dikatakan sama seperti yang telah dilakukan monitoring/penelitian mengenai potensi desa tahun 1979/1980 di DKI Jakarta tersebut, yaitu keadaan alam yang mencakup kesuburan tanah, curah hujan dan bentuk permukaan tanah dalam taraf sedang di mana keadaan ini tidak begitu berpengaruh dalam kehidupan penduduk Jakarta. Pada masa tersebut di atas cara hidup penduduk Jakarta bersifat agraris, yaitu masih menggunakan tanah sebagai faktor untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi keadaan ini tidak sama dengan keadaan sifat agraris di daerah-daerah lain, karena tidak semata-mata menggantungkan penghasilan dari sektor ini saja.

Pada waktu itu untuk Jakarta yang diperlukan sudah bukan intensifikasi pertanian saja, tetapi peningkatan ilmu dan keterampilan serta usaha pelestarian lingkungan hidup telah mulai terlihat.

Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia, tempat dipusatkannya kantor-kantor pemerintah dan perdagangan yang luas ruang lingkungannya harus mampu beruang lingkup internasional, harus mampu bersaing dalam peningkatan ilmu dan keterampilan, di samping usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup yang mutlak diperlukan untuk hal-hal tersebut.

Secara umum keadaan lingkungan alam dan penduduknya di wilayah DKI Jakarta pada masa sebelum Pelita (1950 – 1965) yang dapat kita kemukakan sebagai contoh adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Batas-batas kelurahan ini adalah

sebelah timur	: Kelurahan Jatinegara Kaum
sebelah selatan	: Kelurahan Pisangan Kebembem
sebelah barat	: Jalan <i>Bypass</i>
sebelah utara	: Jalan Pemuda

Luas wilayah kelurahan Jatirawamangun lebih kurang 220 ha, yang terdiri dari tanah darat.

Sama dengan keadaan lingkungan alam di kebanyakan wilayah DKI Jakarta lainnya yaitu yang mencakup segi kesuburan tanah, curah hujan dan bentuk permukaan tanah, dalam taraf sedang. Keadaan ini juga tidak begitu berpengaruh dalam kehidupan penduduk. Di desa ini penduduknya kebanyakan berdagang kebutuhan sehari-hari yang bahan-bahannya dibeli dari luar daerah seperti dari Bekasi dan Bogor.

Mata pencaharian penduduk kebanyakan berdagang, mengusahakan sawah-sawah, di samping usaha-usaha ketrampilan di mana membutuhkan peningkatan ilmu dalam pekerjaan mereka seperti tukang kayu, menjadi sopir atau bergerak dalam bidang jasa angkutan lainnya. Jadi sifat pencaharian mereka tidak tergantung dari tanah-tanah sawah yang masih banyak terdapat pada masa itu di Kelurahan ini.

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Kelurahan Penggilingan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.Da. 11/2/28/72, tanggal 20 Mei 1972, termasuk daerah perluasan Industri Kawasan Pulogadung. Batas-batas wilayahnya adalah:

sebelah utara : Kali Cakung / Kelurahan Cakung.
sebelah timur : Empang /Tanah Urugan/Kelurahan Pulogadung.
sebelah selatan : Rel K.A. /Kelurahan Malaka.
sebelah barat : Kali Buaran/Kelurahan Jatinegara.

Luas wilayah kelurahan Penggilingan seluruhnya 469 ha yang terdiri atas:

tanah darat seluas : 270.125 ha.
tanah sawah seluas : 198.875 ha.

Di Kelurahan ini keadaan segi kesuburan tanah, curah hujan dan bentuk permukaan tanah dalam taraf sedang. Keadaan ini juga tidak berpengaruh dalam kehidupan penduduk. Penduduknya terdiri dari para pedagang yang masih bersifat agraris dalam ruang lingkup yang sederhana, di samping itu usaha-usaha di bidang ketrampilan yang membutuhkan peningkatan ilmu dan pengalaman banyak seperti usaha kerajinan tangan dan bergerak dalam bidang jasa angkutan.

3. Kelurahan Kelender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Kelurahan Kelender, sejalan dengan pemecahan Jakarta menjadi lima wilayah Walikota, maka untuk wilayah kelurahan Kelender terdiri dari:

sebagian eks Kelurahan Kelender Lama.
sebagian eks Kelurahan Kampung Sumur.
sebagian eks Kelurahan Delapan Puluh.

Luas wilayah kelurahan Kelender seluruhnya lebih kurang 250 ha

yang terdiri dari tanah darat dan termasuk daerah perkotaan dan daerah industri kecil.

Tidak jauh berbeda dengan kelurahan-kelurahan lainnya. Di Kelurahan ini sebagian besar penduduk sebelum Pelita mempunyai mata pencaharian pertanian. Usaha untuk merubah cara hidup pertanian ke arah industri sangat erat hubungannya dengan perkembangan lingkungan. Karena banyaknya fasilitas dan sarana industri yang dibangun di daerah ini mengakibatkan makin berkurangnya daerah-daerah pertanian dan terdesak pula mata pencaharian penduduk asli, dari pertanian menuju ke arah perindustrian. Sejak tahun 1965 sudah mulai banyak industri-industri kecil yang ada di daerah ini.

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Kelurahan Gandaria Utara, dengan batas-batas wilayah administrasi Kelurahan sebagai berikut:

sebelah utara	: Jl. Pela I dan Jalan Gandaria I.
sebelah selatan	: Jl. Haji Nawil Kel. Gandaria Selatan.
sebelah barat	: Kali Gorogol Kebayoran Lama.
sebelah timur	: Jl. Petogokan I Kel. Pulo.

Luas wilayah kelurahan Gandaria Utara keseluruhan lebih kurang 141,7 ha yang terdiri dari tanah darat dan daerah perkotaan.

Seperti kita lihat pada kelurahan-kelurahan lain dalam wilayah DKI Jakarta, Kelurahan Gandaria Utara tidaklah jauh berbeda. Dua pertiga dari luas kelurahan ini adalah tanah pertanian dan perkebunan. Jadi dapat dikatakan mata pencaharian penduduk adalah pertanian. Untuk Wilayah Jakarta Selatan sangat sulit untuk mengubah usaha dari pertanian ke industri, karena tidak adanya industri baik besar maupun kecil di Kelurahan Gandaria Utara ini. Tanah pertanian tersebut berkurang disebabkan karena pemukiman, baik pendatang maupun penduduk asli.

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Menurut Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 16.3/2/14/67, tertanggal 16 Juli 1967, pembentukan wilayah administratif kecamatan dan kelurahan, maka Kelurahan Menteng Atas mempunyai batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : Jalan Menteng Atas, Jalan Muria
sebelah selatan : Jalan Menteng Pulo
sebelah timur : Jalan Dr. Sahardjo
sebelah barat : Kali Cideng

Luas wilayah Kelurahan Menteng Atas, saat ini meliputi lebih kurang 100 ha yang terdiri dari tanah darat dan daerah perkotaan.

Keadaan lingkungan alam di Kelurahan Menteng Atas ini berbeda dengan kelurahan lain di DKI Jakarta, karena sebagian besar dari daerah kelurahan terdiri dari rawa dan sawah. Perekonomian atau mata pencaharian penduduk sangat tergantung dengan bercocok tanam, sebagian kecil sebagai petani kembang yang memanfaatkan tanah pekarangan rumah.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Kelurahan Jagakarsa, terletak di Kecamatan Pasar Minggu dengan arbitasi 7 km sebelah barat-selatan kecamatan, dengan batas-batas:

sebelah utara : Wilayah Kelurahan Ragunan, Cilandak
sebelah timur : Wilayah Kelurahan Lenteng Agung dan Srengseng Sawah
sebelah selatan : Wilayah Kelurahan Ciganjur dan Kelurahan Srengseng Sawah
sebelah barat : Wilayah Kelurahan Pondok Labu dan Desa Pangkalan Jati

Luas Wilayah Kelurahan Jagakarsa lebih kurang 576,247 ha yang terdiri dari:

tanah milik : 396,247 ha
tanah negara : 180.000 ha

Di Kelurahan ini keadaan segi kesuburan tanah, curah hujan dan bentuk permukaan tanah dalam taraf sedang. Keadaan ini tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Penduduk kelurahan ini adalah agraris seperti bertani, berkebun dan mengusahakan atau mengelola empang. Di samping itu mata pencaharian penduduk di kelurah-

an ini yang disebut dengan istilah tani dagang. Sebahagian besar dari penduduknya adalah penduduk asli.

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Batas-batas Kelurahan Jelambar adalah sebagai berikut:

sebelah selatan	: Jalan Daan Mogot dan Jl. Kereta Api
sebelah barat	: Kali Cisadane dan Kali Jelambar
sebelah utara	: Jalan Tubagus Angke, Kali Angke
sebelah timur	: Jalan Prof. Dr. Latumeten dan Kali Banjir Kanal.

Luas wilayah Kelurahan Jelambar keseluruhan 561,27 ha, terdiri dari atas:

tanah perumahan	: ± 250 ha
tanah industri	: ± 150 ha
tanah kosong/sawah	: ± 11 ha
tanah lain-lain	: ± 141,27 ha

Keadaan lingkungan alam kelurahan ini adalah sebagian besar merupakan sawah, rawa-rawa dan tanah pekuburan. Penduduk belum begitu banyak, hanya belasan ribu jiwa. Mata pencaharian penduduk sebagian besar bertani. Keadaan perekonomian masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, karena belum adanya sarana dan prasarana serta belum didapati sumber-sumber perekonomian.

8. Kelurahan Jelambar Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Batas-batas Kelurahan Jembatan Lima adalah sebagai berikut:

sebelah utara	: Kali Angke Kelurahan Pekojan
sebelah selatan	: Kali Krendang Kelurahan Krendang
sebelah timur	: Jalan K.H. Mas Mansyur, Kelurahan Tambora
sebelah barat	: Jalan Kereta Api, Kelurahan Angke

Luas wilayah Kelurahan Jembatan Lima berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.16/I/30/69, tanggal 1 Maret 1969, meliputi 50,055 ha, yang terdiri atas:

tanah milik	: 14,015 ha
tanah negara	: 27,030 ha
tanah lain-lain	: 9.000 ha

Di Kelurahan ini keadaan kesuburan tanah, curah hujan dan permukaan tanah dalam taraf minim. Hal ini berpengaruh dalam kehidupan penduduk, di mana keadaan lingkungan yang semrawut. Mata pencaharian penduduk kebanyakan menjadi buruh musiman (buruh kasar). Begitu juga kelurahan ini adalah merupakan pecahan dari kelurahan Duri Angke yang merupakan satu rukun kampung (R.K.).

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Batas-batas Kelurahan Tegal Alur adalah sebagai berikut:

sebelah timur	: Jalan Raya Kamal/Kelurahan Kamal
sebelah selatan	: Kelurahan Kalideres .
sebelah utara	: Kelurahan Cengkareng
sebelah barat	: Jalan Raya Kapuk, Kelurahan Kapuk

Luas wilayah Kelurahan Tegal Alur keseluruhan meliputi tanah milik maupun tanah negara lebih kurang 365 ha.

Sebelum Pelita kecerdasan masyarakat di Kelurahan ini relatif rendah, sehingga lingkungan alam kurang terpelihara dan penduduk sedikit sekali. Mata pencaharian sangat statis, dan kebanyakan merupakan pengangguran dan ekonomi lemah.

B. KEADAAN PENDIDIKAN

Keadaan pendidikan di kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta sebelum Pelita adalah merupakan suatu lanjutan dari keadaan dunia pendidikan di Indonesia dari masa-masa sebelum kemerdekaan. Dalam waktu lima tahun semenjak kemerdekaan diproklamirkan, maka kita tidak dapat mengharapkan perubahan yang lebih banyak dalam segi fasilitas. Kalau kita bandingkan dalam tema pendidikan dari masa penjajahan dan setelah kemerdekaan memang terdapat perbedaan yang jelas. Tetapi dari segi sarana atau fasilitas mungkin belum dapat dilakukan perubahan yang drastis. Keadaan ini mengingat keuangan negara kita sebagai sebuah negara yang baru saja melepaskan dirinya dari cengkraman kolonial Belanda, sehingga

masih harus menyembuhkan luka-luka akibat perjuangan physik menentang penjajahan.

Tetapi keadaan yang dapat kita capai itu sebenarnya sudah cukup menggembirakan bila kita perhatikan keadaan dunia pendidikan di Indonesia pada masa jauh sebelumnya yaitu pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan pada masa tahun-tahun pendudukan Jepang di Indonesia yaitu sekitar tahun 1942 pada masa pemerintahan Belanda, terdapat suatu sistem pengajaran yang dualistis yang hanya dihubungkan dengan mata rantai yang lemah. Pada waktu itu terdapat pengajaran yang berbahasa pengantar Bahasa Belanda dengan sarana yang lengkap, dan pengajaran yang berbahasa pengantar bahasa Bumiputra (Indonesia) dengan jumlah murid paling banyak tetapi tidak mempunyai sarana ataupun fasilitas yang cukup, sehingga hasilnya tentu saja amat menyedihkan. Pada masa itu amat sedikit kesempatan belajar yang diperoleh oleh masyarakat. Keadaan ini jauh berubah setelah masa-masa kemerdekaan, atau tepatnya semenjak 1950 – 1965.

Untuk lebih jelasnya akan kita kutip keadaan pendidikan pada masa sebelum Pelita itu di beberapa kelurahan di wilayah DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Pada masa sebelum Pelita (1950 – 1965) pendidikan di Kelurahan Jatirawamangun yang terdiri atas:

a. Pendidikan yang Dikelola Pemerintah

Di Kelurahan ini sebelum Pelita pendidikan yang dikelola pemerintah masih sedikit sekali. Hanya terdapat dua buah sekolah dasar negeri yang mempunyai daya tampung sekitar 240 untuk usia anak belajar di Sekolah Dasar. Jumlah tersebut jauh tidak mencukupi mengingat anak usia belajar di Kelurahan Jatirawamangun cukup besar. Hal ini banyak menimbulkan problema, yang mengakibatkan banyaknya anak terlambat masuk sekolah, buta huruf, kenakalan remaja dan sebagainya.

b. Pendidikan Swasta

Pendidikan yang dikelola oleh swasta juga masih amat sederhana atau boleh dikatakan amat sedikit ataupun dapat dikatakan tidak

ada. Kita tidak dapat mengatakan adanya pendidikan-pendidikan pengajian sebagai suatu pendidikan swasta yang telah teratur dan terkoordinasi dengan baik. Beberapa bentuk pendidikan yaitu berbentuk pengajian yang ada umumnya amat sederhana sekali, yaitu sebagai salah satu usaha penduduk setempat untuk mengisi kekosongan di kelurahan ini dalam keadaan yang amat bersahaja. Selain itu tidak terdapat bentuk-bentuk pendidikan swasta yang dapat diketengahkan sebagai salah satu usaha swasta dalam bidang pendidikan.

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

a. Pendidikan yang dikelola Pemerintah

Di Kelurahan ini baru ada satu buah Sekolah Dasar Negeri yang hanya mempunyai empat lokal. Perhatian masyarakat terhadap pendidikan formal belum besar. Kebanyakan mereka baru memperhatikan pada masalah-masalah mata pencaharian yang sebagian besar pertanian. Hal inilah yang mengakibatkan orang tua belum merasa perlu anaknya harus masuk sekolah.

b. Pendidikan Swasta

Pendidikan swasta, sudah menunjukkan jumlah lebih banyak. Karena pendidikan swasta di sini merupakan perkembangan dari pengajian-pengajian yang telah dirintis sejak lama, akan tetapi belum melembaga. Pada mulanya pengajian-pengajian tersebut sangat erat dengan adanya pendidikan non formal, di mana si anak disuruh belajar oleh orang tuanya mengaji pada orang yang dianggapnya telah cukup pandai membaca Al-Qur'an. Kemudian karena makin banyaknya anak-anak yang belajar mengaji tersebut, maka merasa perlu untuk meningkatkan tempat pengajian dengan mendirikan madrasah-madrasah yang perlengkapannya sangat sederhana. Sebelum Pelita di kelurahan ini telah ada 3 buah madrasah.²⁾

3. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

a. Pendidikan yang Dikelola Pemerintah

Sebelum Pelita di kelurahan ini baru ada satu buah Sekolah Da-

2) Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid (Lurah Penggilingan) tgl. 24 Oktober 1981, di Kantor Kelurahan.

sar Negeri yang fasilitasnya masih sangat sederhana. Minat orang tua menyekolahkan anaknya masuk sekolah belum begitu besar, karena masih terpengaruh dengan cara hidup lama yakni sebagian besar penduduk asli mempunyai mata pencaharian bercocok tanam. Setelah banyaknya orang-orang pendatang ke daerah ini, mulailah timbul minat menyekolahkan anaknya, sehingga perlu adanya penambahan gedung-gedung sekolah.

b. *Pendidikan yang Dikelola Pihak Swasta*

Untuk sekolah swasta, sama halnya di Kelurahan lainnya di wilayah Jakarta Timur, yakni adanya madrasah yang merupakan perkembangan dari pengajian-pengajian. Di Kelurahan Klender sebelum Pelita terdapat dua buah madrasah yang masih sangat sederhana. Di samping madrasah-madrasah tersebut belum mempunyai kurikulum yang tetap. Pengajarnya pun juga masih belum mempunyai pendidikan khusus kejuruan. Biasanya hanya orang-orang yang telah dianggap mempunyai pengalaman dan pandai membaca Al-Qur'an.

4. **Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan**

Suasana pendidikan yang dikelola Pemerintah belum ada, karena sebelum Pelita daerah di kelurahan ini masih merupakan rawa-rawa dan belum banyak penduduknya.

Sedangkan pendidikan swasta baru ada satu madrasah yang sebenarnya berfungsi semacam pengajian yang disatukan.

5. **Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan**

a. *Pendidikan yang dikelola Pemerintah*

Di Kelurahan ini baru ada satu Sekolah Dasar Negeri bernama SD Muria yang mempunyai enam lokal. Waktu itu cukup untuk menampung anak usia belajar di daerah tersebut. Akan tetapi mengingat banyaknya orang-orang pendatang, maka perlu adanya penambahan gedung sekolah yang baru. Di daerah ini cepat berkembang mengingat sarana angkutan yang telah cukup memadai.

b. *Pendidikan yang dikelola swasta*

Pendidikan swasta baru ada 3 (tiga) buah madrasah yang masih

sederhana. Madrasah-madrasah ini belum ada mempunyai bentuk-bentuk pendidikan yang seragam, karena hanya merupakan peningkatan pengajian-pengajian.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Sama dengan di kelurahan Gandaria Utara, bahwa sekolah yang dikelola Pemerintah belum ada. Karena faktor lingkungan dan keadaan alamnya masih persawahan dan belum ada sarana jalan, serta masih jarangnyanya penduduk yang bertempat tinggal di daerah ini. Adapun pendidikan swasta baru ada satu madrasah yang sudah agak teratur bernama "Tarbiatul Islamiah".

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

a. Pendidikan yang dikelola Pemerintah

Di Kelurahan ini sudah ada 3 (tiga) buah Sekolah Dasar Negeri. Bila dibandingkan dengan daerah lain di kelurahan ini lebih banyak sekolah pemerintah. Hal ini cukup wajar karena di daerah ini sejak jaman kolonial memang sudah dijadikan perkotaan, yang dengan sendirinya telah dihuni penduduk yang cukup padat.

b. Pendidikan swasta

Sebelum Pelita di kelurahan ini juga telah terdapat satu sekolah dasar dan dua buah madrasah. Hal ini pun dapat dimengerti, karena memang perhatian penduduk terhadap pendidikan formal telah cukup besar.

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

a. Pendidikan yang dikelola Pemerintah

Di kelurahan ini baru terdapat satu buah Sekolah Dasar Negeri, yang hanya mempunyai lima lokal. Sehingga praktis masih jauh tidak mencukupi penampungan anak usia belajar di daerah ini. Fasilitas yang ada juga tidak memenuhi persyaratan sekolah dan sebagian besar masih sangat sederhana.

b. *Pendidikan yang dikelola swasta*

Untuk sekolah swasta baru ada satu buah madrasah, yang hanya mempunyai empat lokal. Hal ini dapat dimengerti bahwa di daerah ini selain penduduknya telah banyak yang mengerti peranan sekolah formal, juga penduduk di daerah ini sangat memperhatikan pendidikan agama. Maka tidak mengherankan bahwa murid-murid madrasah di daerah ini, mempunyai kemampuan pendidikan yang lebih baik.

Apabila kita perhatikan keadaan pendidikan di kelurahan-kelurahan tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa hampir di tiap-tiap kelurahan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebelum Pelita masih menunjukkan pendidikan yang sangat sederhana dan sebagian besar pada pendidikan rendah, karena untuk tingkatan sekolah lanjutan baru terdapat di daerah-daerah perkotaan yang berstatus wilayah kecamatan yang jumlahnya sangat terbatas.

C. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Sebelum Pelita struktur pemerintahan kelurahan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum ada keseragaman. Karena masih dipengaruhi adat yang sangat kuat di daerah kelurahan masing-masing.

Untuk lebih jelasnya kita ambilkan contoh struktur pemerintahan di beberapa kelurahan, antara lain:

1. **Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur**

Di kelurahan ini struktur pemerintahan terdiri dari lurah dan beberapa orang stafnya dan dibantu oleh Rt dan Rk (Rukun Kampung).

2. **Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur**

Struktur pemerintahan di kelurahan ini terdiri dari lurah, juru tulis, dan mandor (Kepala Kampung).

3. **Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur**

Struktur pemerintahan di kelurahan ini sama dengan kebanyakan kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu lurah, juru-

tulis, kepala kampung, yang disebut juga dengan mandor dan kepala lingkungan.

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Struktur pemerintahan di kelurahan ini sebelum Pelita yaitu pada tahun 1950 terdiri atas lurah, juru tulis, dan mandor. Dari tahun 1954 s/d 1965 terdiri dari lurah, wakil lurah, juru tulis dan kepala lingkungan.

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Struktur pemerintahan di kelurahan Menteng atas belum ada, karena kelurahan ini merupakan kampung yang tergabung dalam kampung Melayu Besar. Tahun 1967 baru dipecah menjadi kelurahan Menteng Atas yang dipimpin oleh seorang mandor. Dan kemudian mandor ini diangkat menjadi lurah.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan.

Di kelurahan ini struktur pemerintahan terdiri atas:

- Lurah yang didampingi oleh mandor atau kepala lingkungan yang bertugas menarik pajak.
- Juru tulis
- Organisasi Keamanan Desa (O K D) yang waktu itu belum mempunyai struktur resmi.

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Struktur pemerintahan di kelurahan ini terdiri atas: lurah, wakil lurah, juru tulis dan kepala kampung.

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Struktur pemerintahan di kelurahan ini sama dengan struktur pemerintahan di kelurahan lain di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu: lurah, wakil lurah, rukun tetangga dan rukun kampung.

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Di kelurahan ini struktur pemerintahan terdiri dari: luraha, wakil lurah, juru tulis, dan mandor. Peranan kepala kampung sangat besar, karena merangkap bidang-bidang pemerintahan, kependudukan, keamanan dan sebagainya.

Struktur pemerintahan yang terlihat di beberapa kelurahan tersebut, jelas ada pengaruh adat di daerah-daerah masing-masing. Biasanya orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dipilih menjadi lurah atau kepala kampung. Dan juga jabatan ini tidak dibatasi dengan peraturan-peraturan tertentu, sehingga baru ada penggantian apabila pejabat kelurahan tersebut meninggal dunia.

Kekuasaan dan wewenang lurah maupun pejabat-pejabat lainnya, belum ada pembagian tugas secara jelas. Sehingga kadang-kadang menimbulkan salah pengertian. Hal ini juga disebabkan oleh minimnya sarana dan aparat pemerintahan kelurahan itu sendiri. Daerah-daerah yang letaknya jauh dari perkotaan, hampir-hampir belum terasa adanya pengaruh Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan satu dengan yang lainnya belum ada keseragaman, mengingat perkembangan kelurahan itu sendiri berbeda-beda, berdasarkan kondisi dan situasi kelurahan itupun berbeda-beda pula. Sebagai contoh pemungutan pajak yang berlaku di daerah kelurahan perkotaan, belum tentu cocok untuk pemungutan di daerah kelurahan pinggiran, demikian pula peraturan tata bangunan di daerah perkotaan, belum tentu cocok diterapkan pada suatu kelurahan di daerah pinggiran.³⁾

Karena belum adanya bentuk dan struktur Pemerintahan di masing-masing kelurahan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut, memungkinkan pengaturan kembali penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Di samping itu berkaitan dengan program Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam rangka pembangunan dan pembinaan masyarakat desa/kelurahan di DKI Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan swadaya masyarakat serta menjalin hubungan yang harmonis antara warga Daerah Khusus Jakarta. Dengan dijiwai sifat gotong-

3) "*Sejarah Pemerintahan Kota Jakarta*" diterbitkan oleh Kotapraja Jakarta Raya, 1958, hal. 190.

royong, maka dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur No. IB. 3/1/13/1968 yang menetapkan garis kebijaksanaan pembinaan wilayah dan pembangunan desa khusus. Ini dimaksud sekaligus merupakan dasar program kerja, agar masyarakat desa/kelurahan secara bertahap dapat mengatasi dan mengembangkan masalah-masalah kehidupan sosial, ekonomi dan budaya secara swadaya.

Sesuai dengan garis kebijaksanaan tersebut, maka untuk menunjang dan menumbuhkan gerakan-gerakan pembangunan desa di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diadakan berbagai kegiatan antara lain dalam bentuk Pemberantasan Buta Huruf, Perbaikan pemukiman, Pendidikan usaha kerja produktif, Unit Daerah Kerja Pembangunan, Pembentukan kader desa, Keluarga Berencana dan lain sebagainya.⁴⁾

D. CARA PEMILIHAN DAN PERANAN PEMIMPIN PEMERINTAHAN DESA

Pada masa sebelum Pelita pemimpin pemerintahan desa mempunyai peranan yang cukup besar. Pemimpin-pemimpin pemerintahan desa tidak dipilih secara formal, melainkan hanya diangkat berdasarkan kesepakatan bahwa para pemimpin tersebut mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Biasanya orang-orang yang kuat fisiknya dan disegani orang masyarakat. Bukan berdasarkan kemampuan ilmiah, akan tetapi berdasarkan lahiriah maupun rohaniah yang terlihat dalam bentuk fisik, keberanian dan menonjol dalam bidang adat maupun agama. Orang-orang tersebut biasanya dianggap sakti dan diharapkan dapat melindungi warga masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat kita ambilkan beberapa contoh pemimpin-pemimpin pemerintahan di beberapa kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai berikut:

1. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Cara pemilihan lurah di kelurahan ini tidak dipilih oleh masyarakat, melainkan diangkat. Biasanya orang yang diangkat itu adalah orang yang berpengaruh kepada masyarakat. Kemudian lurah yang diangkat

4) *Buku I, Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga*, Pemerintah DKI Jakarta, tahun 1979, hal. 134.

kat masyarakat ini diresmikan pengangkatannya oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berikut bersama perangkatnya.

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Cara pemilihan lurah di kelurahan ini juga belum dilaksanakan secara formal. Karena lurah secara langsung dipilih oleh masyarakat berdasarkan pengaruh dan kekuatan fisik dan orang yang mempunyai kewibawaan di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam keberaniannya menghadapi kerusuhan-kerusauan di desa, apabila terjadi pertengkaran antara warga atau penduduk asli. Juga dapat dilihat keberaniannya dalam menghadapi pihak penjajah, pada waktu terjadi perang kemerdekaan. Maka orang-orang yang demikian itulah yang kemudian diangkat oleh masyarakat sebagai pemimpinnya. Dahulu daerah ini termasuk daerah rawan, banyak perampok-perampok. Dalam keadaan yang kacau ini, biasanya tampak orang-orang yang kuat, sehingga dapat memadamkan kekacauan tersebut.

3. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur.

Di kelurahan ini pemilihan lurah dan perangkatnya dilakukan tahun 1952. Lurah yang dipilih ini berkuasa sampai semenjak diadakan perubahan peraturan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hingga tidak ada lagi pemilihan melainkan lurah beserta perangkatnya diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil.

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Pada tahun 1950 juran dipilih oleh rakyat secara formal. Pemilihan ini juga berdasar pengaruh seseorang terhadap masyarakat. Dimana dapat kita lihat dalam menggerakkan masyarakat untuk bergotongroyong. Hal ini berlangsung sampai tahun 1959 di mana lurah beserta perangkatnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Cara pemilihan lurah di kelurahan ini tidak dilakukan secara formal oleh masyarakat. Karena lurah langsung diangkat dari seorang jagoan

menjadi Mandor. Yang dimaksud jagoan biasanya adalah seorang yang berani, sehingga dengan keberaniannya itu dia sangat disegani oleh masyarakat.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Cara pemilihan lurah di kelurahan ini adalah dipilih oleh masyarakat secara langsung dengan suara terbanyak. Sebelum diadakan pemilihan terlebih dahulu beberapa orang calon, yang biasanya diambilkan dari orang yang berpengaruh dalam masyarakat baik dalam bidang adat maupun dalam bidang agama.

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Lurah dipilih oleh masyarakat tidak secara formal, akan tetapi berdasarkan keberaniannya dan kekuatannya serta disegani oleh masyarakat. Jabatan lurah ini tidak terbatas, biasanya sampai meninggal baru diadakan pemilihan lagi untuk penggantinya. Kemudian untuk jabatan-jabatan lainnya ditentukan oleh lurah itu sendiri yang biasanya orang-orang yang dekat dengan lurah.

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Cara memilih lurah di kelurahan ini adalah dipilih oleh rakyat secara tidak langsung. Seorang lurah diangkat atau dipilih berdasarkan pengaruh orang tersebut. Dipilihnya orang yang berani dan berwibawa ini oleh masyarakat dengan harapan dapat menjadi pelindung mereka sehingga ketentraman penduduk dapat terjamin.

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Cara pemilihan lurah di kelurahan ini juga belum dilaksanakan secara formal, karena lurah secara langsung oleh masyarakat berdasarkan pengaruh dan kekuatan fisik juga orang yang berwibawa. Hal ini dapat dilihat dalam desa apabila terjadi kerusuhan-kerusuhan atau pertengkaran antara warga, maka dapat kita lihat keberaniannya dalam menghadapi penjajahan Belanda pada waktu Perang Kemerdekaan. Orang yang demikian itulah yang kemudian diangkat oleh

masyarakat. Begitu pula jabatannya tidak terbatas, dan biasanya dapat turun temurun.

Sejak Zaman Kolonial orang-orang yang kuat ini sering dimanfaatkan untuk membantu Belanda dalam menghadapi kerusuhan-kerusuhan yang timbul. Sehingga tradisi Belanda yang demikian itu juga banyak dipakai oleh orang-orang atau penduduk asli untuk memilih pimpinan masyarakat. Tidak mustahil pula kepala-kepala perampok yang sudah sadar, dipilih oleh rakyat sebagai pemimpinnya. Sistem demokrasi yang biasa dipakai seperti lazimnya pemilihan wakil-wakil rakyat hampir-hampir belum dikenalnya. Sekalipun sudah dikenal akan tetapi belum dapat diterapkan pada setiap pemilihan pemimpin masyarakat di tiap-tiap kelurahan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena masih kuatnya tradisi pada waktu itu.

Peranan dan kedudukan pemimpin masyarakat atau pemerintahan desa sangat besar. Para pemimpin ini bekerja sebagai pemikir dan mempertimbangkan segala sesuatu yang menyangkut pengembangan masyarakat desa. Para pemimpin pemerintah desa ini, biasanya juga mengangkut penasehat-penasehatnya. Para penasehat ini bukan aparat pemerintah atau non pemerintah, tetapi mempunyai partisipasi aktif yang tergabung dalam Dewan Penasehat Lurah, kemudian badan ini, biasa disebut Badan Musyawarah Pengembangan Masyarakat. Peranan para penasehat ini sangat besar pula, karena ada yang duduk dalam bidang politik, bidang kepemudaan, bidang kesenian dan bidang keamanan.

Cara pemilihan Dewan Penasehat Lurah, juga dilaksanakan atas dasar penunjukan, terutama yang dekat hubungannya dengan para pemimpin pemerintahan desa. Cara pemilihan yang demikian juga masih erat hubungannya dengan adat yang kuat. Sekalipun Jakarta sejak dulu telah menjadi pusat perpaduan kebudayaan, baik kebudayaan asli, yang berpadu dengan kebudayaan dari darah lainya di wilayah Indonesia, maupun berpadu dengan kebudayaan dari negara asing, namun kebudayaan asli yang telah terikat dengan adat yang kuat tersebut tetap dapat bertahan, bahkan lebih diperkuat. Hal ini dapat kita lihat dalam cara pemilihan pemimpin masyarakat di pemerintahan desa. Cara pemilihan pemimpin pemerintahan desa semacam ini, baru dapat lenyap setelah adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, di mana desa/kelurahan dimasukkan ke dalam organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat.

Dalam hubungan itu, ada definisi resmi tentang desa dan kelurahan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1979, yang menerangkan sebagai berikut:

"Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

"Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.⁵⁾

Dari definisi tersebut di atas tentu akan timbul beberapa interpretasi tentang pengertian desa. Karena pada propinsi satu dengan yang lainnya ada perbedaan tentang pengertian desa tersebut. Pengertian desa di pulau Jawa tentu berbeda dengan pengertian desa di Pulau Sumatra. Bahkan kalau ditinjau dari segi pencahariannya terdapat dua jenis desa, yaitu desa pertanian dan desa nelayan. Tetapi pemerintah telah menetapkan desa yang dilihat dari segi pertumbuhannya, yakni ada tiga jenis desa, yaitu desa Swadaya, desa Swasembada, desa Swakarya.

Jenis desa-desa tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Desa Swadaya**, dengan ciri-ciri :
 - a. Keadaan masyarakatnya masih tradisional.
 - b. Usaha perekonomian masyarakatnya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer.
 - c. Kemampuan produksinya sangat lemah.
 - d. Tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah, yakni kurang dari 30 % penduduknya tamat Sekolah Dasar.
 - e. Administrasi pemerintahannya masih belum berkembang.
 - f. Prasarannya masih sangat terbatas.

2. **Desa Swakarya**, dengan ciri-ciri :

⁵⁾ Marsono, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, Ikhtisar Baru, Jakarta, 1980.* hal. 8.

- a. Sudah lebih maju dari pada desa Swadaya.
- b; Pengaruh luar dan teknologi mulai masu ke lingkungan desa.
- c. Hasil produksi masyarakat mulai meningkat.
- d. Penduduknya yang lulus Sekolah Dasar berkisar antara 30 % – 60 % dari jumlah penduduk seluruhnya.
- e. Administrasi pemerintahan desa sudah mulai berkembang.
- f. Komunikasi dengan daerah lain mulai meningkat.

3. Desa Swasembada, dengan ciri-ciri :

- a. Pengaruh pembaharuan sudah mulai nampak.
- b. Ikatan adat istiadat desa dusah mulai melonggar.
- c. Tehnologi baru dalam mengolah tanah pertanian sudah digunakan sehingga produksinya sudah lebih tinggi.
- d. Tingkat pendidikan masyarakatnya sudah lebih baik dan lebih dari 60 % dari seleuruh jumlah penduduknya tamatan Sekolah Dasar.
- e. Pemerintahan daln lembaga-lembaga desa lainnya berfungsi dengan baik.
- f. Prasarana desa sudah baik dan hubungan kota sudah makin lancar ⁶⁾.

Demikian pula, dalam kaitannya dengan pemerintahan desa sebagai pelaksana pembangunan, sangat menekankan adanya "defini-nisi kerja' untuk memperoleh pegangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk maksud itu kita berpegang pada apa yang dimaksudkan dengan pemerintahan desa, yaitu :

"..... yang dimaksud dengan pemerintahan desa dalam Undang-Undang ini adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat. ⁷⁾

Berdasarkan kutipan di atas, lbahwa untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebelum Pelita masih terdapat jenis-jenis desa baik swadaya, wakarya maupun swasembada. Daerah-daerah yang terletak jauh dari perkotaan jelas masih termasuk desa swadaya, sedangkan daerah-daerah terlak di perkotaan termasuk desa swasembada. Sedangkan desa swakarya hanyalah merupakan transisi dari desa

6) R. Suparmo, *Mengenal Desa Gerak dan Pengelolaannya*, Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 23–24.

7) Marsono, *op.cit*, hal. 29.

swadaya menuju ke arah desa swasembada. Dan desa swasembada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini secara menyeluruh baru tercapai pada tahun 1979,⁸⁾ sehingga pengertian desa untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat disamakan dengan kelurahan, di mana penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat. Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, para pemimpin masyarakat menduduki peranan yang penting. Maju dan berkembangnya desa tergantung kemampuan berpikir dan kegesitan para pemimpin tersebut. Sedangkan warga masyarakat desa hanyalah merupakan alat yang dapat digerakan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

E. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH

Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah sebelum Pelita besar sekali pengaruhnya, sehingga dalam hal tertentu tanpa bantuan mereka program pemerintah tidak dapat jalan. Mereka ini adalah tokoh-tokoh agama yang bergerak di bidang pendidikan tetapi tidak secara formal. Boleh dikatakan peranan mereka sangat dominan. Karena mereka ini dasarnya juga terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh di kelurahan tersebut. Di antaranya ada yang pernah menjadi pemimpin suatu gerombolan atau kelompok. Mereka ini biasa disebut "jojoan" atau "Jawara". Karena banyaknya gerombolan berarti banyak pula jojoan-jojoan di dalam suatu desa maupun kelurahan. Tentu saja tidak dapat semuanya diangkat sebagai lurah. Maka mereka ini menjadi dekat dengan lurah dan selalu diminta nasehat-nasehatnya. Di samping untuk memberi penghargaan kepada mereka, juga untuk menjaga jangan sampai orang-orang tersebut menimbulkan kerusuhan-kerusuhan di dalam masyarakat. Karena mereka ini juga disegani oleh warga masyarakat itu. Dan tidak mustahil, apabila perintah-perintah mereka ini juga akan dipatuhi penduduk. Sehingga apabila orang-orang ini tidak didekati oleh lurah, maka sudah pasti akan berbuat yang kurang baik di masyarakat.

Tetapi sebaiknya, apabila mereka ini mendapat perhatian secara baik dan diperlukan sebagai pemimpin masyarakat, mereka dapat

8) Wawancara dengan Bapak Drs. Singgih, *op.cit.*

dijadikan patner yang paling tepat untuk menjalankan roda pemerintahan di masyarakat desa atau kelurahan.

Mereka juga mendapat kepercayaan dari penduduk kelurahan atau desa tersebut. Dan tidak sedikit pula pengikut-pengikutnya; Karena itu dalam gerakan-gerakan tertentu, mereka mampu dan cepat menggerakkannya. Misalnya dalam gerakan kesenian, kerja bakti, politik, olah raga dan sebagainya, orang-orang inilah yang selalu tampil ke depan. Bahkan dalam gerakan untuk menghadapi musuh, mereka sanggup sebagai pemimpinnya.

Sebagai contoh kami ambilkan di daerah Kelurahan Jagakarsa sebeforel Pelita adalah sebagai berikut :

Di kelurahan ini belum ada organisasi yang terorganisasi dengan baik. Pemimpin-pemimpin masyarakat non pemerintah banyak yang bergerak sendiri-sendiri, jadi belum terorganisasi ke dalam LPMDK. Pada waktu itu sudah ada Rukun Tetangga, maupun Rukun Kampung. Akan tetapi para pemimpin non pemerintah ini mampu menggerakkan penduduk dalam berbagai kegiatan. Antara lain dalam gerakan pertanian, dapat mendirikan barisan tani Indonesia dan dalam bidang kesenian dapat menghasilkan berbagai cabang kesenian antara lain lenong, wayang kulit, qasidahan dan sebagainya. Akan tetapi gerakan yang bergerak dalam bidang politik banyak pula yang terjerumus ke dalam organisasi politik terlarang seperti Masyumi, dan PKI sehingga dalam peristiwa Gerakan Tiga Puluh September (G 30 S/PKI) banyak yang terlibat dan tidak sedikit pula yang gugur.

Di samping itu banyak pula para pemimpin non pemerintah yang akhirnya dapat diangkat sebagai wakil-wakil rakyat di daerah itu sendiri, dan berkedudukan sebagai Dewan Penasehat Lurah, yang sekarang disebut Badan Musyawarah Pembangunan Masyarakat.

Kami ambilkan lagi sebagai contoh di kelurahan Menteng atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.

Cara pemilihan atau peranan pemimpin masyarakat non pemerintah, mula-mula memilih orang-orang yang berpengaruh sekitar 5 (lima) orang dan bawahannya ditunjuk. Begitu pula dalam melaksanakan bangunan, kalau pemimpin-pemimpin tersebut memerintahkan untuk dilaksanakan, maka masyarakat harus melaksanakannya dan menyetujui perkataan pemimpin tersebut. Meskipun demikian,

para pemimpin tersebut telah memikirkan sebaik-baiknya dengan jalan musyawarah. Jadi sifat gotong royong dan demokrasi juga sudah mulai diterapkan. Dan di samping itu para pemimpin masyarakat tidak berbuat sewenang-wenang. Sehingga penduduk selalu patuh dan taat terhadap perintah-perintahnya, dan selalu percaya terhadap mereka, yang seolah-olah mereka itu juga penguasa. Pada hal hanya berstatus Penasehat Lurah, yang tidak terikat oleh undang-undang atau peraturan.

Untuk lebih jelasnya dapat kita ambil sebagai contoh pada tiga wilayah dalam sembilan kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu sebagai berikut :

1. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Pada waktu sebelum Pelita, pemimpin masyarakat non pemerintah di kelurahan ini banyak dipegang oleh orang-orang partai, sehingga lebih banyak berorientasi kepada partai, dengan sendirinya pembangunan berjalan lamban. Sedangkan saat sekarang ini sebagian besar dipegang oleh unsur-unsur warga yang berkedudukan sebagai pegawai dan ABRI yang lebih berorientasi kepada pembangunan baik fisik maupun mental spritual.

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Peranan dan kedudukan pemimpin masyarakat non pemerintah sangat menentukan sekali. Walaupun belum terorganisasi, tetapi mereka itu dapat menggerakkan masa rakyat untuk melaksanakan pembangunan yang digariskan oleh mereka. Sekaligus pemimpin masyarakat non pemerintah ini dapat menjaga keamanan dan kerukunan kampung.

3. Kelurahan Kelender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah sebelum Pelita di kelurahan ini sangat besar, sehingga dalam hal tertentu tanpa bantuan mereka program pemerintah tidak dapat jalan, dan boleh dikatakan peranan mereka sangat dominan.

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Peranan dan kedudukan pemimpin masyarakat non pemerintah di kelurahan ini berpartisipasi aktif, dan terdapat kegotong-royongan dengan pemerintah. Karena belum terorganisasi, maka pemimpin non pemerintah hanya sekali-kali dimintai bantuannya.

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Peranan dan kedudukan pemimpin masyarakat non pemerintah di kelurahan ini seperti telah kita kemukakan pada halaman 38 bab ini, dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya besar, merupakan partisipasi aktif yang tergabung dalam Dewan Penasehat Lurah.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Peranan dan kedudukan pemimpin masyarakat non pemerintah di kelurahan ini seperti telah diuraikan pada halaman 37 bab ini, dapat disimpulkan bahwa pemimpin-pemimpin masyarakat non pemerintah banyak yang bergerak sendiri-sendiri, belum ada organisasi yang mengorganisasikan.

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah di kelurahan ini sangat besar sekali, sehingga dalam waktu tertentu tanpa bantuan mereka program pemerintah tidak berjalan. Boleh dikatakan peranan mereka sangat dominan.

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Peranan dan kedudukan pemimpin masyarakat non pemerintah di kelurahan ini sangat diperlukan oleh pemerintah terutama untuk melaksanakan pembangunan, seperti untuk membuat jalan, memperbaiki saluran air dan sebagainya. Jadi peranannya merupakan patner kerja untuk melaksanakan program pemerintah.

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Peranan dan kedudukan pemimpin masyarakat non pemerintah di kelurahan ini sangat berpengaruh sekali. Mereka dapat mengadakan musyawarah dengan masyarakat misalnya pemerintah ingin melebarkan jalan di mana masyarakat yang berada di kiri-kanan dari jalan tersebut terkena pelebaran jalan, maka dimintakan kepada mereka untuk mengurus memusyawarahkan dengan masyarakat tersebut. Dengan demikian semuanya ini terlaksana dengan baik.

F. KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN NON-POLITIK

Sebelum Pelita pertumbuhan partai-partai politik di negara kita memang mendapat kesempatan secara luas. Sehingga pada waktu itu terdapat jumlah partai-partai politik yang cukup besar. Hal ini disebabkan adanya paham kebebasan atau yang terkenal dengan liberalisme yang pernah dianut oleh negara-negara Barat. Paham tersebut sudah sewajarnya ditiru oleh negara kita yang baru merdeka, mengingat negara kita yang pernah jatuh dalam cengkeraman penjajahan kurang lebih tiga setengah abad lamanya.

Akan tetapi ternyata pertumbuhan partai-partai politik yang secara bebas tersebut tidak cocok dengan alam dan kondisi negara Indonesia merdeka, sehingga dari tahap demi tahap pemerintah berusaha memperkecil jumlah partai-partai politik yang dapat kita lihat dalam kontestan partai politik dari Pemilu ke I, II, dan III.

Keadaan organisasi politik dan non politik sebelum Pelita memang mendapat kebebasan seluas-luasnya. Hal ini ternyata tidak menguntungkan bagi kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya di negara kita. Desa/Kelurahan yang merupakan unit organisasi pemerintahan terendah di negara kita, menjadi sasaran dan menanggung akibatnya secara langsung. Sehingga roda pemerintahan di unit pemerintahan terendah ini tidak dapat berjalan semestinya, melainkan banyak dijadikan sarang berdomisilinya organisasi politik, yang praktis hanya berusaha untuk memperjuangkan kepentingan partainya. Sehingga masyarakat menjadi kacau, kehilangan pegangan dan mudah kemasukan isu-isu politik. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan menurut program yang telah direncanakan dan desa dijadikan arena pertentangan politik oleh partai-partai.

Pertentangan politik menjurus ke arah pemberontakan, yang juga sebagian besar masyarakat pedesaan. Banyak masyarakat desa yang ikut menjadi korban dari pertentangan itu. "Rakyat desa yang sampai kini sebahagian yang terbesar masih hidup dalam kerukunan, sekarang dicoba untuk dipecah belah. Yang satu disuruh masuk anggota Masyumi, yang lain ditarik-tarik untuk masuk ke dalam partai PNI, Parindra, PRM, PIR, PKI dan lain-lain. Masyarakat desa akan dipecah belah dan diadu dombakan yang satu terhadap yang lain. Hilang lenyaplah semen kenangan desa, hancur leburlah kesatuan desa".⁹⁾

Desa yang sebenarnya merupakan landasan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional, setelah kemasyarakatan isu-isu politik akhirnya pecah menjadi arena pertentangan. Hal ini sangat dirasakan hampir di seluruh pedesaan di Indonesia. Tidak luput pula kelurahan-kelurahan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Partai-partai politik dalam waktu singkat dapat menguasai tempat-tempat penting yang sangat vital, hampir tidak ada satu kelurahan-pun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak termakan isu-isu politik tersebut. Peranan pemerintah non politik bergeser, sehingga praktis pemerintahan dikemudikan oleh organisasi-organisasi politik.

Sebagai contoh kita ambilkan kehidupan partai politik dan non politik di beberapa kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

1. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Partai-partai politik di kelurahan ini banyak yang berkembang di kalangan masyarakat. Untuk mencari pengaruh terhadap masyarakat partai politik itu banyak menguasai organisasi-organisasi non pemerintahan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga dan lain sebagainya. Dengan dikuasai semua sektor pemimpin masyarakat non pemerintahan, pemerintah non politik tidak terlihat kegiatannya. Pada Pemilu 1955, yang mana pada waktu itu kebanyakan masyarakat yang buta huruf, maka hal ini merupakan tempat yang empuk bagi partai-partai politik untuk berorientasi. Hasil Pemilu 1955 kekuatan partai

9) Sutardjo Kartohadikusumo, *Desa Sumur Bandung*, Bandung 1965, hal. 257.

politik di kelurahan ini berimbang. Dan pada Pemilu 1971 dan 1977 tidak kelihatan lagi pengaruh partai politik yang menonjol, karena pemimpin-pemimpin masyarakat non pemerintah sudah tidak dikuasai oleh partai politik lagi.

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Peranan organisasi-organisasi politik di kelurahan ini dikuasai oleh partai Islam, ini terlihat pada Pemilu 1955, di mana partai-partai Islam mendapat suara terbanyak. Ini terjadi karena animo masyarakat pada waktu itu lebih condong kepada agama, ini dapat terlihat pada segi pendidikan masyarakatnya, di mana madrasah yang dikelola swasta lebih tumbuh maju dari pada sekolah SD atau sekolah umum.

3. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Dengan adanya pendidikan masyarakat yang sudah maju itu, organisasi politik akan sulit untuk menanamkan ideologi partai. Dan masyarakat akan selalu berorientasi kepada cita-cita nasional, untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Dengan perkataan lain, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh ideologi suatu partai politik yang dinilainya sangat ekstrim, seperti Masyumi, PKI, dan sebagainya.

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Di kelurahan ini organisasi politik sekitar tahun 1950 sampai dengan tahun 1965 yang menonjol adalah Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama dan Partai Nasional Indonesia. Sedangkan partai-partai lainnya PSI, Murba (PKI, PSII dan lain-lain tidak begitu besar jumlahnya.

Hal ini dapat kita mengerti karena memang kehidupan partai-partai Islam ini, mempunyai kaitan dengan keyakinan agama mereka. Maka dengan sewajarnya pengikut-pengikut partai Islam ini selalu berjumlah besar.

Akan tetapi banyak orang-orang terjerumus ke arah ideologi partai dan lupa terhadap keyakinan agama. Maka setelah Masyumi terang-terangan menuju ke arah pembentukan Negara Islam dengan DI dan PRRI-nya, maka orang-orang baru sadar bahwa permainan politik

akan dapat menimbulkan perpecahan antar bangsa dan berarti pula hancurnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pemerintah cepat melarang dan membubarkan partai Masyumi dan ormas-ormasnya yang bernaung di bawahnya.

Untuk masyarakat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memang mayoritas penduduk asli menganut agama Islam, maka pada waktu Pemilu tahun 1955, merupakan saingan berat bagi Partai Nasional Indonesia yang ada masa itu juga mempunyai pengikut yang cukup besar.

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Kelurahan ini pada mulanya menjadi satu dengan kampung Melayu Besar, Kecamatan Jatinegara. Penduduk kebanyakan terdiri dari penduduk asli. Karena penertiban dan pengaturan wilayah terus menerus diadakan perbaikan, maka kelurahan Menteng Atas dipecah dan dimasukkan ke kecamatan Setia Budi. Keadaan organisasi politik di kelurahan ini pada tahun 1950 – 1965, lebih didominasi oleh partai politik PKI, dan sebagian basisnya adalah yang sekarang dijadikan mesjid A. Rahman yang telah diresmikan oleh Wakil Presiden. Meskipun demikian peranan partai lainnya seperti Nahdlatul Ulama, Masyumi PNI, merupakan partai yang seimbang dalam Pemilu 1955.

Adapun ormas-ormas yang bernaung di bawah partai-partai tersebut, selalu ikut pula memperjuangkan program partainya. Sehingga pada masa itu di kelurahan inipun seolah-olah berlaku pula pemerintahan partai politik.

Penafsiran yang seenaknya oleh Partai Komunis Indonesia dalam menanggapi salah satu fasal Landreform yang berbunyi :

”Landreform sebagai bahagian mutlak daripada Revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan. Kebijakan pembangunan digariskan untuk mengembangkan usaha-usaha khusus untuk meningkatkan tingkat hidup kaum buruh, tani, nelayan dan kaum pekerja pada umumnya dengan menghapuskan beban-beban sebagai peninggalan dari hubungan kerja kolonial dan feodal serta memberantas pengangguran.

10) Ringkasan Ketetapan MPRS-RI No. I dan II/MPRS/1960, MPRS dan Departemen Penerangan, hal. 55.

Dalam menafsirkan fasal ini Partai Komunis Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya untuk kepentingan pengikut-pengikutnya yang memang sebagian besar terdiri dari kaum buruh dan tani. Sehingga usahanya untuk memberantas penghisapan, yang menjadi sasaran adalah golongan tuan-tuan tanah dan pedagang-pedagang besar terutama dari orang-orang Islam. Banyak tanah-tanah milik penduduk asli sepertinya di kelurahan Jagakarsa, Penggilingan, Tegal Parang, Tegal Alur, Gandaria Utara, Menteng Atas, Jembatan Lima, Klender, Jatirawamangun, Lubang Buaya, dan sebgainya dirampas oleh orang-orang pengikut PKI. Dan apabila terjadi perselisihan, maka orang-orang pengikut PKI ini selalu mendapat bantuan dari pihak-pihak yang berwajib dan seolah-olah dalam posisi yang benar.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Di kelurahan ini peranan organisasi politik pada Pemilu 1955 sangat besar dan didominir oleh Partai Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Setelah Masyumi dibubarkan mereka masuk ke Nahdlatul Ulama, sehingga partai Nahdlatul Ulama menjadi partai terbesar di kelurahan ini. Di samping itu ada juga partai PNI dan muncul Partai Islam Perti. Adapun organisasi masa yang timbul adalah ormas pemuda dan kepanduan yang seolah-olah ada hubungan dengan partai induknya. Ormas-ormas tersebut antara lain: Pemuda Ansor, Pemuda Islam Indonesia, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Gerakan Pemuda Marhaen, Kepanduan Ansor, Kepanduan Hibuwathan, Kepanduan Bangsa Indonesia dan lain-lain.

Dari kehidupan partai dan oramas yang ada di daerah kelurahan ini, ternyata dalam pertentangan ideologi politik, untuk daerah ini dimenangkan oleh kelompok Islam. Hal ini dapat kita lihat dari sedikitnya anggota Partai Komunis Indonesia di daerah ini. Oleh karena itu yang memegang dan menjalankan pemerintahan di kelurahan ini, juga orang-orang yang beraliran partai politik Islam tersebut, yang hanya untuk memperjuangkan program partai. Jadi bukan untuk kepentingan warga masyarakat pada umumnya.

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Keadaan partai dan organisasi politik di kelurahan ini sangat aktif se-

kali. Seperti Nahdlatul Ulama, Masyumi, Partai Islam Perti, Partai Komunis Indonesia, dan lain-lainnya. Semua partai dan organisasi politik ini saling bertentangan satu sama lainnya sangat tajam.

8; Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Keadaan Partai dan Organisasi politik di kelurahan ini tidak begitu menonjol, hal ini disebabkan karena keadaan alam yang tidak menguntungkan bagi tumbuhnya organisasi politik karena tanahnya rawa dan penduduknya sedikit. Begitu juga kalau kita tinjau dari segi perekonomian dan pendidikan penduduk, kelihatan sekali, bahwa penduduk kebanyakan menjadi buruh kasar (kuli musiman) maka faktor ini akan menentukan pula bagi perkembangan dari partai dan organisasi politik.

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Di kelurahan ini organisasi politik tidak begitu menonjol. Memang kelihatan tumbuh partai Nahdlatul Ulama dan Partai Nasional Indonesia, tapi tidak begitu besar dan tidak kelihatan kegiatan yang menonjol.

Demikianlah gambaran kehidupan organisasi politik dan non politik yang terdapat dalam masyarakat pedesaan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebelum Pelita.

G. KEADAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN

Penghidupan masyarakat pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebelum Pelita sangat statis. Penduduk asli sebagian besar hidup dari pertanian menanam buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagian kecil menanam padi dan peternakan ikan.

Hasil pertanian mereka yang berupa buah-buahan, dan sayur-sayuran banyak dijual di perkotaan dan sebagian besar dibawa sendiri oleh petani tersebut. Hasil penjualan ini hanya sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Tanah persawahan dan perkebunan sebelum tahun 1965 masih cukup luas, sehingga masih memungkinkan untuk hidup pertanian. Tanah rawa juga masih memungkinkan untuk bertani ikan, selain

ada juga yang hidupnya sebagai nelayan. Daerah-daerah semacam ini masih terkait dengan nama-nama daerah seperti Kebon Nanas, Kebon Jeruk, Kebon sayur, Kebon Kacang, Kebon Singkong, Pondok Labu dan sebagainya.

Kemudian yang berkaitan dengan daerah persawahan dan rawa-rawa seperti nama daerah Sawah Besar, Eawa Panjang, Rawa Badak, Rawa Bebek, Rawa Bangke, Rawa Sari, Rawamangun, Kampung Sawah dan sebagainya.

Nama-nama tersebut di atas sudah pasti mengingatkan kita terhadap kegiatan dan kehidupan di daerah tersebut yang hasilnya berupa hasil pertanian seperti tercantum pada nama daerah pedesaan tersebut.

Cara hidup pertanian semacam ini, telah berjalan sangat lama, bahkan sejak jaman kolonial, hidup semacam ini ikut mendorong berusaha untuk menghidup-hidupkan dan meningkatkan arana pertanian, namun keuntungannya yang terbesar ada di pihak Belanda. Karena Belanda hanya memajukan daerah pertanian yang ada kaitannya dengan usaha perdagangan dan yang laku dijual di pasaran internasional.

Kemudian sekitar tahun 1950 – 1965, kehidupan masyarakat yang sangat statis itu mulai berubah, karena telah banyaknya penduduk pendatang dari luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan hidup sebagai pedagang kecil-kecilan, serta menjadi buruh maupun menjadi Pegawai Negeri.

Saat itu mulai terasa adanya persaingan dalam masyarakat pedesaan dalam bidang perekonomian. Orang-orang pendatang lebih gigih dalam memainkan peranannya sebagai pedagang dan buruh, sehingga mampu membeli tanah untuk tempat tinggal, dan yang menjadi sasaran adalah tanah-tanah milik penduduk asli. Mulai terdesaklah daerah-daerah pertanian, untuk dijadikan daerah pemukiman dan tidak mustahil pula timbulnya industri-industri kecil di daerah pertanian tersebut. Sebagai contoh yakni: Daerah Pasar Minggu, Daerah Kelender, Daerah Kramatjati, Daerah Pasar Rebo, Daerah Kampung Melayu, dan sebagainya.

Daerah-daerah tersebut dulunya sangat potensial untuk daerah pertanian. Akan tetapi daerah-daerah tersebut dalam waktu yang relatif singkat telah berubah sebagian besar menjadi daerah perindustrian, yang dengan sendirinya merubah pula cara hidup penduduk

setempat dari pertanian menjadi perindustrian atau pun buruh pabrik. Terlebih-lebih setelah makin meningkatnya sarana angkutan, maka hampir-hampir di daerah pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak terasa lagi, dan secara berangsur-angsur daerah-daerah pertanian akan habis dan berganti menjadi tempat pemukiman da perindustrian.

Sebagai contoh kita ambilkan beberapa kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara lain:

1. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Keadaan perekonomian di daerah ini sebelum Pelita sangat statis, pendapatan penduduk perkapita sangat rendah sekali. Sehingga sering pemerintah mengadakan droping sandang dan pangan. Untuk mendapatkan droping ini masyarakat harus antri. Di samping masyarakat miskin ini, banyak pula kita temui masyarakat kaya atau masyarakat yang cukup berada memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan bunga yang tinggi, ada pula dengan sistim ijon terutama kepada para petani dan pedagang. Dengan adanya sistim ijon dan kredit ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga kehidupan yang statis ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Keadaan perekonomian masyarakat pedesaan di kelurahan ini sebelum Pelita, sebagian besar pertanian dengan menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian mereka dijual ke daerah perkotaan yang hasil jualannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kelurahan ini termasuk yang paling lambat adanya sarana angkutan, sehingga memungkinkan kehidupan pertanian dapat bertahan lama. Kemudian di samping penghidupan dari pertanian, ada pula hidup dari hasil buruh kecil yang merantai ke daerah-daerah lain, misalnya ke daerah-daerah Tanjung Priok. Hal ini disebabkan tidak cukupnya tanah-tanah pertanian dan di samping itu banyak pula penduduk asli yang sifatnya gemar merantau dengan cara menjadi buruh pelabuhan.

Kelurahan ini termasuk daerah pinggiran dari wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang agak sulit dijangkau oleh sarana angkutan.

Sampai pada masa Orde Baru inipun di daerah ini, termasuk masih ketinggalan karena pada mulanya ada berita-berita bahwa untuk daerah kelurahan ini akan dimasukkan dalam kawasan industri Pulo Gadung, sehingga tidak perlu adanya proyek-proyek lain dibangun di daerah ini, sebelum adanya planologi dari kawasan Industri Pulo Gadung tersebut. Akibatnya keadaan perekonomian di daerah ini juga lamban berkembang dan mengakibatkan pula hidup statis berlangsung lama. ¹¹⁾.

3. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatirawamangun, Wilayah Jakarta Timur

Keadaan perekonomian masyarakat pedesaan di kelurahan ini sebelum Pelita sebagian besar petani; yaitu menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Hasil dari pertanian mereka, dijual sendiri ke daerah perkotaan. Karena pada tahun 1950 – 1965 belum adanya sarana angkutan, maka membawa hasil buah-buahan dan sayur-sayuran ini kebanyakan dipikul, dan sedikit sekali yang memakai sepeda. Dengan tidak adanya sarana angkutan ini, penghidupan masyarakat sebagai petani berlangsung cukup lama.

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Keadaan perekonomian masyarakat di kelurahan ini tahun 1950 – 1965 mayoritas tani dan dagang. Mata pencaharian pertanian yang dimaksudkan di sini bukanlah suatu pertanian yang mengelola tanah pertanian yang luas, tetapi hanya memanfaatkan tanah pekarangan dengan menanam sayur-sayuran dan kembang. Begitu pula dagang yang dimaksud adalah petani itu sendiri yang membawa hasil tanamannya ke daerah perkotaan. Usaha perekonomian semacam ini dapat disebut dengan istilah Tani-Dagang. Melihat mata pencaharian penduduk yang seperti ini, kadang-kadang untuk hidup sehari-hari saja sudah susah. Dengan datangnya pendatang baru di kelurahan ini, merubah kehidupan masyarakat setempat. Dulu banyak tanah pertanian lambat laun berubah menjadi tempat pemukiman, maka dengan sendirinya masyarakat yang berdagang dapat membuka warung di rumah tempat tinggal mereka.

11) Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, op. cit.

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Keadaan perekonomian masyarakat di kelurahan ini pada tahun 1950 – 1965 sangat menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, jual kembang dan memanfaatkan tanah pekarangannya dengan baik untuk pertanian. Akan tetapi setelah adanya peningkatan sarana angkutan, kelurahan ini cepat berubah menjadi daerah perkotaan dan penduduknya sebagian besar hidup dengan cara berdagang dan menjadi pegawai dan buruh. Sifat hidup pertanian hampir tidak terlihat lagi, karena sebagian besar telah dihuni oleh orang-orang pendatang.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Pada mulanya sebagian besar penduduk kelurahan ini hidup dari pertanian, dengan menanam buah-buahan, belimbing, duku, pisang, rambutan dan lain-lainnya. Di samping itu juga bertani ikan dan peternakan. Di daerah kelurahan ini sebelum Pelita belum banyak sarana angkutan yang ada ataupun dibuat. Maka usaha pertanian semacam itu dapat bertahan agak lama. Hal ini sama dengan di daerah Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Daerah Condet ini terkenal dengan hasil buah-buahan salak, duku dan lain-lain. Sarana angkutan yang masuk ke daerah ini belum ada sampai akhir tahun 1965, sehingga kehidupan penduduk pedesaan di daerah ini bertahan agak lama.

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Keadaan perekonomian di kelurahan ini sebelum Pelita masih berada di bawah garis kemiskinan. Daerah pertanian hanya terdapat sebagian kecil saja. Karena sebagian dari luas wilayah kelurahan ini, merupakan rawa dan tanah kuburan. Di samping itu belum adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, lagi pula belum atau tidak ada sumber-sumber ekonomi.

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Keadaan perekonomian di daerah ini pada tahun 1950 – 1965, mayoritas sebagai buruh kasar, kebanyakan berasal dari Banten, karena

daerah ini termasuk daerah perkotaan pada waktu zaman Belanda, sehingga penduduk aslinya telah terdesak oleh orang-orang pendatang. Di samping bekerja sebagai buruh kasar yang bersifat musiman juga sebagian kecil bekerja sebagai pedagang.

Untuk daerah kelurahan ini tidak terlibat lagi sifat hidup pertanian yang menjadi ciri khas penduduk asli.^{1 2)}

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Keadaan perekonomian di kelurahan ini sebelum Pelita sangat rendah sekali. Dengan minimnya lapangan pekerjaan, mengakibatkan banyak pengangguran. Tenaga pengangguran ini merupakan rongrongan bagi jalannya roda perekonomian serta pembangunan di daerah kelurahan ini.

Bagi masyarakat pedesaan yang hidupnya sangat tergantung dengan faktor lingkungan alam, sebenarnya di daerah pedesaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak terlalu banyak. Hanya sebagian kecil terdapat di daerah-daerah pinggiran yang sulit ditembus oleh sarana angkutan dan mass media yang ada pada masa itu. Di samping itu adanya perbedaan yang sangat menyolok adalah tentang pendidikan formal yang dimiliki penduduk asli dengan penduduk pendatang, juga mengakibatkan pengaruh besar dalam sosial ekonomi, di mana sifat penduduk asli yang hidupnya bertani, mudah terdesak dengan penduduk pendatang yang hidupnya sebagian besar pedagang dan menjadi pegawai negeri atau buruh pabrik.

Pada waktu sebelum Pelita, di mana pemerintah menjalankan politik berdikari, petani-petani dan buruh ikut menanggung risiko yang cukup besar. Hasil petani yang hanya cukup untuk mencukupi kebutuhannya sendiri juga terganggu. Begitu pula penduduk pendatang yang biasa mendapatkan hasil dari jatah makanan, maupun hasil dagangan, terpaksa menyedot pula hasil pertanian dari penduduk asli. Maka hal ini menjadi beban yang berat bagi penduduk pedesaan di berbagai kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12) – Wawancara dengan Drs. Zainuddin, Ka. Urusan I/Pemerintahan Kantor Walikota Jakarta Barat, 25 Juli 1981.

– Wawancara dengan Usin Nakyen, Ka. Sie. Usaha Gotong Royong LKMDK pada Urusan VII/Pembangunan Desa, Kantor Walikota Jakarta Barat, 26 Juli 1981.

Untuk mencukupi kebutuhan bahan pokok, terpaksa diadakan pengedropan bahan-bahan pokok oleh pemerintah seperti beras, minyak, gula dan kadang-kadang sebagai pengganti beras diganti dengan bulgur, jagung dan sebagainya. Untuk mendapatkan bahan mentah ini diadakan sistem antrian yang diadakan oleh Rukun Tetangga ataupun Rukun Kampung. Warga masyarakat di kelurahan yang tergolong dalam penduduk asli maupun pendatang terpaksa ikut sistem antrian tersebut untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok.

Makin lama makin berat beban masyarakat pedesaan, sehingga dengan sangat mudah kena hasutan partai-partai politik dengan kedok untuk memperoleh kesejahteraan yang adil dan makmur bagi rakyat, dengan semboyan hidup sama rasa-sama rata. Dengan berkedok dan semboyan tersebut, maka Partai Komunis Indonesia mudah mendapatkan dukungan massa, sehingga dapat berbuat dengan seenak-enaknya untuk mendapatkan kepentingan partainya.

Perekonomian masyarakat desa yang sebenarnya merupakan tulang punggung pembangunan nasional, tidak jatuh ke tangan petani, akan tetapi jatuh kepada partai-partai politik dana digunakan untuk menunjang dan membiayai kegiatan partai-partai. Hal-hal yang demikian dapat dilihat pada hampir setiap kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sepertinya di daerah kelurahan Mangga Dua, Pademangan, Penjaringan, Rawasari dan lain sebagainya.

H. KEADAAN SOSIAL BUDAYA

Bagi penduduk asli di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sejak jaman dulu telah memiliki kebudayaan khas tersendiri. Kebudayaan tersebut telah turun temurun mengalami perkembangan-perkembangan yang menuju kesempurnaannya.

Sekalipun Jakarta merupakan tempat perpaduan dari berbagai kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang pendatang, namun ciri khas kebudayaan asli Betawi tidak musnah, bahkan lebih lengkap dan sempurna. Sebagai contoh misalnya: Lenong, Wayang Kulit Betawi, Topeng, Tanji, Ondel-ondel, sampai sekarang masih terpelihara baik. Kesenian semacam itu masih banyak digemari oleh masyarakat pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada upacara-upacara resmi yang diadakan oleh pemerintah maupun perorangan, kesenian semacam itu masih sering diperlihatkan sebagai hiburan.

Pada sekitar tahun 1950 – 1965, waktu orang-orang komunis

dapat memainkan peranannya dalam segala bidang, termasuk pula dalam bidang kebudayaan, hampir seluruh kesenian di Jakarta dimiliki sepenuhnya oleh orang-orang komunis tersebut. Meskipun demikian, ternyata kebudayaan asli Betawi dapat bertahan, bahkan juga digunakan oleh orang-orang komunis untuk menarik massa dan menjadi alat hiburan yang segar.

Sesuai dengan keyakinan yang sebagian besar dianut oleh penduduk asli adalah Islam, maka kebudayaan Betawi dapat saling mengisi dan bersifat menyempurnakan dengan kebudayaan yang datang dari Arab, seperti: Robana, Qasidahan dan Gambus. Maka pada tahun 1950 – 1965, bahkan timbul kebudayaan Arab tersebut dengan sangat pesat, tetapi lebih menunjukkan corak dan gaya Betawi. Sebagai contoh ialah:

Robana Ketimpring di daerah kelurahan Mampang Tegal Parang dan Kelurahan Menteng Atas.

Qasidahan, Gambus yang terdapat di kelurahan Gandaria Utara, Penggilingan, Jatirawamangun, Jelambar, Bukit Duri dan sebagainya. Upacara-upacara Mauludan dan pengantenan masih terasa adanya perpaduan kebudayaan asli dengan kebudayaan Arab atau Hindu.

Ternyata modal yang kuat dalam mempertahankan kebudayaan asli Betawi, terletak pada keyakinan yang dianut oleh penduduk pedesaan yang mendiami daerah-daerah sebagian besar di daerah pedalaman, bukan di perkotaan. Keyakinan tersebut antara lain adalah agama Islam, maka untuk kebudayaan Betawi selalu berpegang pada norma-norma agama.

Pada waktu orde lama, di mana kaum komunis berusaha keras mempengaruhi penduduk asli, salah satu cara adalah melalui kesenian Betawi yang menjadi kegemarannya. Oleh karena itu banyak pula penduduk asli yang mendiami pedesaan atau kelurahan-kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, banyak terpengaruh komunis tersebut, akan tetapi mengingat sangat bertolak belakang dengan keyakinan yang mereka anut, maka tidak lama kemudian warga masyarakat pedesaan/kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta cepat-cepat melepaskan diri dari hasutan Komunis.

Hal tersebut di atas dapat kita lihat dalam penumpasan G 30 S/ PKI di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Gambaran secara singkat tentang keadaan sosial budaya di be-

berapa kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Keadaan sosial budaya di kelurahan ini sebelum Pelita terutama mengenai adat istiadat kebiasaan yang berlaku masih berpengaruh dengan kebudayaan asli Betawi. Kesenian-kesenian yang ada pada waktu itu masih dapat dikatakan asli seperti: Lenong, Topeng, Japong, Ondel-ondel dan Pencak Silat. Sedangkan pengaruh dari kebudayaan luar terlihat pada kesenian Samrah dan Qasidahan. Dengan kurangnya pembinaan terhadap kesenian tersebut sekarang ini sudah mulai langka di kalangan masyarakat.

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Sosial budaya di kelurahan ini sebelum Pelita belum terlihat pengaruh dari luar. Kesenian masyarakat antara lain Topeng, Lenong, Tanji, Wayang Kulit Betawi (bahasa Jakarta), serta sedekah bumi yang diadakan sekali dalam setahun yaitu tiap bulan Maulud. Upacara ini berupa nasi tumpeng dan ondel-ondel yang diarak keliling kampung yang berakhir di Kantor Kelurahan.

3. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Sosial budaya di kelurahan ini pada tahun 1966 – 1972 masih tradisional, seperti mauludan dan lain sebagainya. Akulturasi kebudayaan lain hanya terlihat pada kesenian Qasidah.

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Sosial budaya masyarakat di kelurahan ini pada tahun 1950 – 1965 belum terorganisasikan. Ada satu golongan ulama yang tidak mau menerima pengaruh luar selain kebudayaan dari Arab seperti Qasidahan dan Gambus. Sedangkan masyarakat lain yang telah berpandangan modern menerima kehadiran kesenian lain seperti Lenong, Topeng, Tanjidor, Wayang Kulit, Wayang Golek dan lain sebagainya.

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Keadaan sosial budaya di kelurahan ini tahun 1950 s/d 1965 tidak banyak kelihatan atau tumbuh di kalangan masyarakat. Hanya pada waktu itu terdapat sebuah kesenian saja yaitu Robana Ketimpring.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Sosial budaya di kelurahan ini sebelum Pelita terutama tentang adat istiadat masih merupakan adat istiadat Betawi dan belum terdapat pengaruh dari luar. Kesenian yang banyak digemari masyarakat misalnya Lenong, Wayang Kulit, serta Qasidahan yang merupakan pengaruh dari Arab, karena sesuai dengan agama yang dianut masyarakat.

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Keadaan sosial budaya masyarakat di kelurahan ini sebelum Pelita di mana kebudayaan asli masih ada dan terpelihara. Adat istiadat asli ini terpelihara secara turun temurun. Di kelurahan ini tidak terlihat adanya pengaruh dari luar baik kesenian, maupun adat istiadat.

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Sosial budaya masyarakat di kelurahan ini sebelum Pelita adalah kebudayaan Sunda dari Daerah Banten. Kesenian yang ada hanyalah robana tradisional dari Banten. Sedangkan kebudayaan ataupun kesenian Betawi tidak terlihat kegiatannya bahkan sama sekali tidak ada di kalangan masyarakat.

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Keadaan sosial budaya di kelurahan ini sebelum Pelita terutama bidang kesenian yang ada hanyalah merupakan kesenian pengaruh dari luar yaitu Qasidahan, Gambus dan Orkes. Sedangkan kegiatan kesenian Betawi tidak ada terlihat kegiatannya.

I. KEADAAN KAMTIBMAS

Sebelum Pelita keadaan keamanan dan ketertiban daerah pede-

saan Daerah Khusus Ibukota Jakarta banyak dipengaruhi oleh kegiatan organisasi politik dan organisasi massa. Kegiatan partai lebih menonjol dan banyak orang-orang partai mendapat dukungan penting di kalangan pemerintahan. Banyak program-program partai disebarluaskan melalui pemerintahan desa, sehingga mempengaruhi jalannya pemerintahan desa. Semboyan-semboyan politik seperti setan desa, tuan tanah jahat, antek nekolim dan sebagainya digunakan oleh orpol dan ormas untuk menarik massa. Akibatnya masyarakat desa digolong-golongkan dan terjadi perpecahan berdasarkan ideologi partai.

Organisasi kepemudaan, pelajar, mahasiswa, buruh dan tani, selalu berorientasi kepada partai induknya. Sehingga praktis tidak ada usaha untuk pembangunan. Antara organisasi satu dengan organisasi lainnya sering terjadi pertengkaran, yang menjurus ke arah permusuhan yang berbahaya.

Kelompok-kelompok pemuda sering menimbulkan perkelahian antara kelompok yang sulit diatasi. Banyaknya anak-anak putus sekolah, pengangguran dan rendahnya sosial ekonomi, mengakibatkan timbulnya kejahatan yang bersifat kriminalitas. Dengan demikian sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat pedesaan. Peranan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, sangat besar untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban daerah pedesaan, di samping adanya pertahanan Sipil dan pertahanan rakyat ikut pula membantu menjaga keamanan dan ketertiban daerah pedesaan tersebut.

Sebagai gambaran keadaan daerah pedesaan dalam bidang keamanan dan ketertiban di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka dapat kita ambilkan beberapa daerah pedesaan sebagai berikut:

1. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Sebelum Pelita daerah ini masih sangat sepi, dan belum menunjukkan daerah perkotaan. Banyak rawa-rawa, empang-empang dan daerah persawahan. Di daerah inilah sering diketemukan pembunuhan-pembunuhan yang bermotif kejahatan kriminalitas. Hampir setiap hari di daerah ini terjadi peristiwa pembunuhan tersebut. Sehingga situasi daerah pedesaan di kelurahan ini sangat mencemaskan masyarakat. Jarang ada orang-orang berjalan setelah lepas magrib, karena operasi penjahat biasanya setelah lepas magrib. Pencurian, perampokan sering terjadi di daerah ini.

Pada waktu sebelum Pelita, penduduk di daerah ini belum begitu padat dan di daerah ini belum banyak gedung-gedung permanent belum banyak sekolah-sekolah dan masih gelap. Jalan kendaraan dan jalan lingkungan belum teratur dan masih becek, sehingga mempersulit untuk komunikasi dengan daerah lain. Keamanan dan ketertiban tidak terjamin, sehingga memungkinkan dijadikan tempat untuk sarang penjahat.

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Daerah kelurahan ini sebelum Pelita masih sepi, dan belum menunjukkan daerah perkotaan. Di kelurahan ini keadaan keamanan dan ketertiban sebelum Pelita belum banyak ditangani oleh pemerintah. Mengenai kejahatan kriminalitas di daerah ini tidak terlihat menonjol.

Karena daerah kelurahan ini diprogramkan termasuk kawasan industri, maka kegiatan pembangunan berjalan lambat. Begitu juga mengenai peranan pemilihan lurah masih berdasarkan orang-orang yang dianggap berpengaruh dan berwibawa. Dengan demikian masalah keamanan dan ketertiban dapat ditangani oleh pemerintah desa.

3. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Daerah kelurahan ini sebelum Pelita masih merupakan daerah pertanian. Belum banyak gedung permanen, dan juga belum ada penerangan listrik. Jalan-jalan masih sempit dan becek. Di tepi jalan kereta api banyak berdiri rumah-rumah darurat yang ditempati oleh orang-orang gelandangan. Dengan demikian keadaan sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat sangat rendah. Sering terjadi gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh warga sendiri. Warga sukar ditertibkan, karena banyaknya warga yang tidak memiliki Kartu Penduduk. Sering terjadi pertengkaran antar warga yang disebabkan dari berbagai masalah antara lain masalah ekonomi, politik, maupun tanah. Dalam masalah tanah inilah orang-orang partai sering ikut campur tangan dengan kedok untuk membasmi tuan tanah dan menumpas tujuh setan desa.

4. Di kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Keadaan keamanan dan ketertiban sebelum Pelita di Kelurahan Gandaria Utara, tidak banyak terjadi peristiwa kejahatan yang menjurus ke arah kriminalitas. Tidak terdapat orang-orang yang masuk anggota Partai Komunis Indonesia. Masyarakat di daerah ini kebanyakan masuk organisasi politik yang berlandaskan Islam, di samping ada sebagian kecil yang masuk PNI, IPKI, MURBA, PSI, PSII dan lain-lain. Pada waktu Pemilu tahun 1971 terdapat 9 partai politik dan 1 Golongan Karya. Kemudian pada Pemilu 1977 terdiri dari 3 konstestan yakni PPP, PDI dan Golkar.

Jadi melihat perkembangan partai di daerah ini, maka masyarakat tidak mudah dihasut oleh orang-orang komunis, sehingga tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang sulit diatasi.

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Wilayah kelurahan ini termasuk daerah basis gerakan PKI. Dan di kelurahan ini juga banyak terdapat orpol dan ormas bagi masyarakat Islam. Pertengkaran antara orpol dan ormas di kelurahan ini sulit diselesaikan, terlebih-lebih pada saat menjelang peristiwa G 30 S/PKI. Sehingga daerah ini benar-benar menjadi daerah rawan. Di samping banyaknya kejahatan yang ditimbulkan dari warga sendiri, karena rendahnya sosial ekonomi. Maka penduduk banyak yang cemas dan tidak sedikit yang terpaksa meninggalkan daerah ini, pindah ke daerah lain.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Di Kelurahan Jagakarsa sebelum Pelita, keadaan keamanan dan ketertiban terjamin. Sekalipun di kelurahan ini banyak terdapat partai politik, namun sebagian besar berlandaskan Islam sepertinya Masyumi, NU, Perti dan sebagainya. Bahkan setelah dilarangnya partai Masyumi, keadaan di kelurahan ini cukup aman dan tenteram. Kalau dilihat keadaan pada waktu itu tidak ada kegiatan politik yang sangat menonjol. Kemudian keadaan setelah tahun 1965, terdapat ormas dari Barisan Tani Indonesia, akan tetapi pada waktu itu diadakan pendataan hanya terdapat 73 orang dan 17 orang di antaranya telah meninggal.

Maka keadaan keamanan dan ketertiban di kelurahan ini boleh dikatakan cukup baik sampai sekarang.

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Di kelurahan ini pernah terjadi basis kekuatan Partai Komunis Indonesia. Maka masyarakat sering dihasut, sehingga tidak ada persatuan dan kesatuan antar warga. Banyak anak-anak putus sekolah dan pengangguran, yang menyebabkan sering terjadinya kejahatan, perkelahian dan pertentangan ideologi antar parpol dan ormas yang sangat tajam.

Sering terjadi serobot menyerobot tanah, yang akhirnya mengundang orang-orang komunis ikut ambil bagian, dengan kedok membela rakyat kecil atau proletar.

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Di daerah ini sering timbul perkelahian-perkelahian, perselisihan-perselisihan pada waktu sebelum Pelita, akan tetapi bukan disebabkan oleh ideologi politik, melainkan disebabkan sifat warga masyarakat yang memiliki jiwa yang keras yakni sebagian besar berasal dari daerah Banten. Penduduk di sini kebanyakan hanya menjadi pekerja musiman, sehingga sulit untuk mengadakan penertiban. Sejak dulu masyarakat di daerah ini termasuk daerah yang fanatik terhadap agama Islam, karena penduduknya memang berasal dari daerah yang fanatik Islam pula. Maka tidak mudah kena hasutan oleh ideologi Komunis.

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah ini sebelum Pelita, tidak begitu menonjol kegiatan partai, sehingga tidak begitu banyak terjadi gangguan-gangguan yang bersifat kriminalitas. Penduduk banyak yang fanatik memeluk agama Islam, sehingga mudah diarahkan dalam mengikuti peraturan-peraturan/hukum yang berlaku.

Pemuda-pemudanya dari dulu sampai sekarang termasuk patuh dan jarang terjadi pertengkaran antar warga. Maka keamanan dan ketertiban cukup baik.

Pada kesempatan ini kami ambilkan lagi satu kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai perbandingan, yakni:

10. Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur

Di daerah ini merupakan basis kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat di daerah ini sebagian besar telah kena pengaruh ideologi komunis, maka gerakan Partai Komunis Indonesia sangat leluasa mengatur siasat gerakan G 30 S/PKI. Dan di tempat ini pulalah yang digunakan untuk mengadakan penganiayaan dan pembunuhan secara keji terhadap pahlawan-pahlawan Revolusi.

Gerakan Pemuda Rakyat, Gerwani dan ormas-ormas lainnya yang bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia, sangat besar pengaruhnya di kalangan masyarakat pedesaan, dengan kedok untuk memperjuangkan nasib rakyat proletar. Yang menjadi sasaran dan dianggap musuh utama adalah organisasi yang bernafaskan Islam.

BAB III
PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH
DI BIDANG PEMERINTAHAN
D E S A

A. LANDASAN-LANDASAN PELAKSANAANNYA

Pelaksanaan Pelita di daerah di bidang pemerintahan desa secara umum mempunyai landasan-landasan antara lain sebagai berikut:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Garis-Garis Besar Haluan Negara
3. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
4. Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 156 tahun 1980, tentang Peraturan Dasar Rt dan Rw

Untuk lebih jelas sebelumnya kita uraikan patokan dasar di dalam daftar tabel yang sering dipergunakan di kantor-kantor walikota dan kelurahan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna menentukan tingkat kemajuan suatu desa, baik yang berstatus swadaya, swakarya ataupun swasembada. Cara tabel ini telah umum dipakai di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta di dalam menentukan tingkat kemajuan dan perkembangan desa yang telah dicapai.

Untuk dapat mengerti daftar tabel yang sering dipakai di kantor-kantor walikota ataupun kelurahan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut, kita harus dapat memahami kode-kode dan keterangan-keterangan yang dimaksud seperti yang dapat kita catat sebagai berikut.

Desa-desa di seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta semenjak tahun 1979 semua desa (kelurahan) telah berstatus swasembada. Beberapa alasan masuk swasembada antara lain dilihat dari beberapa aspek adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| a. Mata pencaharian penduduk dengan kode (E) | 1,2,3.... |
| b. Produksidengan kode (Y) | 1,2,3.... |
| c. Adatdengan kode (A) | 1,2,3.... |
| d. Kelembagaan.dengan kode (L) | 1,2,3.... |
| e. Pendidikandengan kode (Pd) | 1,2,3.... |

- f. Gotong Royong.dengan kode (Gr) 1,2,3. . . .
- g. Prasarana desadengan kode (P) 1,2,3. . . .

Cara penilaian:

Untuk setiap desa dinilai sebagai berikut:

- a. Desa swadaya nilainya 7 – 11.
- b. Desa swakarya nilainya 12 – 16.
- c. Desa swasembada nilainya 17 – 21.

Aspek-aspek di atas untuk seluruh desa di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 1979 telah memberikan nilai 17 – 21. Dengan demikian seluruh kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada saat sekarang ini (1981) telah bersifat swasembada.

Contoh cara melihat daftar tabel:

- 1. Mata pencaharian, misalnya;
 - a. Kalau sebagian besar matapencaharian penduduk adalah pertanian = E1,
 - b. Kalau 50% pertanian dan 50% pegawai = E2,
 - c. Kalau kebanyakan pegawai = E3, dan seterusnya. . . .
- 2. Produksi, misalnya;
 - a. Dalam 1 tahun mencapai 3.000.000,- = Y1,
 - b. Kalau lebih besar dari 6 juta = Y2,
 - c. Di atas 10 juta = Y3, dan seterusnya. . . .
- 3. Adat istiadat, misalnya;
 - a. Masih mengikat = A1,
 - b. Sudah transisi = A2,
 - c. Tidak mengikat = A3, dan seterusnya. . . .
- 4. Kelembagaan, misalnya;
 - a. Lembaga Pemerintahan Desa)
 - b. Lembaga Kesehatan) L1
 - c. Lembaga Pendidikan)
 - d. Lembaga Keagamaan)
 - e. Lembaga Adat-Istiadat)
 - f. Lembaga Sosial)

- g. Lembaga Gotong Royong)
 - h. Lembaga Perekonomian) dan seterusnya.
5. Pendidikan, misalnya;
 - a. 30% = Pd1
 - b. 60% = Pd2
 - c. Di atas 60% = Pd3, dan seterusnya.
 6. Gotong Royong, misalnya;
 - a. Laten = Gr1.
 - b. Transisi = Gr2.
 - c. Manifes = Gr3 dan seterusnya.
 7. Prasarana Desa, misalnya;
 - a. Sektor perkembangan kelas belum ada yang diaspal = P1.
 - b. Sebagian diaspal = P2.
 - c. Sebagian besar diaspal dan diperkeras = P3 dan seterusnya

Demikianlah cara penilaian atau patokan dasar secara singkat di dalam daftar tabel yang sering dipergunakan, berdasarkan landasan-landasan yang dipakai di dalam pelaksanaan Pelita di daerah di bidang pemerintahan desa.

Untuk lebih jelasnya cara penilaian desa swadaya, swakarya, dan swasembada berdasarkan landasan-landasan Pelita tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Faktor Dasar

a. Manusia:

- 1) Net Density kurang dari 200 orang/km², diberi kode D1.
- 2) Net Density 200 – 300 orang/km², diberi kode D2.
- 3) Net Density lebih dari 300 orang/km², diberi kode D3.

b. Alam:

- 1) Land Form : – Pegunungan nilai 5.
 – Bukit/perbukitan nilai 15.
 – Dataran nilai 25.

- 2) Curah hujan : – Kurang dari 2000 mm/th nilai 5
- 2) Curah hujan : – Kurang dari 2000 mm/th nilai 5.
– Antara 2000 - 3000 mm/th nilai 15.
– Lebih dari 3000 mm/th nilai 25.
- 3) Produktifitas tanah
– Kurang nilai 10.
– Sedang nilai 30.
– Tinggi nilai 25.

c. Jumlah nilai faktor alam sebagai berikut:

- 1) Jumlah nilai 20 – 30 Golongan kurang, kode N1.
- 2) Jumlah nilai 60 – 70 Golongan sedang, kode N2.
- 3) Jumlah nilai 80 – 100 Golongan Tinggi, kode N3.

2. Orbitasi Desa

Yang dimaksud adalah jarak desa ke pusat-pusat fasilitas yang dipengaruhi juga kelancaran lalu lintas (transportasi).

Orbitasi desa ada 5 golongan, ialah:

a. Jika jarak desa ke Ibukota Propinsi sepanjang maksimal 60 km dengan jarak perhubungan jalan aspal atau jalan batu, desa-desa tersebut orbitasinya primair, diberi kode I.

b. Jika jarak desa dengan Ibukota Kabupaten kurang dari 30 km dengan jalan penghubung jalan aspal atau batu, desa-desa tersebut orbitasinya tertier, diberi kode II.

c. Jika jarak desa dengan Ibukota Kecamatan kurang dari 30 km, dengan jalan penghubung jalan aspal atau batu, desa-desa tersebut orbitasinya tertier, diberi kode III.

d. Jika jalan penghubungnya hanya jalan tanah (tidak lancar), meskipun jarak tersebut terpenuhi, desa-desa tersebut digolongkan desa terisolir, juga desa-desa yang jaraknya lebih dari angka yang ditentukan, diberi kode IV.

e. Jika suatu desa dekat Ibukota Propinsi, dekat Ibukota Kabupaten dan juga dekat Ibukota Kecamatan, maka untuk menentukan orbitasinya perlu dilihat jalan penghubungnya yang paling lancar, jika ketiganya dihubungkan dengan jalan yang sama, maka dipilih jarak yang terdekat.

3. Faktor-faktor yang relatif berkembang (Stage of development)

a. Faktor Ekonomi

1) Mata Pencaharian (kode E)

– Jika jumlah penduduk desa yang mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian dan perikanan lebih besar dari 55% termasuk golongan primair, kode E2.

– Jika jumlah penduduk desa yang mempunyai mata pencaharian di bidang perdagangan, toko, warung dan jasa lebih besar dari 55% golongan tertiar, kode E3.

2) Out put Desa (kode Y)

Untuk menghitung out put ini didasarkan pada produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam masa satu tahun. Lalu masing-masing dikalikan dengan harga (Basic value) yang berlaku, nilai uang yang ada di golongkan sebagai berikut:

– Out put kurang dari Rp 50.000.000,– golongan rendah, kode Y1.

– Out put antara Rp 50.000.000,– s/d Rp 100.000.000,– golongan rendah sedang, kode Y2.

– Out put lebih dari Rp 100.000.000,– golongan tinggi, kode Y3.

b. Faktor Sosial Budaya

1) Adat kepercayaan (kode A).

Untuk menilai adat suatu desa kita memakai prosedur kuantitatif. Di dalam *questionare* ada 9 pertanyaan mengenai adat ini, jika dari 9 pertanyaan tersebut jawabnya:

– 7 – 9 dijawab ya, maka adat mengikat, kode A1.

– Jika 4 – 7 dijawab ya, maka adat transisi, kode A2.

– Jika 4 dijawab ya, maka adat tidak mengikat, kode A3.

2) Kelembagaan Desa (Kode L)

Dalam menilai kelembagaan desa dipakai juga prosedur kuantitatif, yaitu dengan menghitung eksistensi ada tidaknya 8 (delapan) lembaga seperti tersebut di bawah ini:

– Lembaga Pemerintahan (Kepala Desa/DPR/DPD, Desa)

– Lembaga Sosial (LSD, Panti-panti Asuhan)

– Lembaga Pendidikan

- Lembaga Perekonomian (koperasi, Bank Kredit, Lumbung Desa)
- Lembaga Kesehatan (Rumah Sakit, Poliklinik, BKIA, Pos KB, Pos KB, Pos KB Desa)
- Lembaga Kesenian (Tari-tarian, Gamelan, Olah Raga dan sebagainya)
- Lembaga Gotong Royong (Subak, Mitra cai, Arisan dan lain-lain)
- Jika di suatu desa terdapat 7 – 8 lembaga tersebut di atas, kelembagaan maju, kode L3
- Jika hanya terdapat 4 – 6 lembaga, kelembagaan berkembang, kode L2
- Jika hanya 1 – 3 lembaga, kelembagaan sederhana, kode L1

3) Pendidikan (kode Pd)

Untuk menghitung tingkat pendidikan desa, kita menghitung jumlah penduduk yang berpendidikan tamat SD + jumlah yang tamat SLP + jumlah yang tamat SMA + jumlah yang tamat Akademi dan Universitas. Jumlah akhir ini lalu diprosentasekan dengan jumlah seluruh penduduk, akan diperoleh:

Jumlah yang tamat SD ke atas lebih kecil dari 30%, tingkat pendidikan di desa itu kurang, diberi kode Pd1.

Jumlah yang tamat SD ke atas 30% s/d 60%, tingkat pendidikan sedang, diberi kode Pd2.

Jumlah yang tamat SD ke atas lebih dari 60%, tingkat pendidikan cukup, diberi kode Pd3.

4) Swadaya Gotong Royong (kode Gr)

Untuk menilai keadaan swadaya gotong-royong suatu desa, kita gunakan data yang ada yaitu data kuantitatif, yaitu:

Jika di suatu desa aktivitas gotong-royong dapat berjalan atas inisiatif/musyawaharah penduduk, maka swadaya gotong royong Manifest, kode Gr3.

Jika aktivitas gotong royong dapat berjalan lebih berhasil dengan diberi imbalan jasa, maka swadaya gotong royong di sini Latent, kode Gr1.

c. Faktor Prasarana Desa (kode P)

1) Prasarana perhubungan

Prasarana perhubungan memegang peranan penting dari perekonomian desa, karena meskipun produksi tinggi, tetapi perhubungan tidak lancar, maka menyebabkan produksi desa sulit dijual ke luar.

Cara penilaian:

- Jika desa memiliki/dilalui jalan aspal, jalan batu atau jalan tanah, diberi score 50.
- Jika desa memiliki jalan batu yang baik dan jalan tanah diberi score 30.
- Jika desa hanya memiliki jalan tanah saja, diberi score 10.

2) Prasarana Produksi

Cara menilai:

- Jika desa mempunyai dam sendiri dengan bangunan-bangunan air dan saluran teknis, sehingga air bisa otonom dan baik diberi score 25.
- Jika desa mempunyai bangunan-bangunan air setengah teknis di beri score 15.
- Jika desa mempunyai saluran irigasi sederhana/tadah hujan diberi score 5.

Untuk desa-desa yang tidak mempunyai sistem iritasi/bukan dana pertanian tahunan, yang dinilai adalah sistem budidaya tanaman.

- Jika tanaman di desa pada umumnya pemeliharaan dan jarak tanamannya baik, diberi score 25.
- Jika tanaman di desa pada umumnya kurang pemeliharaan dan jarak tanamannya baik atau sebaliknya, diberi score 15.
- Jika di desa tidak dipelihara dan diatur jarak tanamannya diberi score 5.

3) Prasarana Pemasaran

Cara penilaian:

Pasar umum/pasar hewan/pasar lain-lainnya.
Bank/Koperasi/Lumbung Desa/KUD/BUUD.
Kios / Toko / Warung.

Jika desa mempunyai:

Tiga jenis prasarana diberi score 25.

Dua jenis prasarana diberi score 15.

Satu di antara tiga jenis prasarana diberi score 5.

4) Prasarana Sosial

Cara penilaian meliputi enam kelompok prasarana:

Gedung Pemerintahan Desa

Gedung Lembaga Sosial Desa

Gedung Sekolah

Pura/Surau/Gereja/Mesjid

BKIA/Poliklinik/Rumah Sakit/Puskesmas

Jika Desa mempunyai:

Lima atau enam prasarana dengan catatan ada gedung pemerintahan, gedung sekolah dan poliklinik diberi score 25.

Tiga atau empat jenis prasarana dengan catatan ada gedung pemerintahan dan gedung sekolah diberi score 15.

Satu atau dua prasarana jenis bangunan diberi score 5.

Apabila jumlah score:

95 – 125, prasarana desa dinilai cukup, diberi simbol P3.

60 – 90, prasarana desa dinilai cukup, diberi simbol P2.

Kurang dari 60, prasarana desa dinilai kurang, diberi simbol F1.¹³⁾

Dari cara pemberian nilai swadaya, swakarya dan swasembada tersebut dapatlah kita melihat perkembangan desa-desa pada tabel (lihat lampiran), yaitu klasifikasi desa dan tahap perkembangannya, misalnya dalam tahun 1975/1976 dan keadaan tahun 1979/1980 (Pelita II).

Keadaan ini sebenarnya dapat pula menjadi suatu patokan atau gambaran tentang keadaan desa-desa (Kelurahan) di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada masa Pelita I dan pada masa sebelumnya, untuk lebih jelas keadaan desa-desa (Kelurahan) tersebut secara umum seperti data-data yang dapat kami kumpulkan, sehingga landasan pelaksanaan pembangunan di daerah Pedesaan, Daerah Khusus

13) Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tentang tipe dan klasifikasi tingkat perkembangan kelurahan, keadaan tahun 1978/1979.

Ibukota Jakarta, akan menjadi jelas arah dan tujuannya. Dan akan memudahkan pengambilan kebijaksanaan terutama masalah-masalah yang diprioritaskan terlebih dahulu.

Masalah pemukiman di wilayah Ibukota Republik Indonesia, merupakan masalah yang perlu mendapat prioritas pertama, mengingat masalah ini menyangkut berbagai masalah dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, keserasian perkotaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dengan segera tercapainya iklim yang baik di seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan terutama bagi daerah-daerah pedesaan.

Langkah yang pertama dapat ditempuh melalui terciptanya prasarana yang lengkap dalam bidang jasa, wisata dan budaya. Kesemuanya itu menjadi perhatian utama dalam menentukan pelaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan. Unsur desa merupakan titik tolak pertama dalam pembangunan.

Arah dan tujuan pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah digariskan dalam Pola Dasar Repelita Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:

1. Arah pembangunan kota Jakarta jangka panjang, ditujukan menjadikan Jakarta sebagai kota Pusat Pemerintahan, dengan pengembangan kehidupannya di arahkan pada kota dengan kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, pariwisata dan kebudayaan.
2. Tujuan Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
 - a. Menetapkan dan mewujudkan tujuan pembangunan Nasional di Daerah.
 - b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui usaha-usaha dan langkah-langkah yang berencana, terarah dan terpadu dalam memecahkan masalah-masalah pokok yang relevan dihadapi oleh rakyat dan masyarakat Jakarta dalam proses pembangunan.
 - c. Meningkatkan pemanfaatan modal Dasar Pembangunan di daerah.
 - d. Membina dan mengembangkan terus-menerus nilai-nilai kemasyarakatan yang menunjang proses pembangunan dan norma-norma kehidupan yang positif.

- e. Meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan.¹⁴⁾

Situasi dan kondisi daerah Jakarta sebagai Ibukota yang juga menuju ke arah terciptanya Jakarta sebagai kota Metropolitan sangat memerlukan perhatian khusus kepada sasaran sebagai berikut:

1. Manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan yang membutuhkan hidup, bekerja, bermukim, berkembang, dan berkreasi.
2. Lingkungan hidup fisik, sebagai tempat bermukim dan tempat melakukan semua kegiatan hidup perkotaan.
3. Lingkungan hidup sosial yang berupa sistem nilai masyarakat-an yang menunjang pencapaian tujuan pembangunan

Dirasakan keadaan kehidupan di Jakarta terjadi ketimpangan-ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang pandai dan yang bodoh, antara yang maju dan yang terbelakang. Maka untuk mengurangi ketimpangan-ketimpangan tersebut diperlukan:

1. Terciptanya kehidupan yang tenang dan tentram dalam pengertian adanya perlindungan materiil dan moril
2. Terciptanya sarana-sarana pembangunan, peradaban/martabat, budaya dan moral agama
3. Adanya tempat kediaman dalam lingkungan yang aman, tertib dan sehat
4. Tersedianya lapangan pekerjaan/mata pencaharian
5. Adanya sarana/kelengkapan-kelengkapan kota (utility) dan alat-alat komunikasi yang cukup.
6. Adanya pencegahan terhadap bencana dan gangguan alam.¹⁵⁾

Oleh karena itu untuk mewujudkan arah dan tujuan terciptanya kehidupan yang tenang dan tentram, terciptanya sarana-sarana perkotaan, adanya tempat kediaman dalam lingkungan yang aman, tertib dan sehat serta lain sebagainya, perlu adanya pembangunan yang berencana dan mantap.

Langkah pembangunan yang pertama kali bertitik tolak untuk meningkatkan sebagai usaha usaha mengurangi adanya kemiskinan kebodohan, keterbelakangan dan sebagainya. Maka diusahakan

14) Buku I, *op. cit.* hal. 2 – 6.

15) Buku I, *log. cit.* hal. 6

terciptanya iklim yang baik, yang dapat dimulai daerah daerah pedesaan. Karena sebagian besar kelompok penduduk di daerah pedesaan Jakarta masih tergolong sangat miskin, bodoh dan terbelakang, dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mereka adalah penganggur atau setengah penganggur. Kalau pun ada pekerjaan maka sifatnya tidaklah memberi pendapatan yang memadai bagi tingkat hidup yang wajar, mereka ini banyak terdapat di daerah Jakarta
2. Mereka berusaha sendiri, seringkali dengan menyewa peralatan dari orang lain. Sifat usaha yang kecil dan terbatas karena ketiadaan modal, mereka ini pun banyak terdapat di Jakarta
3. Untuk sebagian besar di Jakarta kelompok miskin, bodoh, dan terbelakang ini terdapat di daerah pedesaan/perkampungan dan pinggiran kota.

Hal-hal tersebut di atas tidak mudah diberantas, karena sangat terikat dengan kehidupan sehari-hari adat kebiasaan dan telah berjalan sangat lama. Oleh karena itu cara memberantasnya harus dengan bertahap yang dapat dimulai dengan adanya penyediaan sarana pembangunan di segala bidang. Antara lain sarana pendidikan, sarana angkutan, sarana produksi, sarana kesehatan dan sebagainya. Maka landasan yang utama pembangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terutama di daerah pedesaan adalah hal-hal seperti tersebut di atas yang bertitik tolak kepada kehidupan Pancasila.

Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebelum Pelita sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan daerah pada masa itu masih dapat diklasifikasikan sebagai desa swadaya, desa swakarsa dan desa swasembada. Sampai dengan tahun 1979, klasifikasi desa seperti tersebut di atas baru dapat dihilangkan, karena seluruh desa di Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dapat dikategorikan sebagai desa swasembada (lihat lampiran Type dan klasifikasi Tingkat Perkembangan Kelurahan Keadaan Tahun 1975/1976 dan 1979/1980) yang kami ambil keadaan khusus dari tiga wilayah yaitu Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

B. PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pelaksanaan Pelita di Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bi-

dang Pemerintahan Desa, pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, di mana aspek-aspek Regional, Nasional dan Internasional haruslah dapat dicerminkan. Agar pelaksanaan pembangunannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka diusahakan efisiensi kerja dari seluruh aparturnya dengan cara-cara konsepsional dan operasional.

Untuk menghadapi perubahan-perubahan dengan adanya pembangunan yang berencana dengan baik, maka disiapkan pula perubahan mental dari sikap apatis menjadi dinamis, agar masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Cara berpikir dari masyarakat pedesaan yang selama ini sangat dipengaruhi oleh adat kebiasaan di daerah haruslah dirangsang untuk berpikir yang lebih maju disesuaikan dengan gerak pembangunan yang akan dicapai.

Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jauh sebelum pelaksanaan Pelita, telah diadakan pembagian wilayah menjadi lima wilayah kota Administratif (Vide Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. 4 tahun 1966 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 12 Agustus 1966 No.Ib.3/I/166, di dalam rangka Dekonsentrasi Pemerintahan). Kelima wilayah tersebut adalah:

1. Wilayah Jakarta Pusat
2. Wilayah Jakarta Barat
3. Wilayah Jakarta Utara
4. Wilayah Jakarta Timur
5. Wilayah Jakarta Selatan

Akibat adanya pembagian wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka berubah pula susunan/struktur pemerintahan desa, yang berarti lebih memudahkan cara pelaksanaan pemerintahan dalam rangka pembangunan yang telah direncanakan. Pemerintahan desa mulai diatur menurut konsep dan pola yang seragam, sehingga memungkinkan adanya pembagian tugas yang lebih terarah. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan telah diseragamkan menjadi:

1. Lurah dan Wakil Lurah
2. Babinsa dan Binmas

3. Sub. Sie I / Pemerintahan
4. Sub Sie II/ Kamtib
5. Sub Sie III / Kesra
6. Sub. Sie IV/TU/Keuangan
7. Sub. Sie V/ Pembangunan Desa

Lurah yang merupakan unsur pemerintahan terendah, tidak lagi dipilih oleh rakyat, akan tetapi berdasarkan jenjang kepegawaian, sehingga lurah-lurah di Jakarta terdiri dari Pegawai Negeri/ABRI. Adapun pimpinan masyarakat non pemerintah seperti Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT), masih dipilih langsung oleh rakyat.

Karena lurah terikat dengan peraturan kepegawaian, sehingga selalu berorientasi kepada pembangunan. Jadi tidak lagi seperti jaman orde lama, di mana sebagian besar lurah terdiri dari orang-orang partai, sehingga selalu berorientasi kepada program partai, yang mengakibatkan macetnya pembangunan.

Untuk melancarkan jalannya pembangunan mulailah dibentuk/didirikan berbagai lembaga pelayanan masyarakat seperti Keluarga Berencana, Kesehatan, Pertanian, Sosial dan lain sebagainya. Tiap-tiap kelurahan dilengkapi dengan Puskesmas, Pos Kesehatan, Sekolah-sekolah, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan di bidang sosial, budaya dan rokhani.

Di samping itu berdiri pula kursus-kursus ketrampilan, yang menurus ke arah wiraswasta, seperti kursus montir radio, kursus merangkai bunga, las besi, jahit-menjahit, rias merias, kerajinan tangan dari kayu, bambu dan lain-lain. Untuk menampung dan mengembangkan kreasi/ketrampilan tersebut, maka banyak dibangun gedung Panti Latihan Kerja (PLK).

Kursus-kursus ketrampilan itu didirikan bertujuan untuk menampung dan mengatasi masalah anak-anak putus sekolah (*drops out*), di samping usaha untuk meningkatkan tenaga-tenaga ketrampilan. Anak-anak yang putus sekolah ini kebanyakan terdapat di daerah-daerah pedesaan yang belum banyak mendapat fasilitas/sarana pendidikan, sarana angkutan (jalan raya), maupun sarana industri. Daerah-daerah pedesaan tersebut kebanyakan terletak di daerah pinggiran wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Oleh karena itu pada pelaksanaan Pelita I daerah-daerah pedesaan yang terdapat di ketiga wilayah tersebut mendapat prioritas pertama adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Jakarta Timur

- a. Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Jatinegara
- b. Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati
- c. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung
- d. Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati
- e. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara
- f. Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman

2. Wilayah Jakarta Barat

- a. Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng
- b. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng
- c. Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan
- d. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan
- e. Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan
- f. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora.

3. Wilayah Jakarta Selatan

- a. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu
- b. Kelurahan Mampang Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan
- c. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Lama
- d. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi
- e. Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet
- f. Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet.

Adapun untuk kedua wilayah Jakarta yakni wilayah Jakarta Pusat dan wilayah Jakarta Utara, tidak banyak mendapat fasilitas/sarana pendidikan, sarana angkutan, maupun industri lagi, mengingat untuk kedua wilayah tersebut dinilai sudah cukup banyak terdapat sarana-sarana seperti tersebut di atas. Akan tetapi dalam Pelita II dan III daerah-daerah pedesaan di kedua wilayah tersebut, juga mendapat tambahan dan peningkatan sarana-sarana pendidikan dan sarana angkutan.

Di bawah ini kami ambilkan contoh pelaksanaan Pelita di beberapa daerah pedesaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bidang pemerintahan.

1. Di Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Pelaksanaan Pelita di daerah ini berjalan lancar. Tahap pertama pemerintah memprioritaskan tentang pembangunan lingkungan, dengan cara membangun rumah-rumah dengan perkaplingan, yang dilengkapi pula dengan sarana angkutan (jalan yang dikeraskan, diperluas dan diaspal). Dengan adanya perumahan-perumahan yang teratur dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan memenuhi persyaratan pemukiman yang harmonis.

Tahap selanjutnya membangun sarana-sarana pendidikan, pasar dan dilengkapi dengan listrik dan air minum. Dibandingkan dengan kelurahan lainnya, bahwa kelurahan Jatirawamangun termasuk yang paling cepat berkembang dan dalam waktu singkat telah berubah menjadi daerah perkotaan. Terlebih-lebih setelah daerah ini mendapat proyek Mohammad Husni Thamrin yang bertujuan untuk memperbaiki perkampungan di seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka pada saat sekarang (Pelita III) ini tidak terlihat adanya rawa-rawa, jalan yang becek, daerah persawahan, bahkan sudah kena MHT seluruhnya.

Kemudian dalam mengatasi kepadatan penduduk, di daerah ini ternyata mampu menampung penduduk yang lebih banyak, karena di rubahnya daerah-daerah rawa dan persawahan menjadi daerah pemukiman yang baik dan harmonis, yang berarti pula merubah cara hidup pertanian menjadi pegawai atau berdagang (berwiraswasta).

Dalam bidang pendidikan, pemerintah telah berhasil mengatasi buta huruf, bahkan dapat menekan adanya anak-anak yang putus sekolah (drops out), disebabkan sudah tersedianya sarana-sarana pendidikan yang cukup memadai.¹⁶⁾

2. Di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Kelurahan ini baru terbentuk pada tanggal 1 Oktober 1967, sehubungan dengan pemecahan Jakarta menjadi 5 (lima) wilayah Walikota. Pelaksanaan Pelita di daerah ini tanpa mengalami hambatan-hambatan.

16) Hasil wawancara dengan M.Soleh Suprpto dari Kepala Lingkungan/staf Kelurahan pada tanggal 8 Nopember 1981, di Kantor Kelurahan Jatirawamangun.

Usaha pemerintahan pada tahap pertama memprioritaskan pembangunan sarana industri kecil dan sarana angkutan. Untuk industri kecil ini telah dirintis sejak tahun 1957 oleh penduduk setempat. Akan tetapi belum berkembang pesat, karena sebagian besar penduduk masih menitik beratkan dengan sistim kehidupan agraria (pertanian). Baru pada akhir tahun 1972 dengan masuknya proyek MHT (Mohammad Husni Thamrin) ke daerah ini, maka mulailah ada sarana angkutan yang masuk dan lancar, sehingga hasil industri ringan yang berupa mebelair dapat berkembang pesat dan banyak konsumen yang memesan, yang mengakibatkan berubahnya cara hidup agraris menjadi home industri.

Pada tahun 1973 mulailah adanya Proyek Real Estate masuk ke kelurahan Klender, yang membuat teraturnya perumahan di daerah ini dan juga adanya perkampungan dan sarana kelistrikan, menambah harmonisnya pemukiman penduduk yang sehat.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah dengan cepat dapat menyediakan sarana pendidikan yang memadai, sehingga masalah anak-anak putus sekolah dapat teratasi. Jumlah sekolahan dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan atas dapat menampung bagi anak-anak usia belajar maupun usia sekolah. Bahkan sampai dengan Pelita III (tahun 1981) sekolah-sekolah dan perkampungan di kelurahan Klender telah dapat menikmati program listrik masuk desa.¹⁷⁾

3. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Pemerintahan di kelurahan Penggilingan sejak Pelita I sampai dengan Pelita III baru dijabat Tahun 1957 sampai dengan 1972 oleh Lurah Mudjitaba, tahun 1972 sampai dengan 1974 oleh Lurah H.Nur, dan tahun 1974 sampai sekarang oleh Lurah Abdul Hamid. Pelaksanaan Pelita di bidang Pemerintahan pada tahap pertama berusaha untuk merubah sikap mental masyarakat dari sikap apatis tradisional menjadi dinamis rasional terhadap pola pembangunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pelaksanaan Pelita di daerah ini banyak mengalami hambatan-hambatan, disebabkan sangat rendahnya dasar pendidikan penduduk yang berdomisili di daerah ini, bahkan boleh dikatakan sebagian besar penduduk masih buta huruf.

17) Hasil wawancara dengan M.Arsyad Djamhari (Wakil Lurah Klender) pada tanggal 6 Nopember 1981 di kantor Kelurahan Klender.

Letak kelurahan ini terdapat di daerah pinggiran wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan belum ada sarana angkutan menuju ke daerah/ke kelurahan ini. Penduduknya sebagian besar hidup dengan hasil pertanian yang masih sangat sederhana. Di samping itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.Da.11/2/72 tanggal 20 Mei 1972, wilayah kelurahan Penggilingan termasuk areal perluasan Industri Pulo Gadung, yang mengakibatkan untuk daerah ini belum atau tidak diperbolehkan mendirikan bangunan untuk perumahan yang bersifat permanen. Oleh karena itu di daerah ini belum dapat dilaksanakan pembangunan fisik berupa sarana pendidikan, sarana angkutan (jalan), sehingga usaha pemerintah untuk merubah sikap mental masyarakat dari berpikir apatis tradisional menjadi dinamis rasional mengalami kesulitan.

Meskipun demikian dalam hal kependudukan, untuk wilayah Kelurahan Penggilingan dapat dikatakan cukup padat, sehubungan dengan adanya Policy Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Agustus 1976 No.Ib.3/1/27/1970 (Lembaran Daerah No.35 tahun 1970) tentang Jakarta sebagai kota tertutup dan sampai saat ini jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Penggilingan mencapai 17.547 jiwa terdiri dari:

Warga Negara Indonesia Laki-laki 9.079 jiwa. Warga Negara Indonesia Perempuan 8.468 jiwa. Warga Negara Asing laki-laki 7 jiwa. Warga Negara Asing Perempuan – jiwa.

Dari hal kepadatan penduduk ini, bila luas wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka akan diketahui bahwa kepadatan penduduk di wilayah Kelurahan Penggilingan, dengan angka rata-rata 20 jiwa per hektarnya. Konsentrasi kepadatan penduduk berada pada areal tanah darat yang merupakan bagian besar dari luas wilayah, di mana areal persawahan masih lebih kecil. Dengan demikian terlihat bahwa masalah kepadatan penduduk belum menjadi problema, namun apabila dilihat dari proyek pembangunan industri di wilayah Kelurahan Penggilingan serta banyaknya pendatang sampai saat ini masalah kepadatan penduduk menjadi problema dan dari sedikit demi sedikit akan mulai dirasakan.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, pemerintah telah berusaha untuk membangun sarana angkutan yang berupa jalan yang diperluas dan dikeraskan serta diaspal, dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi dengan daerah lain yang banyak menampung tenaga

- 5. Sub. Sie III/Kesra : Mansyur K
- 6. Sub. Sie IV/Tata Usaha : Soetojo
- 7. Sub. Sie V/Pemb. Desa : Soetojo

Untuk melaksanakan pemerintahan di wilayah Kelurahan Penggilingan, meskipun personilnya masih belum cukup, namun dapat berjalan baik, karena pejabat-pejabat Wakil Lurah dan Kepala, Sub. Sie dapat merangkap sebagai petugas Keamanan maupun administratif. Pada saat ini di daerah Kelurahan Penggilingan telah masuk proyek perumahan yang dibangun oleh Real Estate dan sudah mulai dihuni oleh penduduk yang mempunyai penghasilan tetap. Maka dengan demikian tentu akan menambah berkembangnya fasilitas angkutan maupun pendidikan. Dan juga dalam kenyataan bahwa bagi anak-anak usia belajar ternyata dapat tertampung pada sekolah dasar di Kelurahan Penggilingan, sehingga tujuan wajib belajar dapat terpenuhi, dan sampai saat ini telah tidak terdapat lagi buta huruf.¹⁸⁾

4. Di Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Pelaksanaan Pelita di bidang Pemerintahan berjalan lancar, disambut baik oleh masyarakat dan tidak terdapat hambatan-hambatan.

Pada mulanya (sampai tahun 1970) di daerah Kelurahan Gandaria Utara masih merupakan suatu wilayah pedesaan yang belum terbina baik (Daerah Ruler). Akan tetapi berkat kegigihan para pembina di tingkat kelurahan maka pembangunan dapat berjalan dengan pesat sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga Kelurahan Gandaria Utara menjadi satu daerah yang berkembang dengan pesat di dalam pembangunan dan kegiatan-kegiatannya.

Pelaksanaan perbaikan kampung (*vertabevering*) yang diberi nama Proyek Mohammad Husni Thamrin benar-benar mempunyai pengaruh yang positif di kalangan masyarakat, karena proyek tersebut secara langsung menyentuh dan merubah cara berpikir masyarakat dari sikap mental statis tradisional menjadi dinamis rasional, sehingga penduduk menjadi maju dan taraf kehidupan masyarakat meningkat dari alam pedesaan menjadi perkotaan.

18) Laopran Pembinaan Wilayah Kelurahan Penggilingan tahun 1981, hal. 3 - 4.

Proyek Mohammad Husni Thamrin mulai dilaksanakan di daerah Kelurahan Gandaria Utara sejak tahun 1970 sampai sekarang, di mana masyarakat ikut berperan serta secara aktif termasuk pula dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan lainnya seperti Gedung Sasana Krida Karang Taruna, Pasar Inpres, Rumah Dinas Lurah, Sekolah Dasar dan pelebaran Jalan Radio Dalam, pelebaran jalan Haji Nawi, Kantor Kelurahan Gandaria Utara, Sekolah Lanjutan Atas, Gedung P.L.K. serta Gedung Balai Rakyat. Oleh karena itu di dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan termasuk pembinaan wilayah dan pelayanan masyarakat perlu dipupuk wataknya, guna peningkatan taraf hidup masyarakat yang penuh rasa tanggung jawab dan disiplin dengan tidak membedakan atau menggolong-golongkan tingkat kehidupan dan cara berpikir masyarakat.¹⁹⁾

Dari pelaksanaan Pelita I, II dan III yang telah berjalan dengan baik, maka keadaan lingkungan di Kelurahan Gandaria Utara dapat dikatakan telah tercipta daerah pemukiman yang baik dan harmonis, namun perlu terus menerus diadakan pembinaan, disebabkan faktor penambahan penduduk yang cepat berkembang, yang dengan sendirinya memerlukan berbagai fasilitas yang lebih banyak lagi, yang meliputi sarana pendidikan, sarana industri dan tempat tinggal.

Untuk menghadapi faktor penambahan penduduk tersebut, pemerintah telah berusaha untuk menambah gedung-gedung sekolah, pembinaan ketrampilan, kursus-kursus kejuruan dan lain sebagainya yang ditunjang dengan biaya pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat. Di samping itu pemerintah/kelurahan juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berswadaya, antara lain turut mengembangkan kehidupan industri kecil agar tercipta adanya wiraswasta dengan home industri. Misalnya bergerak dalam bidang jahit-menjahit, pertukangan, pedagang dan lain-lain.

5. Di Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Pelaksanaan Pelita di Kelurahan Menteng Atas berjalan lancar. Hal ini disebabkan bahwa penduduk di Kelurahan ini sebagian besar telah berpendidikan cukup dan mempunyai kesadaran tinggi.

19) Progress Report Pembinaan Wilayah Kelurahan Gandaria Utara, tahun 1980, hal. 5 - 6

Wilayah Kelurahan Menteng Atas termasuk berpenduduk padat, sehingga diperlukan penanganan yang lebih tertib dan cermat. Di kelurahan ini meliputi sebelas Rukun Warga (RW) dan 206 Rukun Tangga (RT). Luas wilayah tidak begitu luas, hanya 100 ha, dengan penduduk berjumlah 50.563 jiwa. Kemudian dalam bidang pemerintahan ini dapat dikatakan bahwa Kelurahan Menteng Atas tidak mengalami kesulitan, karena 60% tingkat kehidupan sosialnya berada pada tingkat menengah ke atas, sedangkan sisanya masih bertempat tinggal dalam lingkungan perumahan sederhana. Hanya mengenai fasilitas kesehatan masih sangat kurang karena penduduk yang berjumlah 50.563 jiwa baru tersedia satu puskesmas yaitu terletak di wilayah Rukun Warga 08.

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 156 tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka telah diadakan pemecahan RT/RW dan penyempurnaan batas-batas RT/RW dari yang lama menjadi yang baru. Untuk meningkatkan kegiatan pembinaan organisasi RT/RW yang harus terus menerus dilaksanakan, mengingat fungsi organisasi RT/RW di masyarakat, maka pemerintah selalu memelihara komunikasi antara warga dengan pemerintah yang dapat disalurkan lewat RT/RW.

LKMD Kelurahan Menteng Atas terbentuk sejak tahun 1972, berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1980, LKMD tersebut mengalami penyempurnaan dua kali. Selain LKMD maka dibentuk pula Dewan Penasehat yang bernama Badan Musyawarah Pengembangan Masyarakat Kelurahan Menteng Atas yang disingkat BMPM, yang tugasnya memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk atas tugas-tugas yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh LKMD/Lurah.

Badan tersebut anggotanya terdiri dari unsur LKMD (K) dan tokoh-tokoh masyarakat.

Susunan Pengurus LKMD Kelurahan Menteng Atas adalah sebagai berikut:

Ketua Umum	: H. Ahmad Ali Rifai (Lurah Menteng Atas)
Ketua I	: H. R.S. Danu Subroto
Ketua II	: H. Drs. Mubarak
Sekretaris I	: Ichwan Nusufa BA

Sekretaris II : Kusnandar
Bendahara I : Sumarso
Bendahara II : Supandi

Susunan Pengurus Badan Musyawarah Pengembangan Masyarakat Kelurahan Menteng Atas adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Drs. Ayub Siregar
Wakil Ketua : H.M. Yunan Nasution
Sekretaris : Sumartono
Bendahara : H. Wardani
Anggota : H. Rohimat SH
H. Iskak
H. Drs. Danu Subroto
Ibu Tien Yunus
Dedi Kusnadi
M. Wibowo
Kasimin
H. Drs. Mubarak

Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup di Kelurahan Menteng Atas yang 80% telah mendapatkan Proyek Mohammad Husni Thamrin berupa pengembangan jalan kendaraan, jalan setapak, sekolah dasar dan menengah, MCK, demikian pula partisipasi masyarakat sendiri turut membangun dengan cara swadaya antara lain membangun tempat-tempat ibadah, jalan setapak, kantor RW, Pos Hansip, maka dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan serta untuk mencapai kebersihan dan keteduhan, telah dibentuk kelompok-kelompok kerja yang tergabung dalam Gerakan Memasyarakatkan Kebersihan, Keindahan dan Keteduhan Lingkungan Hidup (GMK3LH). Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, telah pula mengadakan kegiatan sejak adanya Pelita I dan melalui kegiatan PKK telah melaksanakan antara lain mengadakan kelompok belajar PKK yang dilaksanakan dari bulan Desember 1980 s/d Mei 1981. Di dalam kegiatan KB. PKK mengadakan kegiatan pendidikan ketrampilan meliputi antara lain menjahit, memasak, merias penganten dan lain sebagainya. Di samping itu pula, ibu-ibu PKK Kelurahan Menteng Atas juga mengkoordinir kegiatan Karang Balita, PPKB, GMK3LH, PKW dan Taman Kakak-Kanak.

Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, telah mengadakan kegiatan untuk membantu peningkatan program Keluarga Berencana di Kelurahan Menteng Atas, maka telah dibentuk Pos Kesehatan, PPKB RW dan PPKB RT.

Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian, telah mengadakan kegiatan-kegiatan Karang Taruna Kelurahan dan pemerintah memberikan gedung Sasana Krida Karang Taruna, yang dapat digunakan untuk kegiatan olah raga karate, pencak silat, kesenian dan lain sebagainya.²⁰⁾

Dengan demikian jelas bahwa untuk pelaksanaan Pelita di bidang pemerintahan Kelurahan Menteng Atas berjalan sangat lancar, tanpa ada hambatan-hambatan yang berarti.

6. Di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Pelaksanaan Pelita di daerah Kelurahan Jagakarsa, berjalan lancar Pemerintah tidak mendapat hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pembangunan di wilayahnya.

Sekalipun wilayah Kelurahan Jagakarsa merupakan daerah pedesaan, namun kesadaran masyarakat untuk membangun desanya cukup tinggi. Pelaksanaan Pelita di bidang pemerintahan desa adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan masyarakat yang bertujuan untuk menyadari dan memahami tentang arti dan manfaat pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, masyarakat akan mau menerima perubahan-perubahan yang akan ditimbulkan akibat adanya pembangunan.

Dengan cara itulah, maka pelaksanaan Pelita sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik, sekalipun belum mencapai hasil yang semaksimal mungkin.

Luas wilayah Kelurahan Jagakarsa 576.247 ha yang terdiri dari 396.247 ha tanah milik dan tanah negara 180.000 ha. Jumlah penduduk sampai dengan 31 Maret 1981 tercatat:

a. Warga Negara Indonesia	14.113 jiwa.
b. Warga Negara Asing	7 jiwa.
Jumlah	14.120 jiwa.

20) Laporan Tahunan Kelurahan Menteng Atas dalam Pembinaan wilayah Kelurahan, Tahun 1981, hal. 3, 8 - 10.

Atas dasar perhitungan antara luas wilayah dan jumlah penduduk di atas, maka angka kepadatan penduduk di wilayah Kelurahan Jagakarsa dalam tahun 1980/1981 adalah 2850 jiwa per Km².

Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah bertani. Sistem pertanian yang dipraktekkan adalah sistem pertanian terpadu yakni dengan areal tanah yang semaksimal mungkin tetapi bisa menghasilkan semaksimal mungkin. Pemerintah berusaha mendorong dan mengembangkan usaha pertanian tersebut dengan cara membentuk penyediaan perlengkapan untuk perikanan, peternakan maupun perkebunan.

Di Wilayah Kelurahan Jagakarsa, pelaksanaan Pelita dalam bidang pemerintahan pedesaan tetap memperhatikan dan memelihara kondisi lingkungan yang sehat, sehingga sejak tahun 1974 telah berdiri Puskesmas dan ditambah pos-pos kesehatan pada tiap-tiap Rukun Warga.

Pemerintah berusaha keras memberantas buta huruf dan mencegah adanya anak-anak putus sekolah, maka dengan cepat dibangun gedung-gedung sekolah. Meskipun sebelum Pelita, belum terdapat sekolah dasar, tetapi pada saat ini telah berdiri gedung-gedung sekolah yang cukup memadai. Perincian sekolah-sekolah yang ada di wilayah kelurahan Jagakarsa adalah sebagai berikut:

No.	Sekolah	Jumlah	Murid	Guru	Keterangan
1.	S D	12	2.238	74	
2.	S L P	1	640	26	
3.	S L A	2	683	41	
4.	Madrasah	4	569	27	
5.	Akademi	—		—	
6.	Perg. Tinggi	—	—	—	

Proyek-proyek swadaya masyarakat dalam tahun kerja 1980/1981 LKMD/K Kelurahan Jagakarsa telah melaksanakan 5 (lima) buah proyek swadaya murni dan 4 (empat) buah proyek campuran, yang

meliputi proyek inpres jalan, proyek sarana pendidikan non formal dan proyek sarana peribadatan.²¹⁾

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Pelaksanaan Pelita di wilayah Kelurahan Jelambar dalam bidang pemerintahan desa berjalan baik dan lancar. Faktor-faktor hambatan yang ditimbulkan, hanya pada tahap permulaan, di mana kurangnya pengertian masyarakat akan maksud dan tujuan Pelita, namun akhirnya dapat diatasi dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga timbul rasa kesadaran akan pentingnya pembangunan daerah lingkungan pedesaan.

Keadaan wilayah yang pada mulanya sering tergenang air yang melimpah dari kali maupun rawa-rawa dan empang, setelah Pelita berjalan baik, dapat diatasi dengan cara meninggikan jalan-jalan melalui proyek Mohammad Husni Thamrin. Dari Proyek ini telah dapat diciptakan daerah pemukiman yang sehat dan harmonis, karena di samping jalan-jalan telah dibangun juga disediakan bak-bak sampah, gerobak sampah, di samping proyek-proyek sarana keagamaan mushola, mesjid dan gereja.

Melalui pembangunan swadaya murni masyarakat berperan serta secara aktif dalam membangun, sehingga dapat dibangun oleh pemerintah di atas tanah yang disediakan oleh masyarakat berupa bangunan gedung-gedung sekolah dan puskesmas. Ditinjau dari kegunaan tanah wilayah Kelurahan Jelambar tidak mengalami perubahan. Luas Wilayah 561,27 ha, yang dapat diperinci kegunaannya sebagai berikut:

Tanah Perumahan	:	250	ha
Tanah Industri	:	150	ha
Tanah kosong/sawah	:	10	ha
Tanah lain-lain	:	141,27	ha

Tentang kependudukan berdasarkan sensus Penduduk tahun 1980, jumlah penduduk Kelurahan Jelambar, sampai pada tanggal 1 April 1981 mencapai 100.531 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

21) Laporan Tahunan Pembinaan wilayah Kelurahan Jagakarsa tahun 1980/1981. – hal. 11 – 17.

- a. Warga Negara Indonesia99.538 jiwa.
- b. Warga Negara Asing 993 jiwa.

Prosentase penduduk menurut mata pencaharian :

- Pegawai Negeri/Buruh/Karyawan70%.
- Pengusaha/pedagang25%.
- A B R I 3%.
- Lain-lain 2%.

Laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jelambar ini sangat pesat, sejak tahun 1974 sampai dengan 1 April 1981 dapat diketahui sebagai berikut:

Tahun	1974/1975	:	62.600 jiwa
Tahun	1975/1976	:	65.179 jiwa
Tahun	1976/1977	:	69.026 jiwa
Tahun	1977/1978	:	70.736 jiwa
Tahun	1978/1979	:	75.804 jiwa
Tahun	1979/1980	:	75.416 jiwa
Tahun	1980/1981	:	100.531 jiwa.

Sebab-sebab dari pertumbuhan penduduk ini terutama adalah: Adanya komplek-komplek perumahan yang baru termasuk Real Estate.

Kelahiran (prosentasenya masih tinggi)

Pindahan sebagai penampungan dari tempat yang terkena pembongkaran atau bencana alam (kebakaran, banjir).

Dalam bidang pendidikan, pemerintah berusaha keras mengusahakan penambahan gedung-gedung sekolah, baik yang dibangun secara swadaya masyarakat maupun oleh pemerintah. Melalui LKMD (K) telah berhasil membebaskan tanah serta menyerahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dibangun sekolah. Adapun jumlah tempat pendidikan yang ada di Kelurahan Jelambar sampai dengan 1 April 1981 adalah sebagai berikut:

Taman Kanak-kanak (swasta)	:	18 buah
S D Negeri	:	24 buah
S D Swasta	:	12 buah

S L P	Negeri	:	2 buah
S L P	Swasta	:	4 buah
S L A	Swasta	:	4 buah
Madrasah		:	16 buah
Perguruan Tinggi		:	1 buah

Jumlah anak didik ada 10.896 orang dan tenaga guru 492 orang.

Pemerintah berusaha untuk menghidupkan swadaya masyarakat di berbagai bidang. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, melainkan juga dalam bidang perekonomian, seperti usaha peternakan untuk mengatasi masalah daging dan telur. Ternyata usaha ini mengalami kesulitan, karena sejak tahun 1970 sampai sekarang belum dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan hewan-hewan seperti kambing dan ayam telah dicoba untuk dikembangkan banyak yang mati. Ada kemungkinan dari faktor iklim dan lingkungan kurang cocok bagi hewan-hewan tersebut. Akhirnya pemerintah mengalihkan usahanya untuk menunjang swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang industri rumah yakni pembuatan tempe, tahu, oncom dan toge.²²⁾

8. Di Kelurahan Jembagan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Pelaksanaan Pelita di wilayah Kelurahan Jembagan Lima berjalan agak lambat, karena belum adanya penerangan atau bimbingan dan penyuluhan yang cepat dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta yang aktif dalam pembangunan. Faktor yang menghambat adalah sangat rendahnya dasar pendidikan dan perekonomian sebagian besar penduduk di Kelurahan Jembagan Lima. Penduduknya sebagian besar adalah penduduk musiman yang berasal dari Banten. Merupakan buruh tidak tetap dan hanya sebagian kecil hidup dari berdagang.

Sejak terbentuknya Kelurahan Jembagan Lima yang merupakan pecahan dari Kelurahan Angke Duri Kecamatan Krukut dan sekarang termasuk Kecamatan Tambora sejak tahun 1969 hingga kini telah mendapat Proyek Perbaikan Kampung (MHT), namun hasilnya be-

22) *Laporan Kegiatan Pembinaan Wilayah Kelurahan Jelambar*, tahun 1981, hal: 21; 27.

lum memenuhi persyaratan lingkungan sehat. Bangunan tempat tinggal atau daerah pemukimannya masih sederhana, sedangkan di sepanjang Jalan Pangeran Tubagus Angke dan Jalan K.H.M. Mansyur terdapat tempat usaha yang belum kelihatan teratur, karena berdekatan dengan perkantoran.

Kemudian tentang penempatan daerah perindustrian masih belum menunjukkan keseimbangan, karena perindustrian besar lebih menonjol dan menempati daerah-daerah strategis di tepi jalan-jalan utama, sedangkan industri kecil atau kerajinan tangan yang berupa pembuatan sepatu, pakaian anak-anak, belum terbina dengan baik dan hanya menempati pada daerah pemukiman atau rumah tempat tinggal penduduk.

Adapun perbandingan penggunaan bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Bangunan Perumahan	: 75%.
Bangunan Industri/Gudang	: 10%.
Bangunan Perkantoran	: 10%.
Lain-lain	: 5%.

Mengenai status penggunaan tanah terdiri dari :

Tanah Milik	: 14,015 ha.
Tanah Negara	: 27,030 ha.
Lain-lain	: 9,000 ha.

Wilayah Kelurahan Jembatan Lima dikategorikan sebagai wilayah urbanisasi, di samping itu bila diselidiki dari catatan sejarah perkembangan kota Jakarta, maka wilayah Kelurahan Jembatan Lima termasuk bagian dari kota lama. Oleh karena itu sesuai dengan garis kebijaksanaan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayah Kelurahan Jembatan Lima mendapat prioritas proyek perbaikan kampung sejak Pelita I tahun 1969/1970, karena pada waktu itu keadaannya masih sangat menyedihkan, tidak teratur dan belum ada keserasian sebagai daerah perkotaan.

Untuk kependudukan, sebenarnya di wilayah ini berbeda dengan daerah-daerah kelurahan lainnya. Apabila di wilayah kelurahan lain banyak mengalami penambahan penduduk, tetapi di daerah Kelurahan Jembatan Lima justru sebaliknya bahwa penduduk di daerah ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena memang penduduk

di daerah ini sebagian besar hanya buruh musiman yang sebentar-sebentar pindah atau pulang ke kampung asal mereka.

Di bawah ini dapat diketahui tentang perbedaan angka-angka jumlah penduduk selama periode April 1979 sampai dengan Maret 1980 adalah sebagai berikut:

Datang	:	449 jiwa	Pergi	:	846 jiwa
Lahir	:	424 jiwa	Mati	:	164 jiwa
Jumlah	:	873 jiwa	Jumlah	:	1.010 jiwa
Selisih	=	137 jiwa.			

Keadaan penduduk pada akhir bulan Maret 1979 dan akhir bulan Maret 1980 sebagai berikut:

Maret 1979	:	Laki-laki	:	11.887 jiwa
		Perempuan	:	9.168 jiwa
		J u m l a h	=	21.505 jiwa
Maret 1980	:	Laki-laki	:	11.820 jiwa
		Perempuan	:	9.548 jiwa
		J u m l a h	=	21.368 jiwa
Selisih	:	127 jiwa.		

Angka kepadatan penduduk tercatat 425 per ha.

Untuk memudahkan pengurusan warga, wilayah Kelurahan Jembatan Lima dibagi menjadi 8 wilayah Rukun Warga dan 110 Rukun Tangga. Dalam rangka pembinaan koordinasi/pengawasan secara aktif terhadap organisasi RT/RW telah diadakan suatu bimbingan khusus dalam bidang fungsi LKMD (K), administrasi, swadaya masyarakat dan petunjuk-petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas/hak kewajiban keamanan, kebersihan dan pembinaan lingkungan.^{2 3})

23) *Progress Refort Peminbaan Wilayah Kelurahan Jembatan Lima tahun 1980*, hal. 2 ; 4.

9. Di Kelurahan: Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Pelaksanaan Pelita di daerah Kelurahan Tegal Alur tidak mengalami hambatan, karena partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup besar.

Sebelum Pelita penduduknya sangat sedikit, kurang lebih hanya 9.000 jiwa, namun mempunyai kesadaran tinggi untuk meningkatkan perbaikan lingkungan. Pemerintah melalui LKMD (K)-nya dapat menggerakkan penduduknya untuk membangun desanya, dan terutama untuk melaksanakan Perda No. 3/1972 tentang program kebersihan lingkungan. Kemudian setelah masuknya proyek Mohammad Husni Thamrin dengan cepat, terjadi perubahan-perubahan yang menuju ke arah terciptanya daerah pemukiman yang sehat dan harmonis. Penyuluhan Pemerintah dapat dilaksanakan dengan segala bentuk yang meliputi kesehatan, program KB, ketrampilan melalui kursus-kursus yang menuju ke arah swadaya maupun wiraswasta. Maka dalam pelaksanaan Pelita I dan II telah dapat menghasilkan perbaikan di segala bidang. Antara lain dalam bidang pendidikan telah berhasil mendirikan gedung-gedung sekolah negeri, maupun swasta, baik tingkat SLP maupun SLA.

Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah berusaha menciptakan adanya industri kecil, sehingga sampai saat ini (Pelita III), tidak ada lagi pengangguran.

Industri kecil di daerah ini bergerak dalam bidang pembuatan kerajinan tangan, membelair dan jahit menjahit.

Dengan adanya pembinaan industri kecil tersebut, maka faktor perekonomian masyarakat yang pada mulanya bertaraf rendah dapat meningkat lebih tinggi dan banyak pula yang merubah cara hidup agraris menjadi pedagang dan pegawai negeri.

Pembangunan dalam bidang pembinaan mental, pemerintah berusaha menciptakan sarana-sarana peribadatan yang berupa pembangunan mesjid, mushola, sehingga terjadi keseimbangan antara kondisi dan situasi pembinaan proyek fisik dengan pembinaan mental spiritual. Proyek fisik meliputi gedung-gedung sekolah, jalan-jalan kendaraan, jalan orang, jalan setapak dan lain sebagainya, dan proyek non fisik berupa pembinaan mental spiritual dan mental ketahanan fisik telah dapat dilaksanakan dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan umum,

maupun pendidikan kerokhanian. Dengan cara itu ternyata usaha untuk menghilangkan atau memberantas buta huruf dapat berhasil dan menghilangkan pula anak-anak putus sekolah, di samping mendapat pula bekal dalam bidang pembinaan rokhani. Pelaksanaan Pelita untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.²⁴⁾

Sebagai contoh dapat pula kami tuliskan kelurahan lain di Wilayah Jakarta Selatan, yaitu Kelurahan Mampang Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Wilayah Jakarta Selatan.

Pelaksanaan Pelita di wilayah Kelurahan Mampang Tegal Parang tidak mengalami hambatan. Pemerintahan Kelurahan Mampang Tegal Parang telah tersusun organisasi secara teratur dengan susunan sebagai berikut:

1. L u r a h
2. Wakil Lurah
3. Babinsa / Binmas
4. Sub. Sie I/Pemerintahan
5. Sub Sie II/Kamtib
6. Sub. Sie III/Kesra
7. Sub. Sie IV/Tata Usaha/Keuangan
8. Sub. Sie V / Pembangunan Desa

Pada mulanya di daerah ini belum terdapat jalan besar, karena hanya merupakan jalan desa. Dan masih merupakan daerah perkembunan buah-buahan. Penduduknya statis tradisional dengan sistem penghidupan agraris. Banyak empang dan pohon-pohon rindang, sehingga keadaan sangat sejuk.

Kemudian setelah Pelita, mulailah ada pembangunan yang meliputi daerah pemukiman, sarana angkutan berupa jalan raya, dan sarana pendidikan. Tidak lama kemudian daerah Kelurahan Mampang Tegal Parang menjadi ramai dan termasuk daerah perkotaan yang mempunyai hubungan dari pusat Ibukota ke daerah Kebayoran dan ke tempat pariwisata yakni Kebun Binatang Ragunan.

Dalam waktu singkat sarana-sarana pendidikan, angkutan dan pasar cepat berkembang, sehingga usaha untuk merubah sikap men-

24) Wawancara dengan Usin Makyen, *Loc. cit.*

tal yang apatis tradisional dengan mudah menjadi cara berpikir masyarakat yang dinamis rasional.

Cara hidup yang agraris cepat berubah menjadi home industri, pegawai negeri maupun pedagang. Dengan adanya sekolah-sekolah yang cukup memadai, maka anak-anak usia belajar dapat tertampung, yang berarti dapat mengurangi anak-anak yang putus sekolah. Pada Pelita I telah membangun 1 (satu) buah Sekolah Dasar, 3 (tiga) buah Sekolah Dasar Inpres yakni SD 70, SD 77, SD 79 dan 1 (satu) buah SMP 104 di Jalan Buncit 10. Jalan Inpres Buncit 4, dan jalan menuju SMP. Kemudian juga dibangun 1 (satu) buah Madrasah, 1 (satu) buah mesjid dan SDI, dibangun dengan biaya Pelita tahun 1970. Proyek MHT dengan biaya Pelita tahun 1978 dan SMA 28 dibangun di atas tanah rakyat. Untuk Kantor Kelurahan masih mengontrak sampai tahun 1982 dengan bangunan swadaya.

Pelaksanaan Pelita di bidang pemerintahan desa, juga memberikan penyuluhan/pendidikan kepada masyarakat tentang pembinaan wiraswasta dalam bidang jahit menjahit, sehingga terbentuk Usaha Bersama Konvekasi Tegal Parang yang disingkat Kopersit. Usaha bersama ini telah mendapat pendidikan langsung dari Ditjen Perindustrian dan mengenai pembiayaannya sepenuhnya dari Ditjen Perindustrian. Pada Pelita II dan III telah terdapat peningkatan dengan pesat sampai menjadi 15 kelompok yang tergabung menjadi satu ikatan dan telah mempunyai mesin jahit, mesin obras dan modal 24 juta rupiah.²⁵⁾

Kemudian dalam bidang perekonomian, pemerintah telah mengadakan bimbingan kepada masyarakat dalam bentuk ceramah-ceramah dan bantuan sarana peribadatan.

C. HASIL-HASIL YANG DIPEROLEH

Program perbaikan pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dilaksanakan selama dua Pelita yakni Pelita I dan II, sedangkan pada Pelita III baru dalam tahap awal. Tujuan utamanya adalah menciptakan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik bagi sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan/perkampungan wilayah Jakarta.

25) Hasil wawancara dengan Bapak A.Ridwan (Lurah Mampang Tegal Parang) dan staf Kelurahan pada bulan September 1981 di Kantor Kelurahan Mampang Tegal Parang.

Pencapaian tujuan yang ditempuh pada mulanya dengan melaksanakan perbaikan/pembangunan sarana-sarana dasar pada kampung-kampung yang berada di tengah-tengah daerah perkotaan yang keadaannya buruk sekali. Daerah-daerah yang keadaan demikian tersebut tidak terlalu banyak terdapat di daerah perkotaan. Oleh karena itu dalam waktu yang singkat perbaikan/pembangunan di daerah perkotaan telah selesai, sehingga sasaran selanjutnya mengadakan pembangunan secara besar-besaran dengan mengadakan perluasan daerah perkotaan dengan cara merubah pedesaan yang penuh dengan rawa-rawa, empang dan lain sebagainya ditimbun dan dibuat jalan baru serta dikeraskan dengan batu-batu dan diaspal.

Daerah pemukiman diperluas dan dibuat perkaplingan, serta dilengkapi berbagai sarana yang meliputi sarana pendidikan, sarana angkutan, sarana industri dan pasar.

Program ini berkembang ke arah penyediaan lebih banyak sarana umum yang perlu bagi terciptanya masyarakat yang dinamis, kreatif serta bermental dan kondisi fisik yang semakin baik seperti sekolah, Puskesmas, jamban dan lain-lain.

Dibandingkan dengan Pelita I pelaksanaan perbaikan pedesaan dalam Pelita II jauh lebih maju, baik ditinjau dari segi organisasi, perencanaan, kualitas pekerjaan maupun sarana yang disediakan. Dalam Pelita II penanganan program ini dilaksanakan oleh suatu badan yang disebut Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Mohammad Husni Thamrin Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (Bappen PMHT). Sebagai perbandingan dapat dicatat hal-hal sebagai berikut:

Pada Pelita I sebagai pimpinan proyek adalah Camat setempat di mana perbaikan pedesaan/perkampungan berada. Pimpinan proyek ini dibantu oleh dinas-dinas sektoral sebagai pelaksana teknis. Dengan demikian dalam satu tahun pimpinan proyek berada pada tangan beberapa orang yang dibantu oleh pelaksana teknis masing-masing wilayah.

Pada Pelita II pimpinan proyek diletakkan pada satu tangan yakni penanggung jawab Bappen PMHT sendiri, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terkoordinir dalam satu saja. Kemudian dalam segi pembiayaannya pada Pelita I ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui APBD, sedangkan pada Pelita II Pembiayaan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendapat bantuan pinjaman dari Bank

Dunia, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan cepat. Kebijakan untuk menerima bantuan pembiayaan ini dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan perbaikan kampung, karena apabila Proyek MHT ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka penyelesaiannya diperkirakan akan jauh lebih lama, karena kurangnya dana yang tersedia.

Secara langsung maupun tidak langsung perbaikan perkampungan secara nyata memberi efek pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui peningkatan lingkungan dan kualitas hidup. Diperkirakan bahwa lebih dari 60% penduduk Jakarta berdiam pada daerah-daerah pedesaan/ perkampungan dan pemukiman yang keadaannya jelek, karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak harmonis. Dari segi pelaksanaan fisik terdapat pula peningkatan yang besar, sebagaimana tercantum dari tabel berikut. Lebih lanjut pelaksanaan Pelita I dibandingkan dengan Pelita II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PELITA I PMHT

Tahun	Jumlah Kampung	Luas	Jumlah Penduduk	B i a y a
'69/70	5 buah	126,11 ha	75.906 jiwa	491.034.000,—
'70/71	20 buah	643,91 ha	305.125 „	984.128.000,—
'71/72	16 buah	559,10 ha	257.125 „	1.402.387.000,—
'72/73	29 buah	635,28 ha	331.466 „	1.705.693.000,—
'73/74	19 buah	430,30 ha	208.285 „	1.892.851.000,—
Jlh :	89 buah	2.394,70 ha	1.177.907 „	6.476.093.000,—

PELITA II P M H T

Tahun	Jumlah Kampung	Luas	Jumlah Penduduk	Biaya
'74/75	53 bh	1.140 ha	515.500 jiwa	8.129.499.000,—
'75/76	24 bh	1.154 ha	250.000 jiwa	9.833.650.000,—
'76/77	59 bh	1.320 ha	488.903 jiwa	13.346.297.000,—
'77/78	47 bh	1.038,5 ha	347.186 jiwa	9.880.626.000,—
'78/79	58 bh	1.106,5 ha	305.028 jiwa	15.950.092.000,—
Jlh :	241 bh	5.769 ha	1.906.617 jiwa	55.140.164.000,—

Dari tabel di atas terlihat besarnya peningkatan pelaksanaan yang dilakukan, baik volume fisik maupun besarnya biaya. Pada Pelita II beberapa proyek yang dilaksanakan pada Pelita I ditiadakan, karena proyek-proyek tersebut ternyata kurang berdaya guna, atau oleh karena proyek tersebut telah dilaksanakan oleh sektor lain. Sebaliknya pada Pelita II ada beberapa jenis proyek lain ditambahkan. Hal ini tidak lain untuk melengkapi sarana-sarana yang dibangun untuk peningkatan standard lingkungan hidup yang semakin baik.

Penyebaran perbaikan jauh lebih besar pada Pelita II, hal ini jelas terlihat pada jumlah kampung serta luas areal yang diperbaiki meningkat, demikian pula perkiraan banyaknya orang yang menikmati perbaikan tersebut jauh lebih besar.

Hasil yang diperoleh pelaksanaan pada Pelita I, dan II lebih dari 60% penduduk Jakarta (jumlah penduduk permulaan Pelita II) telah mengalami perbaikan lingkungannya dan lebih kurang 14% dari luas seluruh Jakarta (sebelum pembulatan) telah diperbaiki atau lebih kurang 21% dari daerah terbangun (sebelum pembulatan) telah diperbaiki melalui perbaikan perkampungan.

Walaupun demikian diperkirakan masih ada tempat pemukiman yang belum memenuhi sarana-sarananya sebagai suatu lingkungan hidup. Daerah-daerah ini diperhitungkan seluas 3.970 ha ha lagi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sendiri pada tahun 1973. Berdasarkan hasil penelitian suatu lembaga

pendidikan tinggi negeri 1977, diperoleh kesimpulan bahwa perpindahan hak atas tanah ataupun milik lainnya dari penduduk ke orang-orang baru sesudah perbaikan kampung sangat kecil artinya. Dengan kata lain tidak terdapat perpindahan penduduk secara wajar saja, antara lain pindah rumah karena habis masa kontraknya. Dengan demikian dapat dikatakan, dengan segala kekurangan yang ada tujuan perbaikan perkampungan telah mencapai sasarannya.

Dalam usaha Pemerintah untuk menyediakan perumahan rakyat sederhana, sehat, layak dan dapat terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat telah mendapat perhatian sewajarnya dari pemerintah dalam batas-batas kemampuan yang ada. Pengadaan perumahan yang layak dilaksanakan selama ini bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih belum mencukupi. Kebijakan dan langkah-langkah yang diambil lebih banyak bertitik tolak pada pelaksanaan program perbaikan kampung, program penertiban daerah perumahan/pemukiman termasuk pemukiman kembali bagi warga kota yang kena penertiban, yang jangkauan manfaatnya dapat dinikmati umum yang lebih besar.

Usaha penyediaan perumahan rakyat tersebut ditunjang pula oleh pihak swasta dengan adanya *Real Estate*, Badan-badan Otorita yang diberi kewenangan pengembangan wilayah kota untuk membangun pemukiman yang lengkap. Selama Pelita II pengadaan perumahan melalui Badan Otorita ini sebanyak 3.574 buah rumah. Namun karena sedemikian rendahnya tingkat pendapatan masyarakat banyak, akhirnya sedikit sekali masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjangkaunya, hal ini dapat dilihat pada perkampungan/perumahan nelayan Muara Angke.²⁶⁾

Dalam program pemekaran kota, telah terlihat daerah-daerah pedesaan yang terletak di daerah pinggiran dan perbatasan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Jawa Barat ikut pula dimasukkan ke wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan demikian pelaksanaan Pelita di daerah-daerah pedesaan tersebut, dilaksanakan dengan secara besar-besaran dan memakan biaya besar, karena di daerah ini tentu banyak sarana-sarana yang meliputi berbagai bidang harus disediakan. Misalnya jalan kendaraan, pemukiman baru lengkap dengan sarana kesehatan, sarana pendidikan dan sebagainya.

26) Buku I, *log. cit*, hal. 101 – 106.

Pembangunan perumahan murah dan sederhana yang dibangun melalui Perumnas banyak terletak di pinggiran kota. Dengan demikian juga akan berakibat adanya perubahan masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Perumnas yang berlokasi di Duren Sawit, Klender, dan Depok sudah jelas akan menjadikan daerah tersebut berubah menjadi daerah pemukiman yang sehat dan harmonis. Sedangkan pengadaan sarana lingkungan seperti sekolah, puskesmas, pasar lingkungan dan tempat peribadatan sudah pasti akan disediakan pula dalam membangun perumahan murah tersebut.

Di bidang pemerintahan desa, tiap-tiap kelurahan di Jakarta sudah memiliki:

1. Kantor Kelurahan
2. Balai Pertemuan
3. Penataran tentang administrasi pemerintahan dilakukan secara rutin
4. Persyaratan pendidikan untuk jabatan Lurah dan stafnya telah distandarkan.

Di bawah ini dapat diambilkan beberapa daerah pedesaan yang telah memperoleh pembangunan selama Pelita I sampai sekarang:

1. **Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur**

Hasil-hasil yang diperoleh dalam Pelita adalah:

- a. Keadaan lingkungan yang pada mulanya merupakan sawah, rawa-rawa serta keadaan jalan yang sama sekali tidak teratur dan tidak beraspal, pada saat ini (permulaan Pelita III), telah berubah menjadi daerah perkotaan, listrik sudah terpasang dan keadaan lingkungan pemukiman telah teratur dan ada perkaplingan serta memenuhi persyaratan kesehatan.
- b. Sebelum Pelita sebagian besar penduduk masih buta huruf, pada saat ini telah berubah sama sekali, bahkan dikatakan masyarakat sebagian besar telah terpelajar, karena di wilayah ini telah berhasil dibangun gedung-gedung sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
- c. Tarap hidup masyarakat dapat ditingkatkan menjadi lebih baik, dan berubah pula sikap hidup statis tradisional menjadi dinamis rasional secara cepat.

- d. Hasil-hasil yang secara nyata dapat dilihat adalah:
 - Bangunan pasar ada 4 buah.
 - Bangunan Puskesmas ada 3 buah.
 - Pos-pos Kesehatan
 - Rumah Sakit
 - Poliklinik
 - Tidak ada lagi jalan yang becek
 - Bangunan sekolah Dasar Negeri ada 18 buah
 - Bangunan sekolah/madrasah ada 26 buah
 - Bangunan sekolah/lanjutan (SLP/SLA) 26 buah
 - Perguruan Tinggi 3 buah
 - Taman Kanak-kanak 21 buah.²⁷⁾

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Hasil-hasil yang dapat diperoleh dalam Pelita adalah:

- a. Wilayah Kelurahan Penggilingan termasuk dalam kawasan Industri Pulo Gadung, sehingga tidak banyak pembangunan lingkungan daerah pemukiman, namun pembangunan jalan kendaraan berhasil dilaksanakan sehingga memudahkan komunikasi dengan daerah perkotaan, yang berakibat adanya perubahan cara berpikir yang statis tradisional menjadi dinamis rasional, meskipun belum secara keseluruhan.
- b. Proyek sarana pendidikan telah dapat dibangun 4 buah Sekolah Dasar.
- c. Pembuatan jalan baru di kampung Pisangan sepanjang 1 km, lebar 2,5 m, terletak di RW 02 dan 3.500 m, lebar 4 – 6m.
- d. Perubahan dalam mata pencaharian penduduk belum terjadi secara besar-besaran, mengingat di daerah ini belum tercipta daerah pemukiman yang sehat secara luas. Mata pencaharian penduduk sebagian besar masih tetap bertani, dan hanya sebagian kecil saja yang menjadi pegawai maupun pedagang.
- e. Adanya proyek *Real Estate*, sedikit banyak akan merubah suasana lingkungan dari keadaan pedesaan menjadi suasana yang

27) Hasil wawancara dengan M.Soleh Suprpto, *op.cit.*

harmonis, namun sampai kini belum banyak penghuni rumah-rumah Proyek *Real Estate* tersebut.²⁸⁾

3. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Hasil-hasil yang dapat diperoleh dalam Pelita adalah:

- a. Pada mulanya merupakan daerah rawa-rawa yang sering terjadi banjir, akibat tanahnya rendah, setelah Pelita banyak perubahan-perubahan, terutama yang ditimbulkan adanya Proyek Mohammad Husni Thamrin banyak dibangun jalan-jalan baru yang sudah dikeraskan dan diaspal, sehingga tidak ada lagi jalan yang becek.
- b. Daerah pemukiman yang sehat sudah banyak dibangun dan juga telah banyak perkaplingan, sehingga boleh dikatakan telah menjadi daerah perkotaan.
- c. Keadaan masyarakat pada masa kini lebih baik tarap kehidupannya karena yang pada mulanya hidup dari hasil pertanian dan industri kecil (mebelair) yang belum berkembang, pada saat sekarang industri kecil berkembang pesat dan tidak terdapat lagi daerah pertanian, karena telah habis menjadi daerah pemukiman.
- d. Penduduknya sebagian besar hidup dari hasil industri ringan, menjadi pegawai dan pedagang.
- e. Hasil-hasil yang dilihat dengan nyata adalah:
Adanya bangunan gedung Sekolah Dasar sebanyak 22 buah.
Bangunan gedung Sekolah Lanjutan sebanyak 6 buah SLP dan 3 buah SLA.
Madrasah 2 buah.
Puskesmas 1 buah.
Banyaknya home industri (meubelair).²⁹⁾

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Hasil-hasil yang diperoleh dalam Pelita adalah:

- a. Pada mulanya hanya merupakan daerah persawahan yang penuh

28) Wawancara dengan Bapak Abd. Hamid. *op.cit.*

29) Hasil wawancara dengan H.Arsyad Djamhari, *op.cit.*

dengan empang-empang, pohon buah-buahan dan penduduknya sebagian besar hidup dari hasil pertanian yang sangat sederhana, akhirnya berubah menjadi daerah perkotaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil sebagai pegawai Negeri, pedagang dan mampu berwiraswasta dengan home industri.

- b. Merobah cara berpikir statis tradisional, menjadi dinamis rasional. Hal ini disebabkan adanya jalan-jalan yang mudah dilalui kendaraan umum yang masuk ke wilayah Kelurahan Gandaria Utara, akibat adanya Proyek Mohammad Husni Thamrin.
- c. Terciptanya lingkungan daerah pemukiman dengan sarana yang sehat yang dilengkapi dengan sarana-sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana pasar dan listrik masuk desa, maka menimbulkan tarap kehidupan masyarakat lebih tinggi dan memperoleh ketentraman dan kenyamanan hidup bermasyarakat.

- d. Hasil-hasil yang dapat dilihat secara nyata ialah:

Adanya jalan kendaraan yang telah dikeraskan dan diaspal sepanjang 41.415 m, yakni jalan Radio Dalam.

Panjang jalan orang yang juga telah dikeraskan melalui Proyek MHT sepanjang 10.460 m.

Dibangunnya MCK 3 buah dan Hidrant 6 buah.

Gedung Sekolah Dasar 5 buah.

Gedung Sasana Krida Karang Taruna 1 buah.

Puskesmas 2 buah dan Pos Kesehatan 3 buah.³⁰⁾

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Hasil-hasil yang diperoleh dalam Pelita ialah:

- a. Daerah yang pada mulanya merupakan rawa dan sawah yang terkenal dengan nama Rawa Panjang, yang meliputi Rw.06, 07, 08, 09 dan kampung sawah yang meliputi Rw.01 dan sebagian dari Rw. 10, sekarang 80% menjadi daerah pemukiman yang sehat dan harmonis berkat adanya proyek MHT.
- b. Terjadinya perubahan sikap hidup yang apatis dan mata pencaharian bersifat agraris, menjadi dinamis aktif dan mempunyai

30) *Progress Report Pembinaan Wilayah Kelurahan Gandaria Utara; op.cit.*

mata pencaharian sebagai pegawai dan pedagang. Ini disebabkan karena adanya jalan kendaraan yang menghubungkan dengan pusat-pusat perindustrian dan pusat perkotaan.

- c. Keamanan dan ketentraman terjamin akibat adanya komunikasi yang mantap.
- d. Hasil-hasil yang secara nyata dapat dilihat adalah:
Pembangunan swadaya mushola Baitul Rahman di Rw. 03.
Pembuatan jalan setapak di Rw. 07.
Pembuatan kantor Rw. 09 dan Rw. 11.
Gedung Sekolah Dasar 27 buah.
Gedung Sekolah Lanjutan 8 buah.
Taman Kanak-kanak 4 buah dan
Madrasah 5 buah.³¹⁾

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Hasil-hasil yang diperoleh dalam Pelita ialah:

- a. Taraf hidup masyarakat tinggi, kesadaran bernegara meningkat, patuh pada peraturan/hukum yang ada.
- b. Sebagian besar penduduk tetap bertani, akan tetapi cara pengolahan daerah pertanian lebih intensip dan teratur, akibat adanya penyuluhan yang dilaksanakan secara teratur dari pemerintah.
- c. Akibat jalan-jalan yang teratur dan dikeraskan serta diaspal, maka memudahkan komunikasi dengan daerah-daerah lain, sehingga menimbulkan perubahan cara berpikir yang statis tradisional menjadi dinamis rasional, yang selalu dapat mengikuti perkembangan/situasi dan kondisi kehidupan daerah perkotaan.
- d. Keamanan dan ketentraman wilayah dapat terjamin, akibat adanya penerangan listrik masuk desa dan mudahnya komunikasi dengan penegak hukum.
- e. Hasil-hasil yang dapat dilihat dengan nyata adalah:
Proyek Inpres jalan Pepaya dengan pembebasan tanah dan tanaman/pohon buah-buahan telah dapat diselesaikan.

31) Laporan Pembinaan Wilayah Kelurahan Menteng Atas, *op.cit.*

Proyek Inpres jalan Kelapa Ijo, telah selesai pula sepanjang 9 x 3.000 meter.

Membangun gedung untuk konveksi jahit menjahit di Rt. 007/02.

Penyelesaian mesjid Al-Wiqoyah di Rt. 001/05

Membangun Mushola di Rt. 001/02

Membangun Mushola di Rt. 001/01

Membangun Mushola di Rt. 007/06

Gedung Sekolah 17 buah.³²⁾

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Hasil-hasil yang diperoleh dalam Pelita ialah:

- a. Dulu hanya merupakan tanah rawa-rawa dan sawah, kini menjadi perkampungan yang lengkap dengan sarana jalan kendaraan, jalan orang, penerangan, berkat adanya proyek MHT.
- b. Akibat adanya komunikasi dan transportasi yang lebih mudah dan landar, maka terjadi perubahan sikap hidup dari statis dan apatis menjadi dinamis aktif dan sebagian besar hidup dengan hasil sebagai pegawai dan pedagang.
- c. Tidak ada lagi kejahatan-kejahatan yang sulit diatasi, mengingat adanya kontrak komunikasi yang lebih mudah dengan aparat penegak hukum.
- d. Hasil-hasil yang secara nyata dapat dilihat adalah:

Bencana alam banjir dan kebakaran tidak lagi menjadi masalah yang sulit diatasi, mengingat daerahnya sudah teratur

Banyak gedung-gedung sekolah yang berhasil dibangun, sehingga pemberantasan buta huruf berhasil baik

Membangun gedung Sekolah Dasar 36 buah

Membangun gedung Sekolah Lanjutan 10 buah

Madrasah 16 buah

Taman Kanak-kanak 18 buah

Perguruan Tinggi 1 buah

Rumah Sakit 3 buah

Puskesmas 3 buah³³⁾

32) Laporan Tahunan Pembinaan Wilayah Kelurahan Jagakarsa; *op.cit.*

33) Laporan Kegiatan Pembinaan Wilayah Kelurahan Jelambar; *op. cit.*

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Hasil-hasil yang diperoleh dalam Pelita ialah:

- a. Daerah yang pada mulanya tidak teratur, becek, rawa-rawa, empang-empang, dan kebon kelapa, sekarang banyak yang dijadikan daerah pemukiman dengan dilengkapi sarana jalan kendaraan, jalan orang dan daerah industri besar.
- b. Sekalipun belum tercipta daerah pemukiman dengan lingkungan yang sehat dan harmonis sampai pada saat permulaan Pelita III ini, mengingat penduduknya sebagian besar adalah penduduk musiman, namun ditinjau dari segi ekonomi, sudah menunjukkan ada kemajuan, karena ada home industri yang terbina dengan baik.
- c. Dalam segi keamanan dan ketentraman wilayah Kelurahan Jembatan Lima, telah dapat diatasi. Tidak lagi terjadi kejahatan-kejahatan seperti sebelum Pelita, karena sudah ada kontrak komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dengan penegak hukum.
- d. Hasil-hasil yang dapat dilihat secara nyata adalah:
Pelebaran jalan Tb. Angke
Membangun hidrant 39 buah
Membangun mesjid/mushola dalam jumlah besar (2 mesjid dan 32 buah mushola)
Membangun gedung Sekolah Dasar 15 buah
Membangun gedung Sekolah Lanjutan 3 buah.³⁴⁾

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Hasil-hasil yang diperoleh dalam Pelita ialah:

- a. Keadaan wilayah kelurahan pada mulanya kurang terpelihara dan kecerdasan masyarakat sangat rendah, akhirnya dapat ditingkatkan, baik mengenai daerah pemukimannya maupun tingkat kecerdasan masyarakatnya

34) Progress Report Pembinaan Wilayah Kelurahan Jembatan Lima; *op. cit.*

- b. Bangunan gedung-gedung sekolah diperbanyak, pada waktu sebelum Pelita banyak anak usia belajar tidak dapat tertampung di sekolah, pada saat ini bahkan sebaliknya bahwa gedung sekolah kekurangan murid
- c. Dahulu banyak terjadi pengangguran dan perekonomian masyarakat sangat rendah, pada saat ini tidak ada lagi pengangguran untuk angkatan kerja .
- d. Hasil-hasil yang dapat dilihat dengan nyata adalah:
 Jalan-jalan kendaraan dan orang telah diperkeras dan diaspal, melalui proyek MHT.
 Membangun gedung Sekolah Dasar sebanyak 15 buah
 Membangun gedung Sekolah Lanjutan sebanyak 3 buah.³⁵⁾

Sebagai perbandingan dilihat pula pada kelurahan lain di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu:

10. Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur

Hasil-hasil yang diperoleh dalam Pelita ialah:

- a. Wilayah Kelurahan Lubang Buaya, pada mulanya penuh dengan pohon-pohon yang banyak menghasilkan buah-buahan yang hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Tetapi setelah Pelita mata pencaharian penduduk berubah sebagian besar hidup sebagai pegawai dan pedagang.
- b. Dibangun jalan besar yang menghubungkan daerah perkotaan, yang sekarang sangat ramai karena lokasinya berdekatan dengan Taman Miniatur Indonesia Indah.
- c. Akibat ada jalan besar, maka banyak rumah-rumah penduduk yang sudah permanen.
- d. Hasil-hasil yang dapat dilihat dengan nyata adalah:
 Pembukaan jalan lingkungan di setiap Rw.
 Bangunan kantor Rw. 02.
 Bangunan mesjid sebanyak 2 buah.
 Bangunan mushola sebanyak 30 buah.
 Bangunan gedung madrasah sebanyak 5 buah.

35) Wawancara dengan Drs. Zainuddin; *op. cit.*

Gedung Sekolah Dasar sebanyak 11 buah.
Puskesmas 1 buah.
Gedung Sekolah Lanjutan Pertama 2 buah.
Gedung Sekolah Lanjutan Atas 2 buah.
Taman Kanak-kanak 3 buah.³⁶⁾

D. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENUNJANG PELAKSANAAN PELITA

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pelita di daerah pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta banyak ditimbulkan dari berbagai masalah. Namun kesemua masalah tersebut akhirnya dengan mudah dapat diatasi, meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang terpaksa dirugikan.

Daerah-daerah pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini sebenarnya tidak selamanya akan berstatus pedesaan, karena dengan kenyataan bahwa dalam waktu yang relatif singkat daerah pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dirubah menjadi daerah perkotaan. Hal ini mengingat Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, yang selalu harus berkembang untuk mengikuti perkembangan perkotaan seperti di negara-negara lain.

Kemudian mengenai faktor penduduk, ternyata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sangat pesat pertambahan penduduknya, sehingga mau tidak mau akan memerlukan tempat tinggal yang merupakan daerah pemukiman baru. Faktor-faktor pertambahan penduduk ini disebabkan dari berbagai sebab, antara lain:

1. Kota Jakarta mempunyai daya tarik sebagai Ibukota Negara, maka banyak kemungkinan-kemungkinan yang dapat diambil manfaatnya di Jakarta, sehingga banyak penduduk yang datang ke Jakarta dengan alasan untuk mencari pekerjaan, meningkatkan pengetahuan/belajar, mengembangkan ketrampilan, usaha/dagang dan sebagainya.
2. Kelahiran secara alamiah.
3. Pusat Pemerintahan, maka banyak kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan daerah-daerah, sehingga banyak pula

36) Laporan Kegiatan Pembinaan Wilayah Kelurahan Lubang Buaya, Tahun 1980/ - 1981, hal. 11.,

orang-orang terpaksa pindah ke Jakarta dengan cara pemutusan pegawai.

4. Hubungan dengan luar negeri, maka banyak perwakilan-perwakilan atau Corp Diplomatik yang berdiam di Jakarta.

Akibat pesatnya penambahan penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut, maka perlu adanya pembukaan/pelebaran wilayah kota Jakarta, yang mengakibatkan daerah-daerah pedesaan di pinggiran kota dijadikan daerah pemukiman yang sehat dan memiliki berbagai sarana untuk menunjang kehidupan masyarakat.

Akibat lain yang ditimbulkan dari tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah pertumbuhan angkatan kerja yang relatif tinggi pula. Sehubungan dengan hal tersebut maka masalah penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru merupakan salah satu masalah yang cukup rumit. Karena itu dirasakan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang telah dicapai selama periode Pelita I dan II selama ini di berbagai bidang, dirasakan masih tidak cukup menyerap tenaga kerja dibanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahun. Perlu diketahui bahwa penduduk di Jakarta pada akhir tahun 1978 berjumlah 6.081.963 jiwa dan pada akhir tahun 1981 berjumlah 6.555.954 jiwa. Kemudian diproyeksikan sampai pada akhir tahun Pelita III akan menjadi 7.034.831 jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian antar sensus oleh kantor Sensus dan Statistik Daerah Khusus Ibukota Jakarta tingkat kenaikan jumlah penduduk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1976 adalah 4,48% per tahun, dengan perincian 2,59% adalah kenaikan alami dan 1,89% kenaikan karena migrasi.³⁷⁾

Dengan demikian sebenarnya faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan Pelita di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat disebabkan dengan adanya masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Pertambahan penduduk yang sangat tinggi.
- b. Sempitnya daerah-daerah perkotaan, sehingga akan berakibat perluasan wilayah ke daerah pedesaan, bahkan ada kemungki-

37) *Buku II Rencana Pembangunan Lima Tahun ketiga 1979/1980 - 1983/1984*, - hal. 1 - 2.

nan ke wilayah Propinsi Jawa Barat, yang dengan sendirinya akan memerlukan biaya yang cukup besar.

- c. Masih sangat rendahnya tingkat kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan kurang pengertian dan kurang memahami tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus banyak memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat mempunyai rasa kesadaran untuk membangun wilayahnya, dengan cara ikut berperan serta dalam pembangunan.
- d. Masih sangat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga belum atau tidak mau menerima perubahan-perubahan yang akan ditimbulkan dalam pembangunan. Misalnya dalam pelaksanaan proyek MHT untuk membuat jalan kendaraan atau jalan lingkungan dengan cara terpaksa menggusur tanah penduduk. Dalam hal ini sering terjadi permasalahan, karena pihak penduduk merasa dirugikan, sehingga ada yang tidak mau digusur.

Di bawah ini, kita ambilkan beberapa daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dalam pelaksanaan Pelita terdapat hambatan-hambatan.

1. **Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur**

Faktor-faktor penghambat dalam Pelita adalah:

- a. Daerah ini juga termasuk daerah banjir, sehingga pelaksanaan Pelita di daerah ini tidak dapat berjalan lancar, karena seringnya ada genangan banjir yang mengakibatkan lambat dalam pembangunan.
- b. Penduduknya cukup padat, sehingga untuk membuat daerah pemukiman mengalami kesulitan, mengingat daerah ini tidak begitu luas, akan tetapi berkat kesadaran penduduk untuk membangun maka dapat diciptakan daerah pemukiman yang sehat.
- c. Adanya kejahatan di daerah ini yang menjurus kriminal, mengakibatkan sering terjadi perselisihan antar warga, sehingga mengurangi semangat membangun. Namun karena dari pihak pemerintah terus menerus mengadakan pembinaan warga/penduduk, maka kejahatan tersebut berangsur-angsur dapat di-

atasi, dan pada saat ini dapat dikatakan aman tidak ada lagi gangguan-gangguan kejahatan.

Adapun faktor-faktor penunjang dalam Pelita di daerah ini adalah:

- a. Letaknya sangat strategi dengan daerah-daerah lain, bahkan merupakan daerah penghubung antara Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan luar kota khususnya daerah Jawa Tengah.
- b. Lingkungannya sangat baik karena terdapat gedung-gedung sekolah, Rumah Sakit, maupun daerah Industri, yang sangat baik untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat.

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Hambatan-hambatan dalam Pelita adalah:

- a. Bahwa daerah ini dimasukkan dalam kawasan industri Pulo Gadung, sehingga untuk di daerah ini tidak boleh dibangun pemukiman/perkampungan penduduk yang bersifat permanen.
- b. Tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah dan cara berpikirnya masih sangat statis tradisional.
- c. Tingkat kehidupan masyarakat masih sangat rendah, sehingga belum banyak ikut berperan serta dalam pembangunan.
- d. Jalan-jalan kendaraan yang masuk ke wilayah Kelurahan Penggilingan pada mulanya tidak ada dan sekalipun ada sangat kecil dan becek. Karena daerah ini termasuk kawasan industri Pulo Gadung, maka untuk pembangunan jalan masih ditangguhkan. Tetapi pada akhir-akhir ini telah berhasil diperjuangkan untuk pembangunan jalan kendaraan yang panjangnya 3.500 m dan lebar 4 – 6 m, serta telah dikeraskan dan diaspal.³⁸⁾ Adapun – faktor-faktor penunjang dalam Pelita di daerah ini adalah :
 - a. Semangat masyarakat untuk membangun tinggi.
 - b. Adanya tokoh-tokoh non pemerintah yang ikut aktif dalam memperjuangkan wilayah kelurahan untuk segera dibangun.
 - c. Dengan semangat kerja bakti masyarakat, maka pembangunan jalan lingkungan dapat dilaksanakan dengan baik.

38) Wawancara dengan Bapak Abd. Hamid; log. cit.

3. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Faktor-faktor penghambat dalam Pelita adalah:

- a. Adanya kali yang mengalir ke wilayah Kelurahan Klender, di mana kali tersebut merupakan satu-satunya kali untuk membuang genangan air hujan yang cukup besar, sehingga kali tersebut tidak mampu menampung dan akhirnya menimbulkan bencana banjir yang cukup besar.
- b. Masih banyaknya penduduk yang belum mengerti arti dan tujuan pembangunan, maka perlu terus menerus diadakan penerangan, bimbingan maupun penyuluhan.
- c. Banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah, sehingga agak sulit diberikan bimbingan maupun penyuluhan.

Adapun faktor-faktor penunjang dalam Pelita di daerah ini adalah:

- a. Masyarakatnya mempunyai ketekunan bekerja sebagai pengusaha/pengrajin industri kecil.
- b. Sarana pendidikan dan sarana angkutan banyak terdapat di daerah ini, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan tarap kemajuan masyarakat untuk dapat memahami dan mengerti tujuan pembangunan.
- c. Letaknya sangat strategis dan tidak jauh dari pusat industri, sehingga memudahkan untuk komunikasi ke daerah lain.

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Faktor-faktor penghambat dalam Pelita adalah:

- a. Adanya salah pengertian antara warga dengan pihak pemerintah, bahwa apabila ada petugas mengadakan peninjauan ke wilayahnya dianggap akan meminta sumbangan dari masyarakat. Tetapi masalah ini dapat diatasi, karena komunikasi dengan warganya.
- b. Masih adanya perbedaan tentang pengertian sosial budaya. Hal ini dapat dirasakan bahwa banyak kaum ulama yang menganggap kebudayaan selain yang berasal dari Arab adalah kurang baik dan akan merusak kebudayaan Islam sepertinya Qasidah-

an, Gambus dan lain-lain. Maka hal ini juga menunjukkan kurang persatuan dan mempunyai akibat penghambat pembangunan.³⁹⁾

Adapun faktor-faktor penunjang Pelita adalah:

- a. Daerah Gandaria Utara berdekatan dengan daerah perkotaan, sehingga mudah menerima pembangunan.
- b. Sebagian besar penduduk sudah berpendidikan maju, sehingga mudah memahami arti dan tujuan pembangunan.

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pelita di kelurahan ini adalah:

- a. Daerah ini pernah menjadi basis Partai Komunis Indonesia, oleh karena pada tahapan pertama daerah ini sangat sulit untuk melaksanakan pembangunan. Akan tetapi karena pihak pemerintah terus menerus mengadakan pembinaan warganya, maka akhirnya warga mulai sadar akan pentingnya pembangunan.
- b. Keadaan kehidupan masyarakat pada permulaan Pelita masih rendah, sehingga juga berpengaruh untuk turut aktif dalam pembangunan.
- c. Tarap berpikir masyarakat pada mulanya sangat statis dan apatis. Dalam hal ini segera dapat berubah setelah adanya sarana jalan kendaraan umum dan masuknya mass media ke daerah ini, sehingga masyarakat mulai berubah cara berpikirnya menjadi dinamis aktif dan akhirnya mengerti tujuan pembangunan.⁴⁰⁾

Adapun faktor penunjang Pelita adalah:

- a. Letak daerah kelurahan ini sangat strategis, karena dilalui kendaraan umum yang menuju pusat rekreasi yakni ke Ragunan

39) Hasil wawancara dengan Lurah Gandaria Utara pada bulan September 1981, di Kantor Kelurahan Gandaria Utara.

40) Laporan Tahunan Pembinaan Wilayah Kelurahan Menteng Atas, *loc.cit.*

maupun ke Taman Miniatur Indonesia Indah dan pula ke arah Senayan (pusat kegiatan olah raga).

- b. Terdapat sarana pendidikan dan sarana angkutan cukup banyak.
6. **Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan**

Faktor-faktor penghambat dalam Pelita adalah:

- a. Penghidupan masyarakat yang sangat statis, dan sudah sejak lama hidup dari hasil pertanian berkebun buah-buahan, pada mulanya ada kesulitan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Akan tetapi karena adanya pendekatan dan penyuluhan terus menerus, maka akhirnya masyarakat mempunyai kesadaran membangun desanya.
- b. Taraf pendidikan masyarakat yang masih rendah juga sulit diberi pengertian tentang tujuan dan manfaat pembangunan. Hal ini akhirnya dapat diatasi dengan cara memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat dapat menyadari dan memahami tentang tujuan pembangunan.⁴¹⁾

Adapun faktor-faktor penunjang dalam pembangunan/Pelita adalah:

- a. Masyarakat mempunyai ketekunan bekerja dalam mengolah tanahnya.
- b. Letak daerah yang berdekatan dengan tempat rekreasi/pariwisata yakni Kebun Binatang, maka mudah menerima perbaikan.

7. **Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat**

Faktor-faktor penghambat dalam Pelita adalah:

- a. Adanya sebagian kecil masyarakat yang karena kurangnya pengertian akan maksud dan tujuan Pelita, sehingga mempersulit pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi setelah adanya

41) Laporan Pembinaan Wilayah Kelurahan Jagakarsa; ibid.

penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat, akhirnya dapat diatasi pula.

- b. Daerah ini merupakan daerah genangan hujan, sehingga apabila hujan turun sering terjadi banjir yang mengakibatkan macetnya pembangunan.
- c. Tingkat kehidupan masyarakat sangat rendah, dan sebagian besar berpendidikan rendah pula, sehingga pada tahapan pertama pemerintah harus banyak memberikan bimbingan dan penyuluhan, agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk membangun.⁴²⁾

Adapun faktor-faktor penunjang dalam Pelita di daerah ini adalah:

- a. Partisipasi masyarakat cukup tinggi.
- b. Penduduknya belum begitu padat, hingga mudah diciptakan daerah pemukiman yang teratur dan sehat.

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Faktor-faktor penghambat dalam Pelita adalah:

- a. Adanya penduduk yang hanya sebagai pekerja musiman dan tidak bertempat tinggal menetap di daerah Kelurahan Jembatan Lima, sehingga sulit untuk membangkitkan kesadaran membangun wilayah/daerahnya.
- b. Tidak ada keseimbangan perkembangan antara industri kecil dan industri besar di daerah ini, menimbulkan persaingan kurang sehat sehingga mengakibatkan kurang perhatian masyarakat terhadap pembangunan.
- c. Sangat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga sulit untuk menanamkan rasa kesadaran membangun dan tujuan pembangunan.⁴³⁾

Adapun faktor-faktor penunjang dalam Pelita di daerah ini adalah:

42) Wawancara dengan Usin Nakyan; *ibid.*

43) Wawancara dengan Usin Nakyan; *op. cit.*

- a. Sudah tersedianya sarana jalan kendaraan sejak lama, sehingga tinggal merehabilitasi jalan-jalan yang sudah ada dan menambah jalan-jalan lingkungan.
- b. Sudah terdapatnya industri-industri besar maupun kecil, sehingga tinggal mengadakan penertiban ke dalam.

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Selatan

Faktor-faktor penghambat dalam Pelita adalah:

- a. Banyaknya penduduk yang masih berpendidikan rendah, bahkan ada yang masih buta huruf, sehingga kurang mengerti akan tujuan dan arti pembangunan. Namun lambat laun dapat diatasi dengan cara memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat
- b. Banyaknya anak-anak putus sekolah dan pengangguran, sehingga mengakibatkan sering terjadinya keributan-keributan di daerah ini, namun setelah adanya pendekatan oleh pemerintah kepada masyarakat maka keributan-keributan tersebut dapat diatasi

Adapun faktor-faktor penunjangnya adalah:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi
- b. Keadaan sosial budaya terbina baik, sehingga mudah digunakan untuk kontrak komunikasi antara pemerintah dengan warganya.⁴⁴⁾

E. AKIBAT YANG DITIMBULKAN PELITA DALAM BIDANG SOSIAL EKONOMI DAERAH PEDESAAN

Selama Pelita I dan II telah dilaksanakan berbagai pembangunan daerah pedesaan. Pembangunan desa dilaksanakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan desa diarahkan untuk meletakkan dasar pembangunan nasional yang sehat dan kuat. Desa merupakan landasan ekonomi sosial budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional.

44) Wawancara dengan Drs. Zainuddin, ibit.

Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta pembangunan daerah pedesaan seperti peningkatan produksi pertanian, perindustrian, perhubungan, pendidikan, kesehatan serta peningkatan ketrampilan masyarakat pedesaan dan peningkatan berperan sertanya masyarakat pedesaan secara langsung.

Di samping peningkatan usaha pembangunan, masalah pemerataan juga mendapat perhatian yang utama. Pemerataan ini dapat dilihat hasilnya pada peningkatan pendapatan kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti nelayan, pengrajin, petani dan pedagang kecil.

Akibat adanya pembangunan yang dilaksanakan dengan proyek Mohammad Husni Thamrin, yang bertujuan untuk menciptakan daerah pemukiman yang sehat dan harmonis, ternyata memerlukan areal tanah cukup luas, yang dapat mengurangi daerah pertanian di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memang ditinjau dari manfaatnya tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu banyak daerah pertanian yang terpaksa dirubah menjadi daerah pemukiman, sehingga areal pertanian di Daerah Khusus Ibukota Jakarta kian tahun kian mengecil. Sekalipun demikian sub sektor ini akan tetap diusahakan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi penugasannya dalam kaitan menjadikan Jakarta sebagai "kota produktif" dalam semua sektor produksi.

Sampai dengan akhir Pelita II kebutuhan Jakarta akan bahan makanan utama terdiri atas beras, jagung, ketela, kacang tanah, terigu, sebagian besar didatangkan dari luar Jakarta, meskipun dalam jumlah kecil di Jakarta sendiri ada produksinya.

Areal pertanian tertentu yang sebagian besar terletak di daerah pedesaan, akan tetap dipertahankan, karena di samping menyangkut kehidupan sebagian masyarakat yang hidup dari pertanian, juga diperlukan untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian tanaman buah-buahan khas Jakarta.

Untuk itu pemerintah berusaha meningkatkan produksi pertanian dengan jalan:

- Pembangunan/penyempurnaan kebun bibit
- Relokasi dan penghijauan produksi
- Pembinaan sarana produksi dan kredit kecil
- Intensifikasi usaha tani dan perlindungan tanaman
- Pusat pengembangan pertanian unit Hortikultura

Di samping itu pemerintah dalam Pelita III ini akan mengembangkan pemasaran pertanian dan pembinaan serta penyuluhan pertanian. Dengan jalan itulah diharapkan keadaan sosial ekonomi petani dapat ditingkatkan lebih baik.

Usaha intensifikasi pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan selama Pelita II memperlihatkan hasil yang lumayan antara lain dalam hal intensifikasi hortikultura, ikan hias, unggas dan lain-lain serta meningkatkan fungsi kebun-kebun bibit, balai benih dan taman ternak baik sebagai pusat penyuluhan maupun untuk penyediaan bibit-bibit unggul kepada masyarakat.

Pembinaan industri kecil/kerajinan rakyat telah berhasil melatih/mendidik para pengusaha kecil melalui program Pemerintah Daerah, antara lain untuk pengusaha kerajinan Pondok Pinang, Karer, Klender, Kalibata Pulo, Sukabumi Udik, Manggarai dan lain-lain.

Di dalam rangka absolut kenaikan jumlah industri di Jakarta baik yang menggunakan modal PMDN maupun PMA sampai Pelita II cukup menggembirakan, hanya perlu diprioritaskan pengusahaan jenis-jenis industri yang dapat memberikan lapangan kerja lebih banyak (padat karya).⁴⁵⁾

Untuk mengembangkan industri kecil ini perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk menghindarkan program-program yang tumpang tindih dan mengarahkan berbagai program mengenai industri kecil ini, sehingga dapat saling mendukung.

Untuk menunjang hal tersebut dalam Pelita III akan dilakukan langkah-langkah yang serasi dengan Pola Pengembangan Industri Jakarta dengan inti-intinya sebagai berikut:

Peningkatan partisipasi masyarakat Jakarta dalam pembangunan industri melalui pengembangan kewiraswastaan dengan tujuan ekstensifikasi dan keanekaragaman (diversifikasi) industri.

Pengembangan industri yang padat karya.

Konsolidasi industri dan peningkatan produktivitas.

45) Buku I; *op.cit.*, hal. 57 - 58.

Pertumbuhan yang seimbang dan serasi antara sub sektor industri dengan sub sektor lainnya terutama sub sektor jasa dan pertanian. Pembinaan efektifitas dan efisiensi berbagai bidang industri/peningkatan kualitas dan kuantitas.

Mengembangkan cabang-cabang industri hulu (*upstream industries*)

Mengembangkan industri barang pengganti import (subsitusi import).

Peningkatan penyediaan tenaga kerja industri yang trampil melalui pendidikan, bimbingan dan latihan sektor pemerintahan maupun swasta.

Peningkatan penelitian, pengembangan dan adaptasi tehnologi (*Research, Development & Engineering*)

Perpaduan industri dengan kelestarian lingkungan hidup.⁴⁶⁾

Pembinaan industri kecil/kerajinan selama Pelita III akan diberikan prioritas pertama kepada beberapa jenis industri kerajinan yang mampu bertahan selama beberapa tahun selama masa Pelita II, seperti kerajinan kaleng, perabot ukir, perabot, kulit, sepatu, konpeksi, kompor dan lain-lain.

Kepada mereka akan terus diberikan bimbingan teknis, bantuan peralatan mesin dan bahan baku dengan sistim melalui program kredit kecil maupun barang kembali barang. Untuk promosi pemasaran akan diberikan fasilitas arena promosi di semua wilayah dengan lokasi yang berdekatan dengan pusat kegiatan/pasar-pasar yang strategis, dan kios-kios di pasar-pasar inpres. Dan kepada pedagang kaki lima diatur dengan cara melokalisir daerah-daerah perdagangan kaki lima. Karena pedagang kaki lima pun turut membantu kehidupan pemasaran yang langsung dapat sampai kepada konsumen, yang berarti turut membantu kehidupan adanya industri-industri kecil.

Di bawah ini dapat kita ambilkan beberapa daerah pedesaan yang telah meningkat sosial ekonominya, karena dengan adanya Pelita.

1. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Di wilayah kelurahan ini pada mulanya banyak penduduk dengan

46) Buku II; *op. cit.*, hal. 39.

penghidupan bertani dan berdagang. Sering terjadi sistim ijon, sehingga keadaan sosial ekonomi para petani maupun pedagang sangat rendah. Setelah adanya Pelita, sistim ijon tersebut berangsur-angsur dapat diberantas dan sumber penghidupan penduduk sebagian besar telah berubah yakni menjadi pegawai, pedagang, pengrajin, bahkan ada yang mampu berwiraswasta.

Keadaan sosial ekonomi penduduk menjadi meningkat dan sebagian besar telah hidup di atas garis kemiskinan. Hal ini terlihat, dari keadaan lingkungan yang serasi, rumah-rumahnya banyak yang telah permanen dan tidak ada lagi anak-anak usia belajar yang tidak masuk sekolah, semuanya itu menunjukkan bahwa tarap kehidupan masyarakat telah meningkat.⁴⁷⁾

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Untuk wilayah kelurahan ini, sebagian besar penduduknya masih tetap hidup dari hasil pertanian. Karena di daerah ini memang masih memungkinkan untuk bertanya. Hanya pertanian pada saat ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan sebelum Pelita. Pada saat ini cara mengolah daerah-daerah pertanian lebih baik, karena telah ada penyuluhan dari pihak pemerintah tentang cara-cara bertani yang intensif dan efisien.

Pertanian di daerah ini menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran dan hanya sedikit beras. Untuk areal daerah pertanian di Kelurahan Penggilingan, masih cukup luas karena memang belum kena Proyek Mohammad Husni Thamrin, di samping termasuk kawasan Industri Pulo Gadung.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat lebih meningkat, karena berdekatan dengan daerah-daerah industri, sehingga banyak pengusaha kecil, toko-toko dan warung yang dapat mendatangkan penghasilan bagi masyarakat.

Adanya sarana jalan yang telah selesai dibangun, dan dapat dilalui oleh kendaraan umum, akhirnya dapat meningkatkan tarap perekonomian penduduk, karena dengan mudah dapat melaksanakan jual-beli, tidak hanya di wilayah Kelurahan Penggilingan, akan tetapi jauh di luar wilayah kelurahan. Sehingga terbuka kesempatan untuk me-

47) Hasil wawancara dengan M. Soleh Suprpto; *op.cit.*

rubah cara hidup bertani bagi warga yang cukup mampu, dan memiliki pendidikan cukup, untuk menjadi pegawai negeri maupun pegawai swasta.

3. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Di kelurahan ini pada mulanya sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian, yang hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan petani sendiri. Kemudian setelah Pelita daerah pertanian semakin sempit, atau bahkan habis sama sekali, karena berubah menjadi daerah industri kecil yang bergerak dalam bidang pertukangan dengan menghasilkan meubelair dan jahit menjahit. Dengan industri kecil ini kehidupan penduduk lebih baik dan lebih cocok di samping banyak pula yang menjadi pedagang dan pegawai.

Untuk mengembangkan perindustrian/kerajinan di daerah ini Pemerintah telah menyediakan perlengkapan pertukangan yang lebih baik dan tidak sedikit pula yang mendapat bantuan modal dari Bank maupun koperasi, sehingga industri kecil di daerah ini dapat maju dengan pesat.

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Penduduk di kelurahan ini pada mulanya bertani dengan hasil yang sangat minim. Setelah adanya Proyek MHT dan Pelita, maka daerah pertanian tersebut habis sama sekali dan dijadikan daerah pemukiman yang sehat dan harmonis.

Jalan-jalan telah dibangun dan dikeraskan serta diaspal sehingga sekarang menjadi daerah perkotaan yang banyak rumah-rumah permanen. Sebagian besar penduduk telah merubah cara hidup bertani menjadi pedagang tetap dan tidak tetap. Banyak yang membuka usaha sendiri dengan cara mendirikan industri rumah seperti jahit menjahit, dagang tempe, perabotan rumah tangga, menjadi pegawai negeri dan bagi yang masih memiliki rumah yang luas membuat rumah-rumah kontrakan, ternyata hasilnya lebih baik daripada bertani. Dengan demikian sosial ekonomi masyarakat meningkat lebih baik.

5. Di Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Keadaan sosial ekonomi di daerah ini setelah Pelita jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum Pelita. Dulu masyarakat bergantung kehidupannya dengan pertanian, menjual kembang dan memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon buah-buahan. Dan hasilnya hanya untuk keperluan sendiri kemudian setelah Pelita keadaan jauh berubah, karena sekarang sudah banyak dibangun jalan-jalan besar, perumahan dengan perkaplingan yang teratur, sehingga pada saat ini sebagian besar penduduk telah hidup dari hasil sebagai pegawai, pedagang dan pengrajin.

Untuk hubungan dengan daerah sekitarnya sangat lancar, cara hidup masyarakat telah maju, berarti faktor sosial ekonomi juga lebih baik. Banyak terdapat pertokoan di sekitar jalan besar dan banyak pula industri kecil yang berada di sekitar jalur jalan ekonomi. Pasar-pasar rakyat banyak terdapat di kelurahan ini, sehingga daerah ini boleh dikatakan telah menjadi daerah perkotaan, dengan tarap penghidupan masyarakat yang baik.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Di daerah ini mata pencaharian penduduknya adalah pertanian. Daerah pertanian cukup luas, yang dapat dijadikan daerah perkebunan buah-buahan, peternakan.

Pada masa pelaksanaan Pelita, daerah perkebunan ini cukup luas, sehingga memungkinkan untuk tetap bertahan sebagai daerah pertanian. Hanya bedanya pada waktu sebelum Pelita, pertanian belum dilaksanakan secara teratur dan intensif, sehingga hasilnya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Tetapi setelah Pelita, pertanian dikerjakan lebih intensif dan peternakan juga dilakukan menurut petunjuk-petunjuk dari pemerintah dengan bimbingan penyuluhan, sehingga hasilnya lebih baik.

Kemudian untuk pemasaran hasil-hasil pertanian dan peternakan juga lebih mudah karena sudah ada alat angkutan kendaraan dan jalan yang cukup luas yang diaspal, sehingga ditinjau dari segi sosial ekonomi keadaan petani buah ataupun petani dagang lebih baik hasilnya. Dan sampai saat ini pertanian semacam itu masih tetap

bertahan, di samping ada sebagian kecil penduduk ada yang menjadi pegawai negeri maupun swasta.

7. Di Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Di kelurahan ini tidak banyak sumber-sumber mata pencaharian yang didapat dari keadaan alamnya. Karena daerah ini kurang cocok untuk usaha pertanian maupun peternakan. Karena itu sebagian besar penduduk hidup dari hasil berdagang dan menjadi pegawai negeri maupun swasta.

Tentang hasil industri rumah ialah pembuatan tempe, tahu, oncom dan toge. Di samping itu ada industri besar yang masih ada di wilayah kelurahan Jelambar ialah industri makanan, minuman, sepatu, dan alat-alat dari plastik.

Keadaan sosial ekonomi setelah Pelita menjadi lebih baik, karena pemerintah terus mengadakan pembinaan tentang pengusaha/industri kecil dan termasuk pula industri rumah tersebut, dengan cara menyediakan koperasi simpan pinjam Unit Desa. Sehingga bagi pengusaha/industri rumah tersebut dapat bertahan.

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Keadaan sosial ekonomi di kelurahan ini pada mulanya sangat tidak seimbang, antara pengusaha besar dengan sebagian besar penduduk. Hal ini disebabkan penduduknya sebagian besar penduduk pendatang yang hanya menjadi pekerja musiman.⁴⁸⁾

Kemudian setelah diadakan pengaturan tentang Relokasi Industri dan juga adanya Proyek MHT maka mulailah penduduk mempunyai tempat tinggal yang menetap dan permanen, sehingga banyak penduduk yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai pegawai ataupun sebagai pedagang, sekalipun juga masih banyak pekerja musiman. Namun dengan makin teraturnya daerah pemukiman berkat adanya Pelita, merubah pula perekonomian penduduk yang sebagian besar telah meningkat tarap penghidupannya.

48) Progress Report Pembinaan Wilayah Kelurahan Jembatan Lima; *pop, cit*, hal. 1.

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Wilayah Kelurahan ini setelah Pelita, keadaan sosial ekonominya menjadi baik. Dulu banyak pengangguran sehingga keadaan ekonomi masyarakat sangat rendah. Pada saat ini sudah banyak dibangun sarana jalan yang memudahkan warga masyarakat dapat berhubungan dengan daerah lain. Sehingga banyak kendaraan yang masuk ke daerah ini. Ini menimbulkan adanya usaha perdagangan dan usaha pekerjaan yang lebih mudah. Karena itu sekarang banyak yang menjadi pegawai maupun pedagang yang akhirnya faktor sosial ekonomi menjadi meningkat.

BAB IV
PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN
DESA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. STRUKTUR PEMERINTAHAN

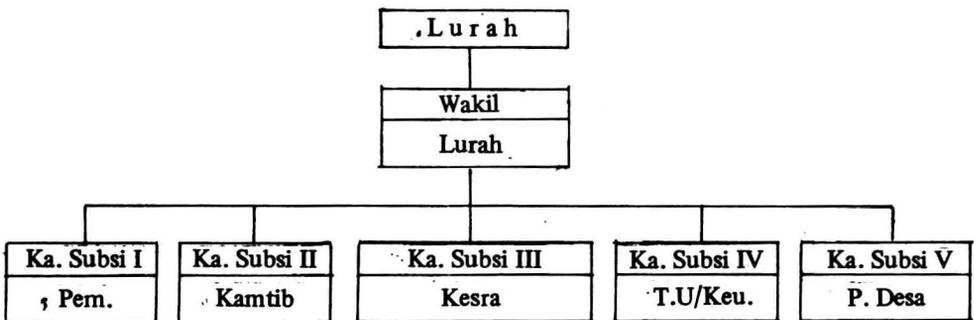
Struktur pemerintahan desa Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah Pelita, telah diseragamkan, meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Sub Seksi I/Pemerintahan
- b. Sub Seksi II/Kamtib
- c. Sub Seksi III/Kesra
- d. Sub Seksi IV/T.U. – Keuangan
- e. Sub Seksi V/Pembangunan Desa.

Dengan terbentuknya Direktorat, Urusan, Seksi dan Sub Seksi, tentang Pembangunan Desa dari tingkat propinsi sampai dengan kelurahan, maka organisasi masyarakat yang berada di bawah pengelolaan bidang pemerintahan ini, hanyalah Rukun Warga dan Rukun Tangga saja.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.Ib.3/2/14/1966 tanggal 23 Desember 1966 dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah No. 6/P/I/1976 tentang Tugas dan Kewajiban Lurah dalam pembinaan RT/RW, untuk mencapai tujuan dari organisasi RT/RW sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga antara masyarakat melalui RT/RW dengan pemerintah setempat dapat bekerja sama dalam menunjang program pemerintah.

Dengan demikian secara lengkap aparat Pemerintah Desa Struktur organisasinya dapat disusun sebagai berikut:



Pada prinsipnya struktur organisasi hanya untuk mengadakan pembagian tugas, agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama.

Apabila kita perhatikan dalam struktur organisasi tersebut tidak tercantum organisasi RT/RW, dan organisasi RT/RW, dan organisasi RT/RW tidak termasuk aparat pemerintahan desa, melainkan hanya membantu pelaksanaan ketertiban masyarakat. Dan lebih tepatnya adalah organisasi non pemerintah yang ikut membantu memelihara ketertiban dan keamanan desanya. Kemudian dalam memelihara ketertiban dan keamanan wilayah kelurahan ini, lurah didampingi pula oleh Babinsa dan Binmas.

Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat desa, maka telah ditentukan adanya delapan tertib hukum yang terdiri dari:

Tertib bangunan

Tertib kakilima

Tertib lalulintas/angkutan

Tertib tuna wisma/tuna karya

Tertib perkereta apian

Tertib perlistrikan

Tertib banjir

Tertib sosial politik

B. CARA PEMILIHAN DAN PERANAN APARAT PEMERINTAHAN DESA

Pada saat ini aparat pemerintah desa tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat, karena lurah di Jakarta berstatus sebagai pegawai pemerintah sehingga untuk menjadi lurah dan aparatnya telah diatur sesuai dengan undang-undang No. 5 tahun 1969, yaitu lurah dan aparat yang termasuk di daerah perkotaan berstatus sebagai pegawai negeri yang pengangkatannya telah diatur dengan undang-undang. Jadi semua lurah dan aparatnya di seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tahun 1969 telah diangkat sebagai pegawai pemerintah.

Adapun kedudukan dan peranan aparat pemerintahan desa di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai aparat pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang terendah untuk melaksanakan

pembangunan desa baik fisik maupun mental spiritual. Karena itu dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang mempunyai kegiatan hukum.

Sedangkan organisasi RT/RW hanya berstatus organisasi non pemerintah, akan tetapi dalam kenyataannya mempunyai tugas yang secara rutine melayani masyarakat dalam urusan sosial maupun urusan warganya untuk mendapatkan persyaratan sebagai warga yang baik yakni memiliki ketentuan yang berlaku, antara lain kartu penduduk, surat kelahiran dan sebagainya. Dalam hal ini RT/RW juga membuat administrasi tentang warganya, sehingga surat menyuratpun RT/RW juga berperan misalnya membuat surat pengantar, mencatat kelahiran, serta mencatat daftar keluarga dalam Kartu Keluarga.

Di bawah ini dapat kita ambilkan beberapa daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tentang peranan aparat pemerintah desa:

1. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Lurah dan aparat pemerintahan di Kelurahan Jatirawamangun tidak dipilih oleh masyarakat, melainkan diangkat berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 1969, di mana untuk aparat pemerintahan desa di daerah perkotaan terdiri dari pegawai pemerintah.

Untuk Kelurahan Jatirawamangun, mengingat di kelurahan ini telah mendapat Proyek Mohammad Husni Thamrin sejak Pelita I sampai sekarang, maka yang dahulu merupakan daerah persawahan dan rawa-rawa sekarang merupakan daerah perkotaan dengan pemukiman yang teratur dan banyak bangunan perumahan yang permanen. Dalam hal ini peranan aparat pemerintahan desa sangat besar untuk terus membina masyarakat dengan pembangunan fisik maupun mental spiritual, sehingga yang dahulu banyak timbul kejahatan, sekarang menjadi daerah aman dan tertib, sebagian besar masyarakatnya sudah berpendidikan, dan kesadaran bermasyarakat cukup tinggi. Pendekatan aparat pemerintahan desa kepada masyarakat sangat baik, maka Pelita berjalan lancar dan sifat kegotong-royongan tetap terbina, dalam hal ini kelihatan adanya 6 buah koperasi yang cukup baik.⁴⁹⁾

49) Wawancara dengan M. Soleh Suprpto; *op. cit.*

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Lurah dan aparatnya tidak lagi dipilih langsung oleh warganya, melainkan diangkat berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi lurah di daerah perkotaan.

Adapun fungsi pokok pemerintahan wilayah Kelurahan Penggilingan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasilguna, yakni dalam pelayanan/pembangunan masyarakat atau wilayah, maka pembagian dan pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan diarahkan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 25 April 1971 No.Ab.15/46/1971 (LD No. 44 tahun 1971), tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 9 Juni 1977 No. 367 tahun 1977.

Adapun susunan struktur Organisasi Kelurahan Penggilingan adalah sebagai berikut:

1. Lurah
2. Wakil Lurah
3. Sub. Seksi I/Pemerintahan
4. Sub. Seksi II/Kamtib
5. Sub Seksi III/Kesra
6. Sub Seksi IV/Tata Usaha – Keuangan
7. Sub Seksi V/Pembangunan Desa.⁵⁰⁾

Organisasi RT/RW yang merupakan pembantu pelayanan masyarakat bagi pemerintahan desa, untuk wilayah Kelurahan Penggilingan mempunyai masa bakti 3 tahun. Dengan ketentuan bahwa untuk Rukun Tetangga tidak boleh melebihi 40 – 45 Kepala Keluarga. Oleh karena itu mengingat cepatnya pertambahan penduduk, sehingga untuk wilayah Kelurahan Penggilingan telah mencapai jumlah 54 Rukun Tangga dan 5 Rukun Warga, di mana ketua RT/RW dipilih langsung oleh masyarakat.

Jadi peranan aparat pemerintahan desa di Kelurahan Penggilingan adalah membina masyarakat melalui pembangunan fisik maupun mental spiritual yang dibantu oleh organisasi masyarakat RT/RW dalam melaksanakan tugas-tugas menuju ke arah tercapainya pemba-

50) Laporan Pembinaan Wilayah Kelurahan Penggilingan, *op. cit.*, hal. 7.

ngunan wilayah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

3. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Lurah dan aparat pemerintahan di kelurahan ini berstatus sebagai pegawai pemerintah, yang diangkat berdasarkan undang-undang.

Tugas-tugas aparat pemerintahan lebih banyak, bila dibandingkan dengan sebelum Pelita. Jadi peranan aparat pemerintahan di kelurahan ini lebih berat, karena daerah ini sekarang telah berkembang menjadi daerah perkotaan yang dengan sendirinya lebih banyak melayani keperluan masyarakat, di samping jumlah penduduknya lebih padat.

Dari daerah pertanian yang bersifat statis, menjadi daerah perindustrian rakyat yang lebih banyak memerlukan sarana dalam segala bidang, Oleh karena itu untuk memenuhi sarana yang diperlukan aparat pemerintahan di kelurahan ini mendapat tugas berat untuk memperjuangkan atau paling sedikit memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta demi kemajuan di daerah ini.

Untuk membuat perencanaan perkembangan wilayah tersebut tidak kecil peranan RT/RW, karena organisasi non pemerintah ini secara langsung dapat berhadapan dengan warganya dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Misalnya yang baru-baru ini terjadi bencana alam banjir, maka peranan RT/RW sangat besar untuk mengetahui tentang sebab-sebab timbulnya bencana dan akibat-akibat yang ditimbulkan.

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Wilayah kelurahan ini setelah Pelita telah berubah menjadi daerah perkotaan, maka aparat pemerintahannya telah diangkat sebagai pegawai negeri.

Adapun peranan aparat pemerintahan di kelurahan ini adalah untuk membina wilayah dengan cara pembangunan fisik maupun mental spiritual. Hal ini telah dapat dibuktikan dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat untuk menyesuaikan dengan lingkungan, yakni dari cara berpikir yang statis men-

jadi dinamis mengikut perkembangan lingkungannya. Pembinaan dari aparat pemerintahan desa terus-menerus dilakukan dengan cara bimbingan dan penyuluhan.

Hubungan antara aparat pemerintah dengan warganya saling pengertian dan kesadaran untuk membangun lingkungannya atau wilayahnya. Sehingga pembangunan berjalan lancar, tidak terdapat hambatan-hambatan.

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Dulu kelurahan menjadi basis Partai Komunis Indonesia (PKI), dan sekarang setelah Pelita ini tidak terasa lagi adanya pengaruh ideologi partai tersebut. Daerahnya sudah teratur dan menjadi daerah-daerah perkotaan yang mempunyai sarana-sarana lengkap, yakni ada jalan besar, sekolah banyak, pasar, puskesmas dan sebagainya.

Aparat pemerintahan di daerah ini tidak lagi dipilih oleh masyarakat, melainkan telah diangkat sebagai pegawai pemerintah yang mempunyai peranan untuk membina wilayah dan warganya.

Kekuasaan pemerintahan di kelurahan ini, telah mempunyai kekuatan hukum, karena itu dapat memberikan sanksi-sanksi terhadap warga yang tidak menurut peraturan.

Kemudian di dalam pembinaan wilayah dan warga, aparat pemerintahan berperanan sebagai pemimpin masyarakat, dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk perkembangan dan kemajuan wilayahnya. Pendekatan aparat pemerintah desa dengan masyarakat di kelurahan ini sangat baik, sehingga timbul rasa kekeluargaan dan kemasyarakatan yang baik.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Di kelurahan ini seperti juga kelurahan lain di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, aparat pemerintahan desa sudah menjadi pegawai Pemerintah, sehingga melaksanakan pemerintahan sudah mengikuti peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pemerintah.

Adapun peranan aparat pemerintahan di Kelurahan Jagakarsa adalah membina masyarakat melalui pembinaan fisik maupun mental spiritual untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu lurah mem-

punyai tugas yang cukup banyak dan tergantung dari keaktifan warganya. Dan dalam menggiatkan partisipasi masyarakat untuk membangun, peranan aparat pemerintahan desa sangat menentukan. Untuk Kelurahan Jagakarsa, karena adanya pendekatan antara pemerintahan desa dengan masyarakat dan sering adanya bimbingan dan penyuluhan untuk cara-cara bertani yang baik, maka keadaan masyarakat di daerah ini menjadi baik. Hubungan aparat pemerintah dengan warganya sangat dekat, sehingga memudahkan untuk pembinaan wilayahnya. Hal ini terlihat dari cara berpikir masyarakat yang dulu sangat statis, apatis terhadap pembangunan, sekarang sudah dinamis dan partisipasi terhadap pembangunan cukup tinggi, sekalipun kehidupan masyarakat sebagian besar masih petani sederhana.⁵¹⁾

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Wilayah kelurahan ini, sekarang sudah dimasukkan daerah perkotaan, maka aparat pemerintahannya telah diangkat sebagai pegawai negeri. Peranan aparat pemerintahan di daerah ini sangat besar dalam membina wilayahnya. Maju dan tidaknya wilayah dan masyarakat di daerah ini terletak pada aparat pemerintahan dalam mengelola wilayahnya. Dulu daerah ini merupakan daerah rawa-rawa, penuh empang, tetapi sekarang telah berubah menjadi daerah perkotaan.

Aparat pemerintahan desa di dalam masyarakat adalah sebagai pemimpin masyarakat, maka selalu menjadi teladan dan selalu diikuti tentang perintahnya. Lurah dianggap sebagai orang tertua di masyarakat, maka harus dapat memberikan petunjuk-petunjuk terhadap warganya.⁵²⁾

Untuk lurah di Kelurahan Jelambar ini, telah banyak menunjukkan sikap dan perbuatan yang positif terlihat dengan perkembangan wilayah dari daerah yang tidak teratur, sekarang telah teratur, bahkan banyak jalan lingkungan yang dapat membuat daerah permukiman sehat dan harmonis.

51) Laporan Pembinaan Wilayah Kelurahan Jagakarsa; *op. cit.* hal. 7.

52) Laporan Kegiatan Pembinaan Wilayah Kelurahan Jelambar, *op. cit.*, hal. 13.

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Wilayah kelurahan ini, telah dimasukkan menjadi daerah perkotaan dan aparat pemerintahannya juga terdiri dari pegawai negeri. Peranan aparat pemerintahannya cukup besar dalam membangun wilayahnya. Tantangan-tangan dari warganya sangat berat, karena sebagian besar warganya adalah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Warganya sebagian orang pendatang dari Banten, yang hanya sebagai pekerja musiman. Dengan demikian pendidikannya sangat rendah, sehingga agak sulit untuk memberikan pengertian dan kesadaran untuk membangun desanya.

Namun demikian karena adanya pendekatan yang terus menerus, akhirnya berhasil pula dalam usaha pemerintah untuk membangun wilayahnya.

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Wilayah Kelurahan ini termasuk pula daerah perkotaan, sehingga aparat pemerintahannya telah diangkat sebagai pegawai negeri.

Peranan Lurah dan aparatnya dalam membangun wilayahnya cukup besar. Dengan demikian perbuatannya selalu dijadikan contoh oleh masyarakat.

Masyarakat di kelurahan ini banyak yang masih buta huruf, sehingga pada tahap pertama Pelita agak sulit melaksanakannya, mengingat belum adanya pengertian dari masyarakat. Akan tetapi karena selalu ada bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat, maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Peranan aparat pemerintahan desa di kelurahan ini sangat menentukan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan proyek MHT ternyata berjalan lancar. Penyuluhan masyarakat dalam segala bentuk dilaksanakan, antara lain dalam Program Keluarga Berencana, Ipeda, Zakat dan Perda No.3/1972, tentang keindahan dan kebersihan kota. Dengan demikian partisipasi masyarakat terhadap pembangunan cukup besar.

C. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH

Seperti telah disinggung pada uraian terdahulu, kedudukan

dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah berfungsi sebagai pembantu aparat pemerintahan desa. Namun hubungan antara pemimpin masyarakat non pemerintah dengan aparat pemerintahan tersebut tidak selalu sama pada tiap-tiap wilayah kelurahan. Hal ini tergantung pendekatan aparat pemerintahan tersebut kepada masyarakat.

Hubungan aparat pemerintahan dengan pemimpin masyarakat non pemerintah tersebut akan lebih akrab apabila aparat pemerintahan dapat menunjukkan sikap yang dapat diterima oleh masyarakat, memang tidak mudah, bahkan salah-salah aparat pemerintahan dapat menunjukkan sikap yang dapat diterima oleh masyarakat, memang tidak mudah, bahkan salah-salah aparat pemerintahan tersebut akan dijauhi oleh para pemimpin masyarakat non pemerintah apabila tidak dapat menunjukkan sikap yang positif dalam kalangan masyarakat. Dalam hal ini faktor keteladanan sangat menentukan.

Karena itu aparat pemerintahan desa harus tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di wilayahnya, dan segera mengambil sikap dan tindakan yang tepat. Sikap yang demikian inilah yang akan selalu didukung oleh masyarakat dan kemudian pemimpin masyarakat non pemerintah akan memberikan bantuan pemikiran maupun tenaga dengan ikhlas.

Di bawah ini kami ambilkan beberapa daerah pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tentang kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah.

1. Di Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur

Untuk wilayah keluarahan ini, kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah yang termasuk organisasi RT/RW sungguh besar. Karena kalau dahulu sebelum Pelita RT/RW dipilih oleh warga masyarakat yang berorientasi kepada partai politik, sekarang RT/RW dipilih oleh warga masyarakat dan tidak berorientasi kepada partai, melainkan kepada pembangunan.

Sekalipun RT/RW bukan merupakan perangkat pemerintahan desa, namun di kelurahan ini mempunyai fungsi untuk membantu pelaksanaan pembangunan di daerah, antara lain dengan menggerakkan warga masyarakat untuk mengadakan gerakan kebersihan, gerakan ketrampilan lewat PKW, maupun karang taruna dan lain-lain, sam-

pai gerakan untuk mengumpulkan masalah-masalah sosial pun dapat digerakkan melalui RT/RW, yang paling menonjol adalah gerakan untuk mengumpulkan dana kematian, ternyata kesadaran sosial masyarakat cukup besar.

Jadi kedudukan dan peranan RT/RW di kelurahan ini benar-benar sebagai pemimpin masyarakat non pemerintah yang tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi berdasarkan kekeluargaan dan kesadaran bermasyarakat dan ternyata dapat diterima dan dipatuhi oleh warganya.

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Di daerah kelurahan ini, kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah RT/RW, menunjukkan peranan yang aktif. Sepertinya perjuangan dalam membuat jalan lingkungan dan jalan kendaraan di wilayah ini, benar-benar RT/RW berpengaruh dalam kalangan masyarakat. Karena di wilayah ini termasuk daerah yang masih ketinggalan pembangunan, akibat dimasukkannya wilayah kelurahan ini ke dalam kawasan Industri Pulo Gadung. Akan tetapi berkat dukungan dari masyarakat yang dikoordinasikan oleh RT/RW, akhirnya berhasil membuat jalan tersebut.

Kemudian dalam gerakan kebersihan lingkungan, RT/RW selalu tampil di barisan depan untuk menggerakkan warga masyarakat dan ternyata tidak ada kejadian perbedaan pendapat yang sampai menimbulkan keributan. Dan apabila terjadi keributan dalam kalangan masyarakat, maka RT/RW selalu ikut menyelesaikannya.

3. Di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Untuk daerah kelurahan ini, kedudukan dan peranan RT/RW tidak jauh berbeda dengan di kelurahan lainnya. Karena di daerah ini sekarang telah berubah menjadi daerah industri kecil, maka untuk perbaikan dan keindahan kampung tidak menjadi masalah yang penting. Penduduknya sudah mempunyai kesadaran tinggi dalam pembangunan. Maka peranan pemimpin masyarakat non pemerintah terutama dititik beratkan kepada ketertiban dan keamanan.

Dalam menangani ketertiban dan keamanan di daerah ini, RT/RW berfungsi untuk mengkoordinasi warga masyarakat dan mengerak-

kan tenaga hansip untuk segera membantu pelaksanaan ketertiban dan keamanan di wilayahnya.

Berhubung daerah ini termasuk yang sering dilanda bencana alam dengan meluapnya genangan air hujan, maka peranan RT/RW untuk mengatasi bencana alam tersebut sangat besar. Misalnya baru-baru ini mengadakan gerakan kebersihan sekitar daerah banjir dan sekitar kali, di mana banyak warga masyarakat membuang sampah tidak pada tempat yang sudah ditentukan.

4. Di Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Di Kelurahan ini, kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah sepertinya RT/RW tidak jauh berbeda dengan kelurahan lain. Sekalipun di daerah ini telah menjadi daerah perkotaan yang sangat ramai, namun peranan RT/RW cukup mempunyai pengaruh dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh dalam gerakan kebersihan, peranan RT/RW mampu menggerakkan warganya untuk melaksanakan kerja bakti.

Kemudian dalam gerakan kepemudaan, ternyata RT/RW mampu pula menggerakkan untuk pertandingan-pertandingan persahabatan antar warga dalam waktu ada peringatan Hari Proklamasi, Hari Ulang Tahun Kota Jakarta dan lain sebagainya.

5. Di Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Di Kelurahan ini tidak berbeda dengan di kelurahan lainnya, bahwa kedudukan dan peranan RT/RW dan pemimpin masyarakat non pemerintah lainnya sangat besar. Misalnya dalam mengatur ketertiban dan keamanan kampung, ternyata peranan RT/RW mempunyai pengaruh yang menentukan, karena setiap harinya dapat mengetahui secara langsung keadaan warganya.

Hal tersebut dapat dilihat pada waktu membersihkan sisa-sisa organisasi terlarang G 30 S/PKI di mana di daerah ini pernah dijadikan basis PKI, maka RT/RW inilah yang banyak berperanan untuk mengadakan operasi pembersihan dan penumpasan sisa-sisa G 30 S/PKI.⁵³⁾

53) Laporan Tahunan Pembinaan Wilayah Kelurahan Menteng Atas; *loc. cit.*, hal. 2.

Kemudian dalam gerakan keindahan dan kebersihan wilayah kelurahan, juga selalu melalui RT/RW dalam menggerakkan warga untuk kerja bakti.

Sampai saat ini di kelurahan Menteng Atas peranan RT/RW masih sangat besar, sehingga kegiatan-kegiatan seperti program KB, Olah Raga, PKW, dan lain-lain selalu digerakkan melalui RT/RW. Dan seolah-olah RT/RW mempunyai kekuatan hukum dalam menggerakkan warga masyarakat.

6. Di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Pembinaan organisasi RT/RW di kelurahan ini berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 156 tahun 1980, tanggal 19 Pebruari 1980 tentang peraturan RT/RW, maka selalu mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Organisasi RT/RW merupakan organisasi masyarakat non pemerintah yang mempunyai kedudukan penting di kalangan masyarakat dan diberikan jangka waktu masa bakti antara 3 – 4 tahun. Di wilayah ini sekarang terdapat 58 RT dan 6 RW, dengan demikian aparat pemerintahan selalu mengkoordinasi/pembinaan masyarakat melalui RT/RW yang ada. Hubungan RT/RW dengan pemerintahan desa, sangat erat dan pembinaan masyarakat berjalan baik. Peranan RT/RW dalam kalangan masyarakat di kelurahan ini dianggap sebagai pemimpin masyarakat yang paling dekat, karena semua masalah yang timbul dalam masyarakat, RT/RW selalu diikuti sertakan untuk memecahkannya.

Kemudian pembinaan masyarakat, juga melalui organisasi LKMD (K), dalam hal ini kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah yakni RT/RW di kelurahan Jagakarsa, juga ikut dilibatkan, karena langsung akan menyangkut pembinaan masyarakat desa, di mana RT/RW inilah yang langsung berhubungan dengan warga masyarakat.

7. Di Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Di Kelurahan Jelambar ini, termasuk daerah genangan air hujan. Sering terjadi bencana banjir akibat luapan air hujan tersebut. Dalam mengatasi bencana banjir tersebut ternyata peranan RT/RW

cukup besar, dan ternyata masyarakat menganggap bahwa RT/RW tersebut sebagai pemimpin masyarakat, yang juga dianggap mempunyai pengaruh terhadaparganya. Sebagai contoh adalah bahwa masyarakat sering mengadakan permasalahan tentang keadaan lingkungannya kepada RT/RW, sehingga RT/RW berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan ternyata belum dapat diselesaikan antar warga, RT/RW dapat langsung kepada aparat kelurahan, sehingga pihak kelurahan percaya terhadap apa yang diusulkan atau yang disampaikan RT/RW tersebut, kemudian diadakan musyawarah untuk pemecahannya. Dalam musyawarah tersebut, pihak pemerintah selalu mengikut sertakan RT/RW. Jadi jelas peranan RT/RW di kelurahan ini mempunyai pengaruh besar terhadaparganya.

8. Di Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Peranan dan kedudukan pemimpin masyarakat non pemerintah sangat besar, terlebih-lebih di daerah kelurahan ini banyak penduduknya hanya sebagai pekerja musiman. Apabila terjadi keributan di daerah ini penyelesaiannya agak sulit, karena banyak penduduk yang belum menjadi penduduk Jakarta, karena memang tidak akan terus menetap di Jakarta, sehingga tidak ada KTP Jakarta.⁵⁴⁾

Untuk mengatasi hal tersebut peranan RT/RW adalah sebagai pemimpin masyarakat non pemerintah adalah berusaha menyelesaikan dengan cara musyawarah, dan dalam kesempatan tersebut dapat membuat pernyataan tidak akan membuat keributan-keributan kedua kalinya dan dianjurkan agar mau menjadi warga yang baik dengan memenuhi persyaratan sebagai warga yakni mau membuat Kartu Penduduk.

Jadi dalam hal ini, peranan RT/RW dianggap sebagai pemimpin masyarakat, bahkan ada yang beranggapan bahwa RT/RW pun merupakan bagian dari aparat pemerintahan desa.

9. Di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah

54) Progress Report Kelurahan Jembatan Lima, *loc. cit.*, hal. 1.

yang termasuk organisasi RT/RW, ikut menentukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal ini dapat dilihat pada waktu permulaan Pelita sampai sekarang, bahwa banyak warga masyarakat pada mulanya tidak mau daerahnya kena proyek Mohammad Husni Thamrin, karena banyak rumah penduduk yang kena gusuran. Tetapi karena RT/RW yang dianggap sebagai orang dekat dengan pemerintah desa, maka semua keluhan-keluhan disampaikan lewat RT/RW. Kemudian karena RT/RW ikut membuat perencanaan dan memang dari RT/RW-lah usulan-usulan perbaikan kampung diterima oleh pemerintah desa (kelurahan), maka RT/RW inilah selalu diajak untuk memberikan pengertian dan kesadaran terhadap warganya, sehingga daerahnya dapat dilaksanakan pembangunan.⁵⁵⁾

Jadi dalam hal ini masyarakat beranggapan bahwa RT/RW pun mempunyai pengaruh terhadap masyarakat atas dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan.

D. KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK

Keadaan organisasi politik dan non politik di daerah pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah Pelita mempunyai pengaruh besar dalam kalangan masyarakat. Hanya bedanya kalau waktu sebelum Pelita pengaruh tersebut menjurus ke arah ideologi partai, karena pada waktu itu sebagian besar aparat pemerintahan desa dan organisasi RT/RW dipegang oleh orang-orang partai. Tetapi setelah Pelita untuk daerah pedesaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta aparat pemerintahannya dipegang oleh pegawai pemerintah, jadi mudah dikendalikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan untuk organisasi RT/RW meskipun tidak harus pegawai pemerintah, namun orang-orang yang terpilih sebagai ketua RT/RW adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan oleh warga masyarakat dan yang sudah diketahui pengabdianya kepada masyarakat.

Organisasi politik yang terdapat di daerah pedesaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seperti yang terdaftar dalam kontestan Pemilu, yakni 2 (dua) partai politik dan 1 (satu) Golongan Karya. Organisasi politik ini tidak menunjukkan hal-hal yang negatif dalam masyarakat dan sampai menjelang pelaksanaan Pemilu 1982 ini, masih menunjukkan kewajarannya.

55) Wawancara dengan Usin Nakyan, op.cit.

Karena organisasi politik ini pada dasarnya juga berorientasi pada pembangunan, maka para pelaku-pelakunya juga mendapat beban tanggung jawab material maupun spiritual dalam pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan organisasi non politik, yang sekarang ini terlihat di dalam masyarakat pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian besar bergerak dalam bidang sosial, olah raga, ketrampilan dan lain sebagainya. Yang bergerak dalam bidang sosial misalnya Koperasi Simpan Pinjam, Yayasan Dana Kematian, Yayasan dana Yatim Piatu dan lain sebagainya. Yang bergerak dalam bidang olah raga, kebanyakan olah raga bulu tangkis, olah raga tenis meja, catur, sepak bola, bela diri dan sebagainya. Sedangkan yang bergerak dalam bidang ketrampilan yakni dalam kegiatan PKW, merias bunga, merias rambut, pertukangan dan lain sebagainya. Akan tetapi kesemua organisasi non politik ini, kesemuanya juga menunjang pembangunan.

Adapun pengaruhnya dalam kalangan masyarakat baik organisasi politik maupun non politik bersifat positif dan dapat membantu pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal ini dapat kita ambil beberapa daerah pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:

- 1. Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Wilayah Jakarta Timur**

Meskipun di daerah ini sebelum Pelita, merupakan daerah berdomisilinya orang-orang yang terlibat G 30 S/PKI, saat ini sudah berubah sama sekali, bahwa organisasi politik yang ada menunjukkan rasa kesatuan dan persatuan di kalangan warga.

Dalam hal ini tampak pembangunan dalam Pelita berjalan lancar, sehingga daerah yang tadinya sangat tidak teratur, penuh sawah-sawah dan rawa, sekarang telah menjadi daerah perkotaan yang ramai.^{5 6)}

Organisasi non politik, tidak disangsikan lagi, karena benar-benar telah menunjukkan gerakan yang bermanfaat bagi warga masyarakat yakni ada 6 (enam) buah Koperasi yang berdiri di daerah ini. Di samping itu organisasi olah raganya banyak menunjukkan rasa per-

56) Wawancara dengan M.Soleh Suprpto; *loc. cit.*

satuan dan kesatuan, sebagai contoh pada waktu selesai pertandingan persahabatan saling menunjukkan sikap yang sopan, sekalipun di daerah ini sering ke luar sebagai juara.

2. Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Wilayah Jakarta Timur

Di wilayah kelurahan ini tidak terlihat pengaruh partai politik. Memang di kelurahan ini pembangunan tidak berjalan dengan pesat, karena kelurahan ini diprogramkan sebagai kawasan industri.

Organisasi non politik hanya kelihatan pada kegiatan keagamaan, seperti Majelis ta'lim, dan pengajian-pengajian.

3. Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur

Keadaan organisasi politik dan non politik di daerah ini, tidak jauh berbeda dengan di kelurahan lain, yakni tidak menunjukkan pengaruh yang negatif, bahkan sebaliknya mempunyai pengaruh yang positif, seperti halnya PPP dengan PDI maupun Golkar dalam kalangan masyarakat hanya berorientasi pada pembangunan. Tidak ada tanda-tanda untuk menjurus ke arah yang negatif. Gerakan partainya hanya menunjukkan kewajaran saja.

Kemudian untuk organisasi non politik jelas mempunyai pengaruh yang positif yakni bergerak dalam bidang sosial seperti koperasi, yayasan yatim piatu dan sebagainya, jelas berpengaruh positif dalam kalangan masyarakat.

Adapun yang bergerak di bidang ketrampilan dan petukangan, dapat menjurus ke arah wiraswasta yang saat ini sedang dibina oleh pemerintah. Seperti kegiatan kerajinan/industri rumah tangga jahit menjahit, ukir-ukiran, merangkai bunga, dan lain-lainnya.

Kemudian organisasi non politik dalam bidang olah raga, jelas untuk mencapai prestasi olah raga, dan dapat pula digunakan untuk mempererat persahabatan warga masyarakat.

4. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan

Keadaan organisasi politik dan organisasi non politik di kelurahan ini, tidak jauh berbeda dengan kelurahan lain. Sekalipun dalam Pemilu tahun 1977 terdapat 3 fraksi yakni PPP, PDI dan Golkar,

namun keadaan organisasi politik sampai saat ini menunjukkan gerakan yang wajar saja, sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang negatif dalam kalangan masyarakat.

Sedangkan organisasi non politik yang ada adalah Muhammadiyah dan perkumpulan Majelis Ta'lim (tempat pengajian), yang pengaruhnya dalam kalangan masyarakat adalah berupa kegiatan sosial dan pendidikan.

5. Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Wilayah Jakarta Selatan

Daerah ini pernah menjadi basis orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mesjid Al-Rahman pernah dijadikan markas gerakan partai tersebut, namun pada saat ini tempat tersebut telah dijadikan tempat untuk pembinaan mental spiritual.⁵⁷⁾ Sekalipun pada saat ini juga didapat pula organisasi politik yakni PPP, PDI dan Golkar, tetapi tidak menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh negatif, karena antara partai satu dan yang lainnya sampai saat ini tidak terjadi persaingan ideologi yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi pengaruh yang ditimbulkan lebih banyak pengaruh positif dari pada yang bersifat negatif.

6. Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Jakarta Selatan

Keadaan organisasi politik dan non politik di kelurahan ini tidak begitu menonjol adanya kegiatan politik dan lebih banyak menampilkan kegiatan sosial. Oleh karena itu pengaruh dari organisasi politik tidak terasa, akan tetapi pengaruh sosial sangat nampak jelas, karena banyaknya organisasi-organisasi non politik yang bergerak pada bidang sosial. Antara lain Yayasan Yatim Piatu, Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan.

Sebagai gambaran menunjukkan pada waktu Pemilu tahun 1977 organisasi politik menunjukkan jumlah yang menurun, sedangkan Golkar naik 75%. Begitu pula masyarakat selalu menuruti petunjuk-petunjuk guru, baik guru sekolah maupun guru pengajian.

57) Laporan Tahunan Pembinaan Wilayah Kelurahan Menteng Atas; *Loc. cit.*

7. Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat

Sebelum Pelita gerakan organisasi dan organisasi non politik sangat aktif, dan sering terjadi persaingan ideologi yang tidak sehat. Tetapi pada saat ini (sesudah Pelita), tidak nampak adanya persaingan yang tidak sehat tersebut, sekalipun ada 3 kontestan Pemilu. Kalau dahulu, RT/RW selalu dipegang oleh golongan organisasi politik, sekarang oleh rakyat/warga yang didukung oleh rakyat banyak.

Adapun organisasi masyarakat, mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat, karena organisasi masyarakat ini mampu menggerakkan kegiatan seperti pertandingan-pertandingan olah raga, Jelambar Cup, Saleh Jaya Cup, A.Arnadi Cup dan Pekan Olah Raga Karang Taruna (Porkat).⁵⁸⁾

Kemudian organisasi masyarakat yang bernama Panti Ketrampilan Wanita (PKW) akan melaksanakan program "Kejar", dalam usahanya untuk membantu pemerintah dalam menciptakan keindahan dan kebersihan kota, Jadi jelas bahwa pengaruh dan keadaan organisasi politik dan non politik, yang sekarang ada masih menunjukkan pengaruh yang positif.

8. Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat

Keadaan organisasi politik dan non politik di daerah ini, tidak banyak menonjol, disebabkan memang penduduknya banyak yang tidak menetap. Kegiatan organisasi politik tidak menonjol, sedangkan kegiatan dalam bidang agama lebih menunjukkan hal yang positif.

Sebagai gambaran singkat adalah sebagai berikut: Kegiatan PKW antara lain masak-memasak, menjahit, merajut, merangkai bunga dan merias penganten. Kegiatan PK3A antara lain mengadakan penyantunan terhadap anak-anak yatim piatu/orang jompo, mengadakan khitanan massal dan menyalurkan eksistensi keluarga.

Kegiatan remaja khusus dalam bidang olah raga, antara lain Tennis meja, Bulu Tangkis, Catur, Volly Ball, Sepak Bola dan Pencak Silat.

Kegiatan sosial telah berdiri sebuah Koperasi "KOWARJA", bergerak dalam simpan pinjam.⁵⁹⁾

58) Laporan Kegiatan Pembinaan Wilayah Kelurahan Jelambar; *Loc. cit*, hal. 22.

59) Progress Report Kelurahan Jembatan Lima; *op. cit*, hal. 2.

Jadi pengaruh organisasi non politik, jelas baik dan pengaruh organisasi politik tidak menonjol.

9. Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat

Tidak kelihatan menonjol pengaruh yang ditimbulkan dari organisasi politik. Di daerah ini ada 3 kontestan Pemilu, namun tidak ada tanda-tanda yang negatip terhadap kehidupan masyarakat di kelurahan ini.

Sedangkan pengaruh yang ditimbulkan dalam bidang sosial, banyak dari organisasi non politik, sepertinya koperasi.

Pada hal sebelum Pelita, pertentangan orpol (organisasi politik) maupun ormas (organisasi massa) sangat tajam, pada masa itu gerakan orpol dan ormas sangat aktif, tetapi pada saat ini tidak menunjukkan adanya gerakan ideologi partai yang bersifat negatip. Baik PPP, PDI, dan Golkar bergerak sewajarnya.

Sebagai perbandingan dapat pula kami ambilkan kelurahan lain di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yakni:

10. Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur

Daerah ini pernah menjadi daerah basis kekuatan G 30 S/PKI pada sebelum Pelita. Bahkan di daerah inilah sebagai tempat penganiayaan dan pembunuhan pahlawan-pahlawan Revolusi. Akan tetapi pada saat ini boleh dikatakan bersih dari pengaruh ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemudian pada masa Pelita ini, juga terdapat organisasi Politik yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. Namun ketiga kontestan Pemilu ini, tidak nampak mempengaruhi masyarakat dalam soal ideologi atau politik praktis yang menjurus ke arah negatip, akan tetapi bahkan sebaliknya warga masyarakat, yang di antaranya ada juga yang masuk menjadi anggota partai maupun Golongan Karya tersebut dapat menunjukkan rasa kesatuan dan persatuan bernegara Republik Indonesia.

Ada kemungkinan besar bahwa warga masyarakat di daerah Kelurahan Lubang Buaya ini, tidak mau terjadi peristiwa yang menyedihkan seperti Peristiwa G 30 S/PKI tempo dulu.-

BAB V

KESIMPULAN

Setelah mempelajari dan menganalisa tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pelita di daerah pedesaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekalipun tidak semua wilayah daerah pedesaan yang dapat dijangkau untuk mengetahui lebih dekat, namun dengan mengambil beberapa wilayah yang meliputi daerah pedesaan yang diklasifikasikan daerah maju, sedang dan terbelakang perkembangannya, maka akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Daerah pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ternyata tidak dapat disamakan dengan pengertian "desa" seperti yang kita kenal sehari-hari bahwa desa hanya sebagian wilayah dari pada kelurahan.

2. Akan tetapi ternyata pengertian daerah pedesaan di sini sama dengan keterangan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1979, yang menyatakan bahwa "desa" adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan lebih jelas lagi bahwa pengertian "desa" di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sama dengan "Kelurahan" adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

3. Sebelum Pelita keadaan daerah pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam keadaan terbelakang, karena sebagian besar belum mempunyai sarana angkutan seperti jalan kendaraan, jalan lingkungan, maupun daerah pemukiman yang sehat sehingga boleh dikatakan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdapat suatu hal yang bertolak belakang antara daerah pedesaan di perkotaan dan daerah pedesaan di daerah pedalaman.

4. Akibat adanya kontradiksi antara daerah pedesaan di perko-

taan dengan daerah pedesaan di daerah pedalaman tersebut, menimbulkan tidak adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan bagi kehidupan masyarakat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, salah satu daerah memiliki tarap hidup tinggi dan daerah lainnya tarap hidup sangat rendah, dengan demikian tidak ada unsur pemerataan. Keadaan yang demikian tercemin sebelum adanya Pelita.

5. Karena sebagian besar pemerintahan desa sebelum Pelita, dipegang oleh orang-orang partai, maka pembinaan masyarakat desa menuju kepada kepentingan partai, dengan demikian pembangunan masyarakat desa terlantar, yang akibatnya memudahkan masuknya ideologi politik.

6. Setelah adanya Pelita baik pada Pelita I, II, dan III (tahap awal), maka jelas orientasi pemerintahan desa, menuju kepada pembangunan, yang ternyata potensi desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional sangat menentukan.

7. Pengaruh Pelita dalam masyarakat pedesaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sangat positif, yang dapat dirasakan baik hasil pembangunan fisik maupun mental spiritual dapat menimbulkan pengaruh luas di kalangan masyarakat. Sepertinya perubahan cara berpikir dari sikap statis tradisional menjadi dinamis rasional.

8. Dalam bidang sosial ekonomi, ternyata dengan adanya Pelita, tarap hidup masyarakat meningkat lebih baik dan menghilangkan sifat ketergantungan dengan alam, karena terangsang untuk kreatif, bahkan menjurus ke arah mandiri atau wiraswasta.

9. Dalam bidang sosial budaya, jelas timbul adanya kesempatan berkembang bagi kebudayaan daerah dan penuh persaingan yang sehat, untuk menuju ke arah kebudayaan nasional yang lebih mantap.

10. Dalam bidang sosial politik, daerah pedesaan tidak dapat melepaskan diri, karena kehidupan sosial politik akan lebih hidup subur di daerah pedesaan, asalkan unsur aparat pemerintahannya selalu berorientasi kepada pembangunan. Ternyata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta pengaruh kehidupan politik di daerah pedesaan menunjukkan hal yang positif, karena selalu berorientasi kepada pembangunan.

B. PENUTUP

Sebagai penutup dari uraian tersebut di atas, maka kiranya kita sebagai warga masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah se-

layaknya akan selalu membantu dalam pelaksanaan pembangunan. Karena berhasil dan tidaknya pembangunan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama.

Perencanaan yang baik dan ditunjang dengan pembiayaan yang memadai, belum tentu akan berhasil apa yang dicita-citakan, apabila tidak dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menuju yang lebih baik. Unsur yang besar adalah berasal dari unsur yang kecil. Unsur kota berasal dari unsur desa. Tidak ada sesuatu yang akan datang tanpa kita berbuat dan berusaha.

Dengan penuh keyakinan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya'allah semua yang kita harapkan akan dapat dikabulkan.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, dan tak ada yang sempurna di dunia ini, maka tegor dan sapa, kritik yang membangun terhadap tulisan ini kami ucapkan terima kasih.

A m i n.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. *ANALISA, No. 3 tahun 1981*, Pembangunan Pedesaan, C.S.I.S.
2. Bayu Supangat, Drs. *Desa dan Kelurahan Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1979*, Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, diterbitkan untuk Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
4. Buku I, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga*, Pemerintah DKI Jakarta, 1979/1980 – 1983/1984.
5. Buku II, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga*, Pemerintah DKI Jakarta, 1979/1980 – 1983/1984.
6. Departemen Penerangan dan MPRS, *Ringkasan Ketetapan MPRS – RI, No. I dan II/MPRS/1960*.

7. *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978).
8. *Jakarta Timur Dalam Angka*, Tahun Dinas 1977/1978.
9. Kelurahan Penggilingan, *Laporan Pembinaan Wilayah 1980*.
10. Kelurahan Penggilingan, *Laporan Pembinaan Wilayah 1981*.
11. Kelurahan Gandaria Utara, *Progress Report Pembinaan Wilayah, 1980*.
12. Kelurahan Jelambar, *Laporan Kegiatan Pembinaan Wilayah, 1981*.
13. Kelurahan Jembatan Lima, *Progress Report Pembinaan Wilayah, 1981*.
14. Kelurahan Menteng Atas, *Laporan Tahunan Pembinaan Wilayah, 1980 – 1981*.
15. Kelurahan Lubang Buaya, *Laporan Kegiatan Pembinaan Wilayah, 1980 – 1981*.
16. Kelurahan Jagakarsa, *Laporan Tahunan Pembinaan Wilayah, 1980 – 1981*.

17. Kelurahan Tegal Alur, *Laporan Tahunan Pembinaan Wilayah*, 1980/1981.
18. *Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, tentang Type dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Kelurahan, keadaan tahun 1978/1979, 1979/1980.
19. Lembaga Study Pedesaan dan Kawasan U.G.M., Rahardjo, *Peranan unsur-unsur Pimpinan Desa Dalam Pembinaan Komunikasi dengan dan di kalangan Rakyat Pedesaan*.
20. Lembaga Study, *Strategi Pembangunan Desa*.
21. Marbun B.W. SH, *Proses Perkembangan Desa Menyongsong Tahun 2000*, Erlangga.
22. Marsono, Drs. *Undang-Undang R.I. No. 5 tahun 1979*, tentang Pemerintahan Desa, P.T. Ichtiar Baru, Jakarta 1980.
23. Soetardjo Kartohadikusumo, *Desa*, Sumur Bandung, Bandung, 1965.
24. Sumber Sapari, Ny. Drs, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia.
25. Suparmo R, *Mengenal Desa Gerak dan Pengelolaannya*, Inter-masa, Jakarta, 1977.
26. The Liang Gie, *Sejarah Pemerintahan Kota Jakarta*, oleh Kota Pradja, Jakarta, 1958.
27. Walikota Jakarta Timur, *Laporan Tahunan*, 1974.
28. Walikota Jakarta Timur, *Laporan Tahunan*, 1975.
29. Walikota Jakarta Timur, *Laporan Tahunan*, 1976.
30. Walikota Jakarta Timur, *Laporan Tahunan*, 1979 – 1980.

Daftar Responden :

31. *Wawancara dengan Drs. Singgih*, Kepala Urusan I/Pemerintahan Kantor Walikota Jakarta Timur, tanggal 25 Agustus 1981, di Kantor Walikota Jakarta Timur.
32. *Wawancara dengan Abdul Hamid*, Lurah Penggilingan dan staf, tanggal 24 Oktober 1981, di Kantor Kelurahan Penggilingan.

33. *Wawancara dengan Drs. Zainuddin*, Kepala Urusan I/Pemerintahan Kantor Walikota Jakarta Barat, tanggal 25 Juli 1981.
34. *Wawancara dengan Usin Nakyan*, Kepala Seksi Usaha Gotong Royong, LKMDK pada Urusan VII/Pembangunan Desa, Kantor Walikota Jakarta Barat, tanggal 25 Juli 1981.
35. *Wawancara dengan Drs. M. Soleh Suprpto*, Lurah Jatirawamangun dan Staf, pada tanggal 8 Nopember 1981.
36. *Wawancara dengan M. Arsyad Djamhari*, Wakil Lurah Klender, pada tanggal 6 Nopember 1981.
37. *Wawancara dengan A. Ridwan*, Lurah Mampang Tegol Parang, pada tanggal 12 September 1981.
38. *Wawancara dengan Hasmari*, Wakil Lurah Kelurahan Jagakarsa, pada tanggal 29 Agustus 1981.
39. *Wawancara dengan H. Agus Abdullah*, Lurah Gandaria Utara, pada tanggal 1 Oktober 1981.
40. *Wawancara dengan H. Ahmad Ali Rifai, BA*, Lurah Menteng Atas pada tanggal 3 Oktober 1981.

LAMPIRAN I

Pembangunan Desa pada hakekatnya merupakan suatu proses gerakan masyarakat dengan melalui musyawarah, merencanakan suatu kegiatan dan selanjutnya melaksanakannya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat itu sendiri yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan budaya. Di dalam pelaksanaannya gerakan ini mendasarkan pada azas-azas pokok sesuai dengan azas Pembangunan Nasional, adil dan merata serta perikehidupan dalam keseimbangan.

Jelaslah bahwa berdasarkan azas-azas tersebut di atas, gerakan pembangunan mengandung suatu makna usaha bersama yang sesuai antara Pemerintah dan masyarakat serta antara masyarakat itu sendiri. Dengan pengertian lain bahwa partisipasi masyarakat yang berbentuk kegiatan-kegiatan yang nyata baik material maupun operasional harus merupakan penunjang dan pengisi usaha-usaha pemerintah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bertitik tolak pada tujuan pembangunan tersebut di atas, maka Pemerintah c.q. Departemen Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Maret 1980 No. 13 Tahun 1980 telah menggariskan kebijaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan dengan mengadakan Monitoring/Penelitian "Potensi Desa".

Monitoring/Penelitian Potensi Desa ialah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data tentang Desa/Kelurahan terutama mengenai luas wilayah, keadaan alam, letak desa, jumlah penduduk, mata pencaharian, produksi desa, adat istiadat, lembaga-lembaga, gotong royong dan prasarana desa, sehingga dari data-data tersebut dapat dianalisa dan diketahui klasifikasi dan tingkat perkembangan Desa/Kelurahan dengan membuat scort yang berdasarkan Pola Nasional sebagai berikut:

7 – 11 Desa Swadaya, 12 – 16 Desa Swakarya, 17 – 21 Desa Swasembada.

Dari hasil penyusunan klasifikasi Desa/Kelurahan ini kita akan dapat mengetahui gambaran kemajuan dan tingkat perkembangan Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Hal ini dimaksudkan memperjelas hal-hal yang berhubungan dengan kegiat-

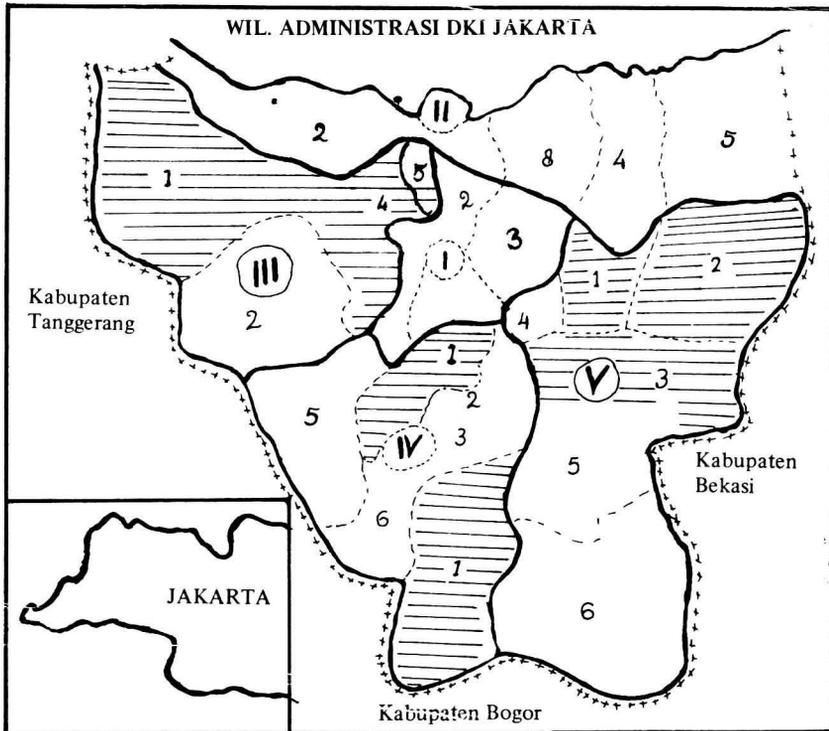
an operasional meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan wilayah Kecamatan UDKP. Hasil penelitian ini bukan saja merupakan data atau informasi bagi Kecamatan UDKP yang -bersangkutan namun sebagai dasar untuk mengarahkan program/proyek sektoral/regional dan inpres yang menyeluruh dan terkoordinir di Kelurahan-kelurahan dalam Wilayah Kecamatan UDKP di mana pembiayaannya manunggal dalam fungsi dan tanggung jawab Camat sebagai Kepala Wilayah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Monitoring/Penelitian potensi Desa di Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 1979/1980 telah selesai dilaksanakan yang meliputi 236 Kelurahan dan untuk mengetahui tingkat perkembangan kelurahan disajikan pula data klasifikasi perkembangan Kelurahan.

-----o0o-----

LAMPIRAN II :

PETA DAERAH PENELITIAN
SEJARAH PENGARUH PELITA DI WILAYAH DKI JAKARTA
TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN.



KETERANGAN :



Daerah Kecamatan tempat dilakukan Penelitian

I. JAKARTA PUSAT.

1. Kec. Sawah Besar
2. --,-- Kemayoran
3. --,-- Cempaka Putih
4. --,-- Senen
5. --,-- Gambir
6. --,-- Menteng
7. --,-- Tanah Abang

II. JAKARTA UTARA.

1. Kec. Kepulauan Seribu
2. --,-- Penjaringan
3. --,-- Tanjung Priok
4. --,-- K o j a
5. --,-- Cilincing

III. JAKARTA BARAT.

1. Kec. Cengkareng
2. --,-- Kebon Jeruk
3. --,-- Grogol
4. --,-- Taman Sari
5. --,-- Taman Sari

IV. JAKARTA SELATAN.

1. Kec. Setia Budi
2. --,-- Te b e t
3. --,-- Mampang Prapatan
4. --,-- Kebayoran Baru
5. --,-- Kebayoran Lama
6. --,-- Cilandak
7. --,-- Pasar Minggu

V. JAKARTA TIMUR.

1. Kec. Pulo Gadung
2. --,-- Cakung
3. --,-- Jatinegara
4. --,-- Matraman
5. --,-- Kramat Jati
6. --,-- Pasar Rebo

**TYPE DAN KLASIFIKASI TINGKAT PERKEMBANGAN KELURAHAN
KEADAAN TAHUN 1975/1976
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nama Wilayah Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Type Dasar		Type Pokok		Faktor tingkat perkembangan								Type Kelurahan terperinci	Jumlah Nilai (Scort) 1 s/d 21 1-6 Pradesa. 7-11 Swadaya. 12-16 Swakarya. 17-21 Swasembada	Tingkat perkembangan Kelurahan.	Rekapitulasi per Kecamatan, Luas Kecamatan dan Jumlah Penduduk.	
			Ke-pa-dat-an	Alam	Type	Letak Desa (I, II, III, IV).	Type (D.N.I, II, III, IV).	Ekonomi			Sosial		Budaya						Praca-rana Perhub. Pemas, Produk si & sosial
								Mata pen-cahan	Pro-duk-tan	Adat isti-adat	Ke-lem-ba-gan	Pen-di-dik-an	Swa-daya Go-tong ro-yong.						
2	3	4	(D)	(N)	(DN)	8	9	(E)	(Y)	(A)	(L)	(Pd)	(Gr)	(P)	17	18	19	20	
1. Matraman.	1. Kebon Manggis. 2. Pal Meriam. 3. Kayu Manis. 4. Utan Kayu. 5. Pisangan Baru.	D3 N3 D3N3 II D3N3II E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada	Kel. Swasembada 5 Luas Kec. 4,88 km Jumlah Penduduk 172.185.														
		D3 N3 D3N3 II D3N3II E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 II D3N3II E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 II D3N3II E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 II D3N3II E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada															
2. Pulogadung	1. Kayuputih 2. Jatirawamangun 3. Pisangan Timur 4. Cipinang. 5. Pulogadung. 6. Jatinegara Kaum.	D3 N3 D3N3 II D3N3II E2 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y1 A3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y1 A3 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada	Kel. Swasembada 5 Luas Kec. 4,88 km Jumlah Penduduk 172.185														
		D3 N3 D3N3 I D3N3I E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y3 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y1 A3 Pd2 Gr3 P3	20	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 I D3N3I E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y1 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3	28	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 I D3N3I E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y1 A2 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 III D3N3III E2 Y1 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y1 A2 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3	27	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 II D3N3II E2 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada															
3. Jatinegara	1. Kp. Melayu 2. Balimester. 3. Bidaracina. 4. Cip. Cempedak 5. Rawabangke 6. Cip. Muara. 7. Cip. Besar. 8. Pondok Bambu 9. Klender. 10. Duren Sawit 11. M a l a k a 12. Pondok Kelapa	D3 N3 D3N3 I D3N3I E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y1 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y3 A3 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada	Kel. Swasembada 12 Luas Kec. 32,65 km Jumlah Penduduk 256.350														
		D3 N3 D3N3 III D3N3III E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y1 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y3 A3 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 I D3N3I E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y3 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y3 A3 Pd2 Gr3 P3	20	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 I D3N3I E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y3 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y1 A3 Pd2 Gr3 P3	20	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 I D3N3I E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y3 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y1 A3 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 III D3N3III E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y1 A3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 II D3N3II E2 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 II D3N3II E2 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y1 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 II D3N3II E2 Y1 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y1 A2 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 III D3N3III E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 III D3N3III E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 I D3N3I E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
4. Kramatjati	1. Cawang 2. Cip. Melayu 3. Cililitan. 4. Kramatjati 5. Batuampar 6. Balekambang 7. Kepon Pala 8. Makasar. 9. Tengah 10. Dukuh. 11. Halim Pk.	D3 N3 D3N3 I D3N3I E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada	Kel. Swasembada 11 Luas Kecl. 38,84 km Jumlah Penduduk 161.088.														
		D3 N3 D3N3 II D3N3II E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 II D3N3II E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 I D3N3I E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E2 Y1 A2 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 III D3N3III E2 Y1 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y1 A2 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 III D3N3III E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 II D3N3II E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 III D3N3III E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 III D3N3III E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 III D3N3III E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada															
		D3 N3 D3N3 III D3N3III E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3 E3 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3 E2 Y2 A2 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada															

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Jakarta Selatan	5. Pasar Rebo	1. Lobang Buaya	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada	Kel. Swakarya 14
		2. Gedong	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada	Kel. Swasembada 4
		3. Rambutan	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E2	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E2 Y1 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	15	Swakarya	Luas Kec. 52,64 km
		4. Ceger	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	17	Swasembada	Jumlah Penduduk
		5. Bambu Apus	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E1	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E1 Y1 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	14	Swakarya	100.562
		6. Setu	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	17	Swasembada	
		7. Cipayung	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E1	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E1 Y1 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	14	Swakarya	
		8. Susukan	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E1	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E1 Y1 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	14	Swakarya	
		9. Ciracas	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	16	Swakarya	
		10. Cijantung	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	17	Swasembada	
		11. Baru	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	17	Swasembada	
		12. Kalisari	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	16	Swakarya	
		13. Pekayon	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E1	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E1 Y1 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	14	Swakarya	
		14. Kelapa II Wetan	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E1	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E1 Y1 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	14	Swakarya	
		15. Munjul	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E1	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E1 Y1 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	14	Swakarya	
		16. Cilangkap	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E1	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E1 Y1 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	14	Swakarya	
		17. Cibubur	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	16	Swakarya	
		18. Pondok Ronggon	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	16	Swakarya	
	7. Cakung	1. Rawaterate	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	17	Swasembada	kel. Swakarya 3
		2. Jatinegara	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	17	Swasembada	Kel. Swasembada 3
		3. Penggilingan	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P2	E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	17	Swasembada	Luas Kec. 33,92 km
		4. Cakung	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	15	Swakarya	Jumlah Penduduk
		5. Ujung Menteng	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	15	Swakarya	80.610
		6. Pulogebang.	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	15	Swakarya	
	1. Tebet	1. Menteng Dalam	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada	Kel. Swasembada 7
		2. Tebet Barat	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	20	Swasembada	Luas Kec. 8,29 km
		3. Tebet Timur	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	20	Swasembada	Jumlah Penduduk
		4. Kebon Baru	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada	223.931
		5. Bukit Duri	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada	
		6. Manggarai Selatan	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada	
		7. Manggarai	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	20	Swasembada	
	2. Setia Budi	1. Setia Budi	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	20	Swasembada	Kes. Swasembada 8
		2. Guntur	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada	Luas Kec. 9,53 km
		3. Karet	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada	Jumlah Penduduk
		4. Karet Semanggi	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada	215.533.
		5. Karet Kuningan	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada	
		6. Menteng Timur	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada	
		7. Menteng Atas	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada	
		8. Pasar Manggis.	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19	Swasembada	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	14	15	16	17	18	19	20					
3. Mampang Prapatan.	1. Kuningan Barat	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	Kel. Swasembada 11 Luas Kec. 9,53 km2 Jumlah Penduduk 215.533
	2. Mamp. Prapatan	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	
	3. Mampang Pela	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	4. Tegal Parang	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	
	5. Bangka	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	6. Pancoran	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	
	7. Duren Tiga	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	
	8. Kalibata	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	
	9. Cikoko	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	10. Pengadegan	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	11. Rawajati	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
4. Pasar Minggu	1. Pejaten	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E2	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	Kel. Swasembada 10. Luas Kec. 42,57 km Jumlah Penduduk 129.605.
	2. Pasar Minggu	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	3. Tanjung Barat	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	4. Jatipadang	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	5. Ragunan	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	6. Cilandak	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E2	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	
	7. Jagakarsa	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	8. Lenteng Agung	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	9. Sreng. Sawah.	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	10. Ciganjur	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
5. Kebayoran Lama	1. Grogol	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	20	Swasembada	Kel. Swasembada 5. Kel. Swakarya 5 Luas Kec. 22,72 km Jumlah Penduduk 153.251.
	2. Grogol Selatan	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	
	3. Cipulir	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	
	4. Kebayoran Lama	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	
	5. Pondok Pinang	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	6. Petukangan Utara	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E2	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	E2	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	15	Swakarya	
	7. Petukangan sel.	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	E3	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	15	Swakarya	
	8. Ulu Jami.	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E2	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	E2	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	15	Swakarya	
	9. Pesanggrahan	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	E2	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	15	Swakarya	
	10. Bintaro	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	E2	Y2	A2	L2	Pd2	Gr3	P2	15	Swakarya	
6. Cilandak	1. Gandaria Selatan	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E1	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E1	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	Kel. Swasembada 5 Luas Kec. 17,87 km Jumlah Penduduk 67.123.
	2. Cipete Selatan	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	
	3. Cilandak	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	19	Swasembada	
	4. Lebak Bulus	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	5. Pondok Labu	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
7. Kebayoran Baru	1. Senayan	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	19	Swasembada	Kel. Swasembada 10 Luas Kec. 12,57 km Jumlah Penduduk 186.738.
	2. Rawa Barat	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	3. Selong	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	4. Gunung	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E3	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	5. Kramat Pela	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	18	Swasembada	
	6. Melawai	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y3	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	20	Swasembada	
	7. Petogogan	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	19	Swasembada	
	8. Pulo	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	9. Gandaria Utara	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	
	10. Cipete Utara.	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3	Y1	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	17	Swasembada	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Jakarta Barat	1. Cengkareng	1.Semanan	D3	N2	D3N2	II	D3N2II	E2	Y2	A3	L3	Pd2	Gr2	P2	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr2 P2	14	Swakarya	Kel. Swasembada 8. Luas Kec. 17,43 km2 Jumlah Penduduk 305.972.
		2.Kamal	D3	N2	D3N2	II	D3N2II	E2	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada	
		3.Tegal Alur	D3	N2	D3N2	III	D3N2III	E1	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E1 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3	16	Swakarya	
		4.Pegadungan	D3	N2	D3N2	III	D3N2III	E2	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada	
		5.Kalideres	D3	N2	D3N2	II	D3N2II	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada	
		6.Cengkareng	D3	N2	D3N2	I	D3N2I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3	18	Swasembada	
		7.Kapuk	D3	N2	D3N2	IV	D3N2IV	E2	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada	
		8.Kedaung Kali Angke	D3	N2	D3N2	I	D3N2I	E2	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P3	17	Swasembada	
		9.Duri Kosambi	D3	N2	D3N2	I	D3N2I	E2	Y2	A3	L2	Pd2	Gr3	P2	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	14	Swakarya	
		10.Rawa Biaaya	D3	N2	D3N2	I	D3N2I	E2	Y2	A3	L2	Pd2	Gr2	P2	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr2 P2	14	Swakarya	
2. Grogol Petamburan	1. Grogol	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr2	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19	Ke Swasembada 8	Kel. Swakarya 4 Kel. Swasembada 6 Luas Kec. 54,59 km Jumlah Penduduk 122.407	
		2. Jelambar	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18		Lu Swasembada cm2
		3. Tanjung Duren	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18		Jur Swasembada :
		4. Tomang	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	20		30. Swasembada
		5. Jatipulo	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	20		Swasembada
		6. Kotabambu	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18		Swasembada
		7. Slipi	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	20		Swasembada
		8. Pal Merah	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	20		Swasembada
3. Taman Sari	1. Pinangsia	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	20	Ke Swasembada 8	Kel. Swasembada 8. Luas Kec. 4,03 km2 Jumlah Penduduk.	
		2. Glodok	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	20		Lu Swasembada m2
		3. Manga Besar	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18		Jur Swasembada :
		4. Tangki	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19		Swasembada
		5. Keagungan	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18		Swasembada
		6. Krukut	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y3	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y3 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	20		Swasembada
		7. Taman Sari	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18		Swasembada
		8. Maphar	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18		Swasembada
4. Tambora	1. Pekojan	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18	Ke Swasembada 10	Kel. Swasembada 10. Luas Kec. 4,03 km2 Jumlah Penduduk.	
		2. Malaka	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18		Lu Swasembada m2
		3. Krendang	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19		Jur Swasembada :
		4. Tambora	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19		Swasembada
		5. Jembatan Lima	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19		Swasembada
		6. Duri	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19		Swasembada
		7. Tanah Sereal	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19		Swasembada
		8. Angke	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y1	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y1 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	18		Swasembada
		9. Jembatan Besi	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19		Swasembada
		10. Kali Baru	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A3	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A3 L3 Pd2 Gr3 P3	19		Swasembada
5. Kebon Jeruk	1. Kembangan	D3	N3	D3N3	IV	D3N3IV	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	16	Ke Swakarya 5	Kel. Swakarya 5. Kel. Swasembada 6. Luas Kec. 41,62 km2 Jumlah Penduduk 895	
		2. Kedoya	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	17		Ke Swasembada 6
		3. Meruya Ilir	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	16		Lu Swakarya cm2
		4. Meruya udik	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	16		Jur Swakarya :
		5. Joglo	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	18		89. Swasembada
		6. Srengseng	D3	N3	D3N3	III	D3N3III	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	16		Swakarya
		7. Kebon Jeruk	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E3	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E3 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	17		Swasembada
		8. Duri Ilir	D3	N3	D3N3	I	D3N3I	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	16		Swakarya
		9. Sukabumi Ilir	D3	N3	D3N3	II	D3N3II	E2	Y2	A2	L3	Pd2	Gr3	P3	E2 Y2 A2 L3 Pd2 Gr3 P2	17		Swasembada

D K I JAKARTA RAYA

SKALA 1 : 70.000
Copyright © 1964 INDONESIA

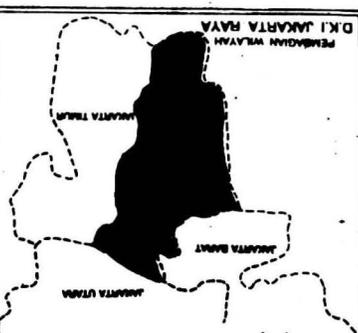
T I T I K



- 1. Gedung perantara
 - 2. Tiang bendera
 - 3. Lapangan
 - 4. Dua buah gerbang lengan-tangan
 - 5. Dua buah gerbang lengan-tangan
 - 6. Lapangan
 - 7. Lapangan
 - 8. Lapangan
 - 9. Lapangan
 - 10. Gedung rumah-rumahan rasial
 - 11. Tembok berbentuk segitiga
 - 12. Pagar halaman perumahan
 - 13. Halaman perumahan
- DESAH MOKSARAN
PANCASILA BAKTI

STREKSIKAWAN

- 1. Jalan
- 2. Jalan
- 3. Jalan
- 4. Jalan
- 5. Jalan
- 6. Jalan
- 7. Jalan
- 8. Jalan
- 9. Jalan
- 10. Jalan
- 11. Jalan
- 12. Jalan
- 13. Jalan
- 14. Jalan
- 15. Jalan
- 16. Jalan
- 17. Jalan
- 18. Jalan
- 19. Jalan
- 20. Jalan
- 21. Jalan
- 22. Jalan
- 23. Jalan
- 24. Jalan
- 25. Jalan
- 26. Jalan
- 27. Jalan
- 28. Jalan
- 29. Jalan
- 30. Jalan
- 31. Jalan
- 32. Jalan
- 33. Jalan
- 34. Jalan
- 35. Jalan
- 36. Jalan
- 37. Jalan
- 38. Jalan
- 39. Jalan
- 40. Jalan
- 41. Jalan
- 42. Jalan
- 43. Jalan
- 44. Jalan
- 45. Jalan
- 46. Jalan
- 47. Jalan
- 48. Jalan
- 49. Jalan
- 50. Jalan
- 51. Jalan
- 52. Jalan
- 53. Jalan
- 54. Jalan
- 55. Jalan
- 56. Jalan
- 57. Jalan
- 58. Jalan
- 59. Jalan
- 60. Jalan
- 61. Jalan
- 62. Jalan
- 63. Jalan
- 64. Jalan
- 65. Jalan
- 66. Jalan
- 67. Jalan
- 68. Jalan
- 69. Jalan
- 70. Jalan
- 71. Jalan
- 72. Jalan
- 73. Jalan
- 74. Jalan
- 75. Jalan
- 76. Jalan
- 77. Jalan
- 78. Jalan
- 79. Jalan
- 80. Jalan
- 81. Jalan
- 82. Jalan
- 83. Jalan
- 84. Jalan
- 85. Jalan
- 86. Jalan
- 87. Jalan
- 88. Jalan
- 89. Jalan
- 90. Jalan
- 91. Jalan
- 92. Jalan
- 93. Jalan
- 94. Jalan
- 95. Jalan
- 96. Jalan
- 97. Jalan
- 98. Jalan
- 99. Jalan
- 100. Jalan



Tidak diperdagangkan untuk umum

SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH KHU

Perpustakaan
Jenderal Keb

959.80

SEJ

s

Dep. P dan K